

PLTU Captive: Proses Kavitasasi Sosial-Ekologi Pulau Obi

Ekonomi-Politik Transisi Energi Indonesia

Kamal S. Kumkelo, M. Jihad Hurasan, Mujakir Namma

Editor: O. Z. S. Tihurua

Dewan Redaksi

Pimpinan Redaksi

Mohamad Shohibuddin, M.Si.

Redaksi Pelaksana

Eko Cahyono, M.Si.

Dewan Redaksi

Prof. Dr. Endriatmo Soetarto (IPB University)

Dr. Soeryo Adiwibowo (IPB University)

Dian Yanuardy (Dewan Pengurus Sajogyo Inti Utama)

Maksum Syam, M. Sos (Dir. Eksekutif Sajogyo Institute)

Ahmad Jaetuloh, S.IP (Wakil Dir. Sajogyo Institute)



Sajogyo Institute merupakan Pusat Studi dan Dokumentasi Agraria di Indonesia

Jalan Malabar No.22 Bogor, Indonesia 16151

Telp./Fax: (0251) 8374048,

E-Mail: eksekutif@sajogyo-institute.org

Tentang Sajogyo Institute

Sajogyo Institute adalah lembaga nirlaba independen yang bergerak dalam bidang penelitian, pendidikan dan latihan, dan advokasi kebijakan untuk mencapai cita-cita keadilan agraria, kemandirian desa-desa, dan kedaulatan warganegara perempuan dan laki-laki atas tanah air Indonesia. Sajogyo Institute merupakan badan pelaksana Yayasan Sajogyo Inti Utama yang didirikan pada tanggal 10 Maret 2005. Prof. Dr. Ir. Sajogyo, yang dikenal sebagai peletak dasar ilmu sosiologi pedesaan Indonesia, merupakan salah satu pendiri yayasan dan pemberi wakaf tanah beserta keseluruhan bangunan rumah beserta isinya, yang berada di Jl. Malabar, No. 22, Kel. Babakan. Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat, 16151.

Tentang KORA Maluku

KORA Maluku atau sKOLA RAKYAT Maluku adalah komunitas belajar di Pulau Ambon yang menaruh minat pada isu-isu krisis sosial-ekologis, secara khusus di Kepulauan Maluku, dengan kerja utama melakukan riset, advokasi dan dokumentasi, baik dengan berkolaborasi di kampung maupun dengan organisasi non-pemerintah. KORA Maluku terbentuk pada 2015 dan pada 2023 resmi berbadan hukum dengan nama lengkap Yayasan Skola Rakyat Maluku.

Working Paper Sajogyo Institute, Volume 4, Nomor 1, Januari 2025

© 2025, Sajogyo Institute

Penyebarluasan dan penggandaan naskah ini diperkenankan sepanjang untuk tujuan pendidikan dan bukan untuk tujuan komersial.

Usulan Pengutipan:

Kamal S. Kumkelo, M. Jihad Hurasan, Mujakir Namma. "PLTU Captive: Proses Kavitasi Sosial-Ekologi Pulau Obi". Working Paper Sajogyo Institute (Vol. 4, No. 1, Januari 2025). Bogor: Sajogyo Institute.

Working Paper ini menggambarkan pandangan pribadi penulis, bukan pandangan dan kebijakan Sajogyo Institute. Para penulis bertanggung jawab terhadap keseluruhan isi Working Paper ini.

DAFTAR ISI

Cover

Daftar Isi

Pengantar Editor

PLTU Captive: Percepatan Perluasan Ruang Produksi Kapital & Proses Kavitasi Ruang Sosial-Ekologis Pulau Obi (Desa Kawasi)	1
I. PENDAHULUAN	4
1. Latar Belakang	4
2. Apa yang ingin diperiksa?	6
3. Metodologi Penelitian	7
II. PULAU OBI DAN KAWASI SEBELUM ERA EKSTRATIVISME	9
1. Berulang dan Berkelindannya Cerita tentang Penawanan, Tawanan, dan Tertawan	9
2. Demografi Desa Kawasi	12
3. Latar Sosial-Ekologi Kawasi	13
III. ERA EKSTRATIVISME DI KAWASI	15
1. Sejarah Ekstrativisme di Pulau Obi dan Kawasi	15
2. PLTU Captive dan Gurita Harita Grup	18
3. Perusahaan Peleburan Nikel dan Rantai Pasok PLTU Batubara Captive	21
4. Jejaring Ekonomi Ekstraktif	33
IV. RAGAM KRISIS SOSIAL-EKOLOGI	44
1. Dampak Operasi PLTU Captive	44
2. Dampak Industrialisasi Nikel	49
V. PEMETAAN POTENSI RUANG BELAJAR	76
1. Lembaga Agama	76
2. Masyarakat Wayalower	77
3. Desa Wui	78
4. Moda Produksi Ruang dan Ruang Produksi Orang Wui	79
5. Pemetaan Ruang Produksi Darat dan Laut	81
DAFTAR PUSTAKA	87

PENGANTAR EDITOR

PLTU Captive: Percepatan Perluasan Ruang Produksi Kapital & Proses Kavitasi Ruang Sosial-Ekologis Pulau Obi (Desa Kawasi)

O. Z. S. Tihurua

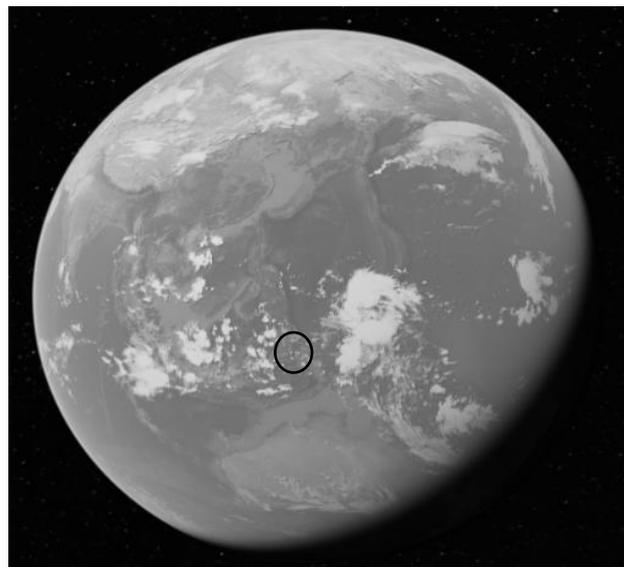
Keseluruhan cerita yang dideskripsikan di dalam laporan ini menunjukkan satu hal, beroperasinya PLTU Captive di pulau Obi (Desa Kawasi) memunculkan adanya proses kavitasi kondisi sosial-ekologi pada skala pulau. Kavitasi adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan munculnya fenomena gelembung-gelembung gas pada cairan karena adanya perubahan tekanan didalam pipa. Istilah ini memiliki konotasi negatif dimana keberadaannya dapat berdampak pada menurunnya daya tahan suatu benda (pompa). Kami menggunakan istilah ini untuk merepresentasikan fenomena menurunnya kualitas kondisi sosial dan ekologi di Kawasi secara khusus dan pulau Obi secara umum ketika beroperasinya PLTU Captive. Sejak adanya PLTU Captive sebagai pendukung utama kebutuhan energi untuk hilirisasi serta pemrosesan nikel pada smelter, sejak itu pula pengerukan dan penghancuran pulau Obi makin cepat dan massif. Situasi ini menunjukkan bahwa ruang social-ekologis pulau Obi dilihat hanya sebagai ruang produksi kapital, bukan ruang kehidupan Bersama manusia dan entitas lainnya yang telah menyejarah. Fenomena ini bisa juga kita sebut-meminjam istilah Hendro Sangkoyo-kesatuan social-ekologis menyejarah itu telah sedang terjadi pengeroposan oleh perluasan ruang akumulasi kapital baru yang akan kemudian melahirkan krisis baru. Sehingga PLTU Captive berperan sebagai medium percepatan akumulasi kapital, sekaligus percepatan pengrusakan ruang social-ekologis.

Produksi energi eksklusif melalui PLTU Captive meningkatkan pengerukan bahan baku mentah *Ore* di hulu (Gunung) secara gila-gilaan dan merubah siklus pada daur alam. Ketika berkurangnya pepohonan sebagai media penghirup karbon mengakibatkan suhu di desa kawasi meningkat dan juga berkurangnya penyerapan air tanah. Pada tingkat lanjut kondisi ini mengakibatkan berkurangnya cadangan air tanah untuk kebutuhan harian masyarakat serta tingginya intensitas hujan yang tidak menentu mengakibatkan banjir yang menggenangi perkebunan maupun pemukiman warga.

Perubahan bukan saja terjadi pada alam tetapi juga keterbelahan sosial di tengah masyarakat akibat dari rentetan inetervensi pembangunan ekstraksi keruk. Pro-Kontra

terhadap relokasi warga kampung ke pemukiman baru *Eco Village* atau meningkatnya pengidap ISPA dari tahun ke tahun, penggusuran paksa terhadap kebun produksi warga, metode tukar-guling yang semena-mena, intimidasi pada warga yang menolak melepaskan lahan produksinya, atau pula meniggalnya anak empat tahun akibat tak tertolong akibat ISPA. Manusia juga terdampak ketika jalanan kampung berlumpur, udara yang tercemar akibat aktivitas PLTU dan Smelter, atau tempat penampungan batubara yang sangat dekat dengan pemukiman, sungai-sungai sumber mata air yang tercemar. Semua ini adalah bagian dari cerita proses percepatan ruang hidup pulau Obi atau kawasi cepat dengan adanya PLTU Captive.

Tentu cerita kavitasi social-ekologi pulau Obi ini merupakan sesuatu yang sangat paradoks. Pasalnya, proses ini terjadi dalam Upaya global untuk menyelamatkan bumi karena adanya pemanasan global dan krisis iklim. Proses penyelamatan mengusung tema “energi berkelanjutan” untuk mengganti energi fosil yang katanya telah merusak alam. Namun, penyelamatan bumi dari krisis ekologis dilakukan dengan membuat percepatan krisis social-ekologis di bagian wilayah “pinggiran” di Selatan global yang mungkin bahkan tidak terpetakan dalam peta dunia.



Gambar pulau Obi adalah titik yang sangat kecil di dalam peta global

Sumber: diolah dari aplikasi Google Earth

Cerita yang muncul di Kawasi atau pulau Obi yang kami rangkum dalam laporan ini dapat membuat kita menahan diri untuk menggunakan dikotomi “Utara-Selatan” dimana “selatan” selalu menjadi korban. Temuan kami menunjukkan bahwa “jejaring ekonomi

ekstraktif' energi memiliki keterpautan yang saling berkelindan antara pemain ekonomi rusak di level global, nasional, regional, dan level kampung. Walaupun keterhubungan mereka bukanlah bersifat "metabolic". Relasi mereka adalah relasi yang saling memangsa, seperti metafor relasi "ikan-ikan hiu, ido, homa" yang dikemukakan oleh Mangunwijaya. Kabar buruknya, proses saling memangsa dari pelaku ekonomi ekstraktif tidak menyurutkan proses kavitasi pulau Obi, tetapi malah sebaliknya, mempercepat kavitasi tersebut.

I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pulau Obi terletak di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Berbatasan langsung dengan Provinsi Maluku di sebelah selatan dan Provinsi Papua Barat di sebelah timur. Penduduknya secara keseluruhan menetap di pesisir pantai, kondisi demikian disebabkan oleh suku-suku awal yang menetap bermata pencaharian sebagai nelayan dan petani. Akan tetapi terdapat beberapa pemukiman di daerah perbukitan yang merupakan pemukiman pekerja tambang dan pemukiman temporer bagi petani cengkih yang digunakan saat panen cengkih.¹

Luas wilayah pulau Obi mencapai 2.542-kilometer persegi yang terbentang dari Timur ke Barat 85 km dan dari Selatan ke Utara 45 km. Obi terbagi dalam lima kecamatan dan terdapat 34 desa di dalamnya dengan total jumlah penduduk yang tercatat sebesar 52.588 jiwa. Rata-rata penduduk yang mendiami pulau Obi merupakan suku Tobelo-Galela, Ternate, Tidore, dan juga suku buton, bugis dan jawa. Masyarakat Pulau Obi sebagian besar mendapatkan penghasilan dari hasil hutan seperti cengkeh, pala, dan kelapa. Selain memiliki potensi sumber daya alam dalam sektor pertanian dan laut, juga terdapat sektor pertambangan yang cukup baik, potensi yang ada adalah tambang emas, batubara, nikel, semen, dan minyak bumi.² Nikel sendiri di pulau Obi telah diproduksi lama sejak PT Aneka Tambang (ANTAM) melakukan eksplorasi dan eksploitasi pada tahun 1995, dan pada tahun 2010 dilanjutkan oleh PT. Harita Group yang masih beroperasi sampai saat ini.

Dari keseluruhan cadangan nikel di Indonesia, Maluku memiliki cadangan nikel sebesar 39% dari total angka nasional. Sebagian besar cadangannya ditemukan di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara.³ Industri Nikel di Kabupaten Halmahera Selatan berada tepatnya di Desa Kawasi, Kecamatan Obi. Luas izin tambang nikel di wilayah tersebut mencapai 9.050 ha (91 km²) atau setengah dari luas Desa kawasi yang memiliki luas 134 km², luas konsesi itu merupakan titik eksploitasi sekaligus pusat konsentrasi pabrik pengolahan bijih

¹ <https://www.kompas.id/baca/foto/2023/12/02/menjejakkan-kaki-di-obi-surga-nikel-di-maluku-utara>

² <https://www.mongabay.co.id/2023/12/22/gubernur-malut-terjerat-kasus-korupsi-bos-tambang-nikel-pulau-obi-ikut-terseret/>

³ https://bpiw.pu.go.id/uploads/publication/attachment/Buku_1MalukuPapua.pdf

nikel dan pengembangan kawasan industri.⁴ Industri nikel tersebut merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang digerakan oleh PT Trimegah Bangun Persada di bawah Harita Group, dalam rantai produksinya Harita memiliki beberapa anak perusahaan yang berkerja di bawahnya. Anak perusahaan tersebut terbagai menjadi empat sektor diantaranya: Pertambangan, Smelter, Refinery, dan Kawasan Industri.

Potensi cadangan nikel Indonesia dan khusus kepulauan Maluku secara otomatis akan meningkatkan daya konsumsi listrik untuk kebutuhan produksi jangka panjang, laju pertumbuhan industri dengan dorongan hilirisasi seperti industri nikel tentunya harus didukung dengan berbagai infrastruktur penunjang, salah satunya seperti Pembangkit Tenaga listrik yang memiliki peranan penting mendistribusikan listrik selama proses produksinya. Namun dalam proespeknya diharapkan penggunaan energi dapat dilakukan dengan tranformasi penggunaan sumber daya terbarukan, pada Konferensi Tingkat Tinggi Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik yang diselenggarakan pada November 2023. Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa Indonesia akan memulai produksi kendaraan listrik pada tahun 2024, sekaligus menegaskan komitmen Indonesia terhadap sumber daya terbarukan dan pengembangan kawasan industri hijau seluas 30.000 hektar⁵. Proses transisi dilaksanakan dengan mendorong penggunaan Batubara yang tidak ramah lingkungan secara besar-besaran yang diprakarsai oleh Dana Investasi Iklim (CIF) pada april 2021. Dengan bantuan dari Asia Development Bank (ADB) dan World Bank Group (WBG), bidang prioritas yang turut dimasukan ialah industri-industri yang menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Batu bara (PLTU).

Berdasarkan riset *Trand Asia* bersama *Climate Adovacates dan Recourse*, hilirisasi industri nikel di Obi oleh Harita Group, PT Obi Nickel Cobalt, dan Ningbo Lygend., menunjukkan adanya penambahan fasilitas dan kapasitas PLTU Captive. Untuk operasional kawasan industri kebutuhan listrik diperoleh dari generator diesel, sedangkan untuk pabrik pengolahan bijih nikel menggunakan pembangkit listrik batubara yang diperuntukan di masing-masing fasilitas. Seperti pabrik berteknologi HPAL milik PT Halmahera Persada Lygend (HPL) yang dalam tahap I telah dilengkapi dengan PLTU berkapasitas 30 MW untuk memasok listrik, dan tahap II akan dibangun tambahan PLTU berkapasitas 60 MW yang rencananya akan selesai di awal tahun 2023. Selain itu, masih ada total kapasitas 360 MW yang

⁴ <https://trendasia.org/wp-content/uploads/2023/11/bahasa-indonesia-ifc-in-obi-.pdf>

⁵ (Setkab, 2030).

akan dibangun, dalam perencanaannya total kapasitas yang harusnya terpasang untuk smelter ini ditargetkan mencapai 4.200 MW untuk operasional pabriknya.⁶

2. Apa yang ingin diperiksa?

Uraian diatas menunjukkan satu hal, PLTU Captive menjadi instrument penting pada tingkat hulu hilirisasi industry nikel, termasuk yang terjadi di pulau Obi, desa Kawasi. Pelayanan pasar global melalui hilirisasi nikel berbalut transisi energi ini mendorong kami untuk melakukan pemeriksaan terhadap cara kerja dan dampak social-ekologis dari PLTU Captive di Kawasi. Mengapa hal ini perlu diperiksa? Terkait dengan beroperasinya industry hilirisasi nikel di Kawasi telah banyak dilakukan, namun pemeriksaan secara khusus terhadap cara kerja dan dampak PLTU Captive terbiling masih sangat minim. Padahal, PLTU captive merupakan instrument penting dalam hilirisasi dan paling penting operasionalisasinya masih menggunakan batu bara, salah satu mineral yang memiliki kontribusi terhadap krisis planet ini.

Ironi penggunaan objek penghasil krisis untuk mengatasi krisis menggambarkan adanya masalah sejak awal. Selain itu, hilirisasi industry nikel juga telah memberikan krisis social-ekologis yang parah di wilayah periferi di lokasi yang mengandung sumber daya mineral tersebut seperti di pulau Obi ini. Penghancuran skala pulau di periferi untuk melayani dorongan energi bersih di wilayah pusat (kota-kota besar dan negara-negara ‘maju’) di dunia. Pemeriksaan yang kami lakukan ini menggunakan panduan dalam bentuk beberapa pertanyaan penelitian, yakni:

1. Bagaimana Rantai Pasok dan Distribusi PLTU Captive Harita Group Nickel di Pulau Obi?
2. Siapa saja yang terlibat dalam rantai kerja PLTU Captive ini?
3. Bagaimana dampak operasional PLTU Captive terhadap kondisi Sosial-Ekologi di Desa Kawasi?
4. Bagaimana Pola Subsistensi Rantai Pro-sumsi Masyarakat dan Daur Pengetahuan yang Masih Berjalan di Tengah Kepungan Tambang?
5. Apa Peluang dan Potensi Ruang Belajar Masyarakat Lingkar Tambang di Pulau Obi?

⁶ <https://trendasia.org/wp-content/uploads/2023/11/bahasa-indonesia-ifc-in-obi-.pdf>

Dua pertanyaan diatas digunakan untuk melihat ruang belajar Bersama dalam menghadapi dan sekaligus melawan proses kerja industry hilirisasi nikel di pulau Obi. Dalam setiap ruang yang hancur, selalu ada kemungkinan munculnya benih-benih kehidupan yang muncul seperti pandangan Anna Tsing, dkk., tentang “seni hidup di planet yang rusak” (Haraway et al., 2016; Tsing, 2015; Tsing et al., 2019).

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan studi lapangan dan etnografi. Pendekatan pertama digunakan untuk menelusuri berbagai dokumen dan literatur terkait dengan kebijakan PLTU Captive dan studi-studi terdahulu tentang industry hilirisasi nikel. Sementara penggunaan etnografi dimaksudkan untuk memotret secara mikro dengan menggunakan lensa emik situasi industry dan PLTU Captive di pulau Obi dengan menggunakan pandangan orang pertama. Teknik pengumpulan data di lapangan menggunakan dua cara, yakni: pengamatan terlibat dan wawancara mendalam.

Secara keseluruhan proses penelitian ini berjalan selama bulan Juli tahun 2024 sampai dengan bulan Desember 2024. Proses ini dapat dibagi ke dalam tiga tahapan yang dimulai dengan tahapan sdi literatur. Setelah itu, kami, tiga orang Peneliti dari KORA Maluku melakukan kunjungan lapangan di pulau Obi selama beberapa hari. Pada kunjungan lapangan, Lokasi yang kami datangi bukan saja desa Kawasi, tetapi juga beberapa desa disekitar Kawasi. Hal ini untuk melihat secara baik persoalan hilirisasi nikel di pulau Obi karena kami berangkat dari asumsi bahwa pulau kecil seperti Obi memiliki daya dukung ekologis yang sanagat rentan Dimana kehancuran sosial-ekologis di satu titik dapat berdampak pada titik-titik yang lain di pulau tersebut. Cara pemeriksaan seperti ini juga dapat diartikan sebagai penglihat berskala pulau.

Selama berjibaku untuk meraup data lapangan tidak sedikit kesulitan yang dialami, hal itu dikarenakan tingkat sekuritas yang ada di Desa Kawasi sebagai arena konsentrasi industry sangat tinggi. Selain itu, ketika kami mewawancarai beberapa pekerja, sebagian memberi isyarat ketakutan akan namanya disebut sebagai pemberi keterangan. Sikap subjek penelitian lapangan kami menunjukkan bahwa pengawasan dan control Perusahaan terhadap pekerja sangat lah ketat. Kesulitan demikian juga dialami saat pengambilan beberapa dokumentasi, kondisi tersebut adalah hasil dari rekayasa keamanan perusahaan untuk menjamin tidak adanya publikasi buruk berhubungan dengan aktivitas perusahaan. Maka untuk menjamin keamanan

bagi para informan, tim penulis memutuskan untuk menyamarkan nama serta identitas lainnya agar terhindar dari kondisi yang tidak diinginkan. Pada tahap terakhir adalah proses penulisan laporan yang juga diselingi dengan penelusuran dokumen dan literatur untuk melengkapi atau mengkonfirmasi temuan lapangan.

II

PULAU OBI DAN KAWASI SEBELUM ERA EKSTRATIVISME

1. Berulang dan Berkelindannya Cerita tentang Penawanan, Tawanan, dan Tertawan

“Pulau obi ini dulu adalah pulau kosong, torang pu leluhur yang berasal dari TOGALE (Tobelo dan Galela) yang pertama kali temukan tempat ini dan buat kampung di sini, kawasi ini dulu hanya tempat persinggahan orang-orang saja”

(tutur beberapa orang Kawasi yang kami temudi di lapangan).

Berdasarkan tuturan lisan diatas, Kawasi merupakan salah satu desa di pulau Obi yang ditemukan oleh orang-orang suku Tobelo-Galela ketika mereka melakukan pelayaran mencari ikan. Pada periode 1800-an-1900-an Kawasi hanya dijadikan sebagai tempat persinggahan sementara, menurut mereka, dan pulau tersebut masih kosong atau tidak berpenghuni. Baru di awal abad ke-20 beberapa keluarga dari Obi dan Galela membangun pemukiman permanen di wilayah tersebut. Obi merupakan pulau kosong yang tidak dihuni oleh masyarakat. Secara historis, pulau Obi termasuk dalam wilayah penguasaan Kesultanan Bacan.

Cerita tentang pulau Obi yang kosong di abad ke-19 dan baru ditinggali di abad ke-20 mendorong kami untuk melakukan penelusuran historis melalui sumber-sumber sekunder. Dorongan ini muncul dari beberapa pertanyaan, bagaimana mungkin pulau ini kosong, sementara pulau ini berada dekat dengan pusat kesultanan Bacan dan berada di wilayah laut yang strategis dalam dinamika perdagangan di masa lalu. Salah satu cerita yang mengejutkan kami datang dari catatan sejarawan Belanda, Gerrit Knaap. Tulisan Knaap dimuat dalam buku ‘Pirates, Ports, and Coasts in Asia’ yang di editor oleh John Kleinen and Manon Osseweijer. Knaap menyampaikan:

“The sultan of Bacan ... As his petty kingdom was running out of subjects, he needed Papuans or any other folk to populate his country. Piratical raids in the sense of kidnapping might be seen as a means to that end. ... Moreover, he tried to ... abduct about 150 persons from that island, among other purposes, to populate the uninhabited island of Obi belonging to his realm. Eventually, through the mediation of the VOC a portion of the Misoolers were allowed to stay in the area of Bacan on the condition that the sultan of Bacan paid 400 rix dollars to the sultan of Tidore. ... Consequently, during

the seventeenth century Bacan at times tried to claim Misool, thereby denying the authority of Tidore. In 1660 the kapitan laut, the admiral as it were, of Bacan had gone as far as taking away some 200 persons from the village of Hatuwe and selling them in the Moluccas. For this daring but illegal action he was later arrested by VOC Amboina and banished to Batavia.²⁴ In the long run, all the efforts of Bacan to play a role of some significance in the political arena came to nought. After the attempt to populate Obi with "reliable" folk failed, the sultan in 1683 sold his rights to this island to the VOC. ..." (Gerrit Knaap, 2010:154)

Kutipan panjang diatas memberikan informasi penting tentang Obi, pulau ini diklaim oleh kesultanan Bacan dan upaya untuk mengisi penduduk di pulau ini dilakukan Sultan pada abad ke-17 dimana pulau tersebut masih kosong. Upaya menempatkan penduduk dilakukan dengan cara-cara yang disebut Knaap "kidnapping". Penduduk yang ditangkap berasal dari Misool di Raja Ampat dan di waktu yang lain diambil dari pulau Seram bagian utara. Informasi lain yang menarik menurut kami adalah tindakan sultan menjual pulau tersebut ke VOC pada akhir abad ke-17 karena upaya menempatkan penduduk di Obi dianggap gagal. ada berbagai pertanyaan yang tersisa yang masih perlu dilakukan penelusuran lebih lanjut terkait dengan sejarah pemukiman di pulau Obi, misalnya, apakah upaya yang diklaim gagal tersebut dapat diartikan tidak terjadi pemukiman di pulau Obi atau artinya pemukimannya tidak maksimal seperti yang direncanakan. Pertanyaan berikut adalah mengapa VOC mau membeli pulau tersebut jika pulau ini kosong dan tidak berpenghuni?

Masih terkait sejarah Obi, dalam tulisan R. A. Kern yang diedit dan di anotasi ulang oleh Alijah Gordon dalam buku *The Propagation of Islam in The Indonesian-Malay Archipelago*, disebutkan "*The sultan of Bacan controlled the nearby sago-rich islands of the Obi Group...*" (2001: 255). Catatan ini menjadi petunjuk penting sekaligus terlihat alasan yang logis mengapa kepulauan Obi yang kosong dikuasai oleh Sultan Bacan: kepulauan yang kaya akan sago. Terkait dengan informasi penjualan pulau Obi oleh Sultan kepada VOC yang di tulis Knaap, dijelaskan oleh Kern dalam catatan kaki tulisannya bahwa "*The Obi group, i.e. Obilatu or 'small Obi', Gomumu (south of Obi) and Tapat and Bisa (north of Obi) was bought by the VOC in 1682 for a sum of 620 rijksdaalder;*" (2001: 277). Penjelasan ini tidak menyebutkan pulau Obi besar, pulau dimana desa Kawasi berada dan yang saat ini tertawan oleh PLTU Captive, apakah berpenghuni? atau kenapa tidak dijual? hal-hal ini menurut kami membutuhkan penelitian lanjutan yang mendalam.



Gambar 2.1 Kepulauan Obi

Sumber: diolah oleh Tim Penulis dari google map

Catatan lain tentang sejarah kepulauan Obi datang dari Sejarawan Leonard Andaya. Andaya, dalam buku *The World of Maluku*, menulis: “Obi became part of Ternate's periphery in 1667 as a result of the Bungaya treaty, despite the fact that it belonged to the kingdom of Bacan. According to traditions collected by Valentijn, Obi claimed to have had its own rulers in the beginning of the fourteenth century who were no less important than those of the four major Malukan kingdoms. Although it never achieved the status of the four, its royal family regularly intermarried with Ternate's. At some unknown date Obi fell under the control of Bacan. Bacan's severe loss of population, already noted in the sixteenth century, may have led to the transferral of Obi's population to Bacan. By the mid-seventeenth century Obi, Obilatu, Tappa, Large Tawali, and Little Tawali were all uninhabited, though the islands had vast sago forests and the surrounding seas were full of fish.” (1993: 85).

Berdasarkan penelusuran arsip, Andaya menyampaikan bahwa Obi menjadi bagian dari Kesultanan Ternate berdasarkan *Bungaya Treaty* sebagai imbalan keterlibatan kesultanan ini dalam penyerangan kesultanan Goa. Namun ada hal yang menarik dari catatan Andaya, bahwa berdasarkan tulisan Valentijn, orang-orang Obi mengklaim mereka awalnya, di sekitar abad ke-14, memiliki otoritas politik sendiri yang tidak kalah dengan empat kerajaan di bagian utara (Ternate, Tidore, Jailolo dan Bacan). Di periode tertentu, Obi jatuh ke tangan Bacan dan pada abad ke-16 penduduk Bacan berkurang drastis sehingga kemungkinan memicu perpindahan penduduk Obi ke Bacan. Masih menurut catatan diatas, pada pertengahan abad ke-17

kepulauan Obi tidak berpenghuni sementara di sisi yang lain pulau-pulau ini memiliki kekayaan sagu dan ikan yang melimpah.

Cerita tentang kekayaan ikan dan pulau kosong dituturkan juga oleh orang-orang yang mendiami pulau Obi saat ini yang berada di desa Kawasi. Menurut tuturan masyarakat, mereka merupakan orang-orang Suku Tobelo-Galela (Halmahera Utara) yang menempati pulau ini di awal. Mereka terdiri dari empat klan, yakni marga Saroa, Ngale, Joronga dan Siar. Berselang beberapa tahun, tepat sekitar tahun 1912 dan 1913 orang-orang atau leluhur mereka mulai membuat pemukiman sebagai tempat tinggal mereka saat melakukan aktivitas mencari ikan di sekitar pulau, karena kondisi ikan yang sangat banyak dan mudah didapatkan disini. Menurut kepala suku TOGALE di Kawasi, awalnya leluhur mereka bermukim di lokasi yang mereka sebut sebagai ‘kampung tua’ kemudian berpindah ke lokasi yang sekarang ditempati. Saat ditanyakan tentang alasan perpindahan, mereka menyebutkan hal itu disebabkan oleh tingginya potensi ikan di laut yang berada tepat di depan desa Kawasi yang sekarang. Biasanya untuk makan sehari-sehari masyarakat cukup berdiri di bibir pantai (dalam istilah orang kampung disebut sebagai “*buang-buang*”) sudah bisa mendapatkan ikan untuk kebutuhan makan sehari. Kondisi ini berlangsung selama puluhan tahun hingga sekitar tahun 1990-an akhir⁷.

Keberlimpahan ikan di Kawasi telah perlahan-lahan menghilang seiring beroperasinya PLTU-Captive, adanya kavitasasi ekologi pulau Obi. Penawanan membuat kondisi laut berubah dan ikan-ikan pergi seolah tidak ingin ikut ter-tawan bersama. Menghilangnya ikan-ikan seperti pengulangan cerita menghilangnya orang-orang di pulau ini ketika kepulauan Obi tertawan oleh perebutan berbagai otoritas politik di masa lalu, di abad ke-17.

2. Demografi Desa Kawasi

Pulau Obi terletak di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Berbatasan langsung dengan Provinsi Maluku di sebelah selatan dan Provinsi Papua Barat di sebelah timur. Penduduknya secara keseluruhan menetap di pesisir pantai, kondisi demikian disebabkan oleh suku-suku awal yang menetap bermata pencaharian sebagai nelayan dan petani. Akan tetapi terdapat beberapa pemukiman di daerah perbukitan yang merupakan pemukiman pekerja tambang dan pemukiman temporer bagi petani cengkeh yang digunakan saat panen cengkeh.⁸

⁷ Hasil Wawancara Lapangan Dengan Kepala Suku Tobelo-Galela, Agustus 2024

⁸ <https://www.kompas.id/baca/foto/2023/12/02/menjejakkan-kaki-di-obi-surga-nikel-di-maluku-utara>

Luas wilayah pulau Obi mencapai 2.542 Kilometer persegi setara empat kali luas Singapura, Obi terbagi dalam lima kecamatan dan terdapat 34 desa di dalamnya dengan total jumlah penduduk yang tercatat sebesar 52.588 jiwa. Rata-rata penduduk yang mendiami pulau Obi merupakan suku Tobelo-Galela, Ternate, Tidore, dan juga suku buton, bugis dan jawa. Masyarakat Pulau Obi sebagian besar mendapatkan penghasilan dari hasil hutan seperti cengkeh, pala, dan kelapa.⁹

3. Latar Sosial-Ekologi Kawasi

Masyarakat Kawasi yang menjadikan laut sebagai sumber penghidupan keluarga selalu memanfaatkan hutan sebagai sumber utama untuk memenuhi kebutuhan hidup, dalam proses pembuatan sampan/perahu misalnya, kayu yang diambil dari hutan hanya berkisar antara 1 KM jauhnya dari perkampungan, kondisi hutan yang dipenuhi dengan kayu membuat hampir seluruh masyarakat di desa memiliki perahu untuk menangkap ikan. Hal ini berlangsung selama puluhan tahun dan menjadi sumber utama masyarakat dalam memenuhi kebutuhan harian masyarakat.

Hutan yang ada di Kawasi dulunya memang tidak ditanami oleh masyarakat, alasan hutan yang tidak ditanami tanaman perkebunan masyarakat ialah karena jumlah penduduk yang masih sedikit membuat masyarakat hanya menggunakan lahan-lahan sekitar kampung untuk ditanami berbagai jenis kebutuhan pangan. Misalnya untuk kebutuhan makan harian, masyarakat membuat perkebunan di sepanjang lahan pesisir dengan menanam kelapa, sementara pada lahan rawa, masyarakat (zaman dulu) memanfaatkannya untuk menanam pohon sagu sebagai sumber makanan pokok masyarakat.

Selain pada aktivitas perkebunan, hutan juga dimanfaatkan sebagai sumber kebutuhan lain oleh masyarakat. Mulai dari kegiatan mencari kayu bakar, pembuatan perahu dan bahan bangunan serta kebutuhan lainnya seperti pembuatan pagar pekarangan rumah, atau sebagai meja dan kursi yang sepenuhnya digantungkan pada hutan. Selain itu, sumber pangan harian seperti sayur dan buah juga sepenuhnya sangat digantungkan pada hutan.

Aktivitas masyarakat Kawasi dengan alam dalam pemenuhan kebutuhan hidup yang berlangsung telah menjadi satu kesatuan yang hidup dalam keseharian masyarakat. Selain menggantungkan kebutuhan pangan pada hutan, masyarakat Kawasi juga mengandalkan sungai dan mata air disekitar hutan untuk memenuhi kebutuhan mereka, mulai dari minum,

⁹ <https://www.kompas.id/baca/foto/2023/12/02/menjejalkan-kaki-di-obi-surga-nikel-di-maluku-utara>

cuci pakaian hingga kebutuhan lainnya. Sumber air utama berasal dari beberapa sungai yang tersebar di sekitar desa Seperti Sungai Kaca dan Sungai Loji. Kondisi air di dua sungai ini sangat bersih dan jernih hingga bisa dikonsumsi langsung tanpa harus direbus terlebih dahulu.¹⁰

Pada sungai-sungai yang tersebar di sekitar desa ini sejak dulu dijadikan sebagai sumber penghidupan bersama oleh masyarakat. Berbagai aktivitas masyarakat dengan hutan disekitar desa mencerminkan bahwa masyarakat Kawasi sangat menggantungkan hidupnya pada hutan. Segala kebutuhan hidup masyarakat sepenuhnya telah disediakan oleh hutan di sekitar desa.

Dalam keseharian masyarakat, sejak dulu terdapat praktik sosial dalam mengolah dan memanfaatkan hutan, misalnya pada acara perkawinan, masyarakat biasanya berbondong-bondong bepergian ke hutan untuk mengolah sagu sebagai bahan makanan utama masyarakat. Menurut keterangan warga, dulunya Kawasi merupakan salah satu desa dengan hutan sagu terbesar di pulau Obi. Misalnya saat terjadi krisis pada tahun 1980-an, orang-orang dari berbagai desa di pulau Obi ramai-ramai berdatangan ke Desa Kawasi untuk mengambil sagu sebagai bahan makanan mereka, masifnya aktivitas pengelolaan hutan secara bersama ini secara tidak langsung menggambarkan tentang kuatnya hubungan antara manusia dan alam.¹¹

¹⁰ Hasil Wawancara Dengan LM, Agustus 2024

¹¹ Hasil Wawancara Dengan LM, Agustus 2024

III

ERA EKSTRATIVISME DI KAWASI

1. Sejarah Ekonomi Ekstraktif di Pulau Obi dan Kawasi

Industry pertambangan yang saat ini beroperasi bukan-lah yang pertama di Kawasi, periode sebelumnya telah beroperasi beberapa jenis ekonomi ekstratif di wilayah ini. Eksploitasi di bidang kehutanan telah berjalan beberapa puluh tahun lebih dulu Dimana hal ini dilakukan di bawah bendera “peningkatan ekonomi daerah dan kesejahteraan rakyat”. Dan seperti berbagai cerita ekstraksi ekonomi di wilayah lainnya, Masyarakat dan alam Kawasi cenderung dirugikan. Masifnya perambahan hutan dan alam yang diakibatkan oleh berbagai aktifitas industri telah terjadi sejak tiga dekade lalu. Sejak 1980-an, hutan di pulau Obi telah menjadi salah satu tempat nyaman masuknya berbagai industri, mulai dari industri kayu hingga industri pertambangan. Dalam keterangan warga, sejak tahun 1980-an awal, pulau Obi, terkhusus di Desa Kawasi telah banyak perizinan industri yang berdatangan silih berganti hingga tahun 2020-an. Secara umum perubahan kondisi alam yang terjadi di Desa Kawasi tidak terlepas dari berbagai aktivitas industri yang telah ada dan sedang berlangsung.

Nikel di Kawasi sebenarnya telah lama di eksplorasi, menurut keterangan masyarakat, aktivitas eksplorasi ini sudah pernah terjadi sekitar tahun 1940-an awal. Hutannya juga, di periode yang sama telah di eksplorasi oleh orang-orang Jepang yang menjajah Indonesia saat itu. Setelah Jepang mengangkat kakinya dari Indonesia, salah satu perusahaan awal yang memperoleh izin konsesi pertambangan adalah PT. Wanatiara Persada (WP), yang bergerak pada industri Nikel, saat itu PT. WP masih melakukan aktivitas eksplorasi, hasil yang didapatkan masih berbentuk *ore* yang dikirim keluar untuk diolah menjadi bahan jadi, kemudian pada tahun 1995, masuknya Perusahaan PT. ANTAM yang mengantongi izin eksplorasi hutan mencakup berbagai wilayah di pulau Obi, tidak terkecuali pada Desa Kawasi.¹²

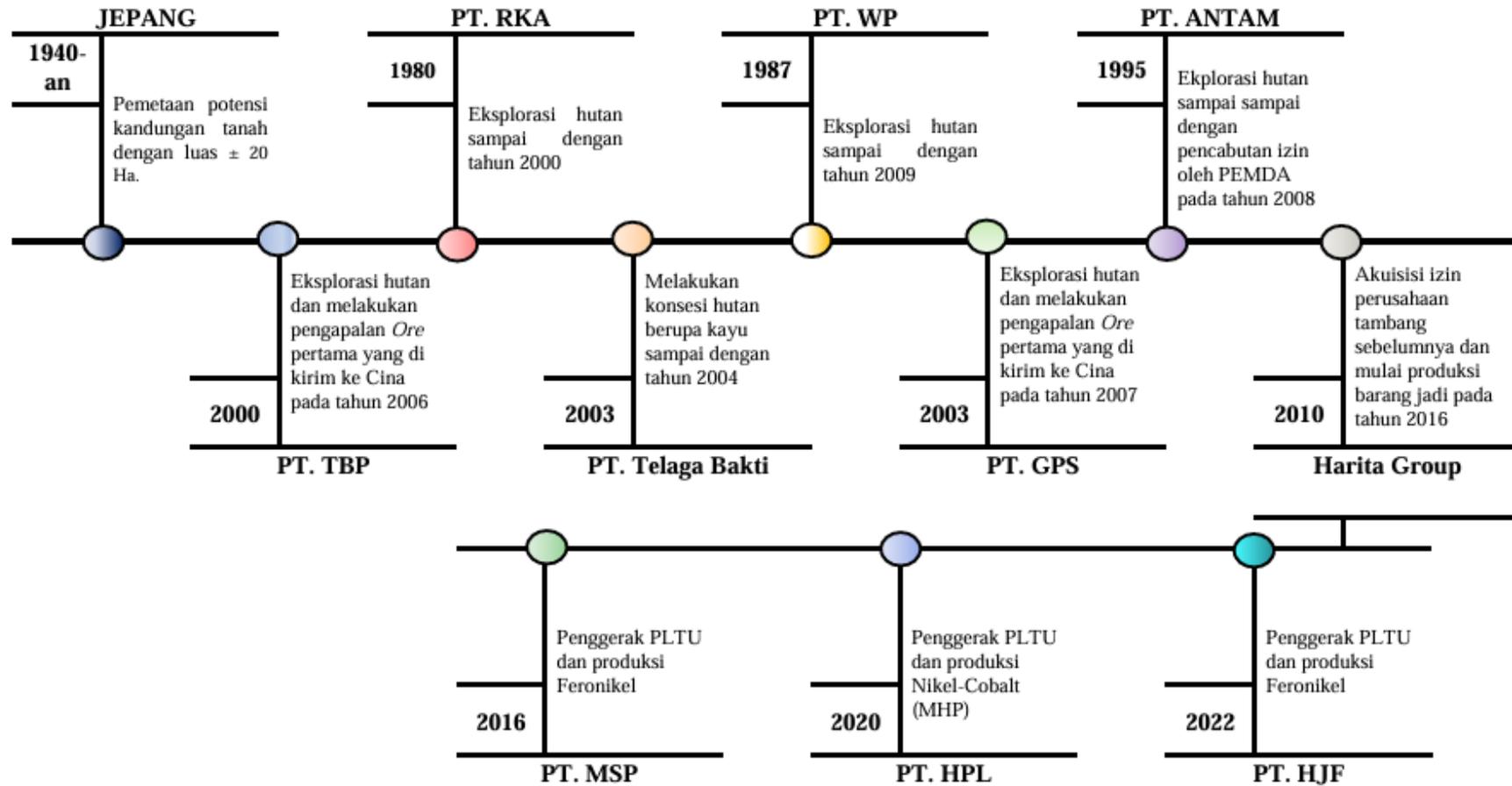
Disamping masifnya aktivitas pertambangan, pada tahun 1999-2000, ketika terjadi konflik sosial di Maluku dan Maluku Utara, PT. ANTAM sempat tidak melakukan aktivitas eksplorasi, hal ini diakibatkan karena para pekerja dan masyarakat yang mengungsikan diri

¹² Hasil Wawancara Dengan TK, Agustus 2024

ketempat yang dirasa aman hingga di tahun 2002, masuklah perusahaan PT. Telaga Bakti yang mendapatkan izin konsesi hutan dengan berfokus pada pemanfaatan hutan kayu. Dalam tuturan warga, aktifitas Perusahaan Telaga Bakti memang tidak lama karena hanya beroperasi sekitar satu tahun dari 2002 sampai 2003 di Kawasi, namun kondisi hutan yang ada saat itu telah mengalami banyak perubahan, dimana pada beberapa tempat di hutan yang banyak di akses oleh masyarakat untuk menebang kayu untuk pembuatan perahu juga telah berkurang dan hampir tidak ada. intensitas izin perusahaan yang masuk di Kawasi terus terjadi hingga diterbitkannya izin PT Harita Group pada tahun 2009 dengan mengakuisisi izin milik PT. Aneka Tambang. Setelah beberapa tahun beroperasi di Pulau Obi yang berpusat di Desa Kawasi hingga pada tahun 2014 setelah adanya larangan ekspor barang mentah, beberapa perusahaan mulai masuk dengan menjadi mitra Harita Group yang menggerakkan PLTU dan produksi barang jadi (Feronikel dan Nikel-Cobalt) di antaranya ialah PT. Mega Surya Pertiwi (MSP) tahun 2016, PT. Halmahera Persada Leygend (HPL) tahun 2020 dan PT. Halmahera Jaya Feronikel (HJF) di tahun 2022 yang beroperasi hingga sekarang.

Rangkaian kegiatan operasi perambahan hasil hutan oleh perusahaan menimbulkan berbagai masalah sosial yang terjadi, mulai dari penggulan hutan, Banjir, kehancuran sungai, penyorobotan lahan, kerusakan laut, dan berbagai masalah lainnya yang muncul dan tengah dialami oleh masyarakat Desa Kawasi. Kondisi ini kian berlangsung terus menerus, tidak luput dari masalah sosial lainnya adalah perubahan ruang perkampungan yang dipenuhi dengan tempat-tempat karaoke yang dijadikan sebagai lokasi prostitusi.

Linimasa Periodesasi Perusahaan di Desa Kawasi Pulau Obi



Gambar 3.1 Linimasa Periodesasi Perusahaan di Desa Kawasi Pulau Obi

2. PLTU Captive dan Gurita Harita Group

Sekitar 30 menit sebelum kapal motor Teratai Prima Satu yang kami tumpangi menuju Kawasi menyandarkan badan kapalnya di dermaga, terlihat menjulang lima cerobong PLTU. Tiga cerobong diantaranya berlokasi di perbukitan dan dua tersisa berada di wilayah pesisir berjarak mungkin tidak lebih 700meter dengan perkampungan warga di kawasi. Sementara di pesisir berbaris crane pengangkut material perusahaan di pelabuhan jeti mulai dari bagian selatan hingga di sisi utara desa, sedangkan lautnya tidak hanya dipenuhi kapal nelayan tetapi juga kehadiran kapal tongkang baik yang sedang melakukan pembokaran di Jeti maupun tengah berlabuh. Semua itu bahkan dengan mudah dapat ditangkap dengan mata telanjang dari lautan sewaktu memasuki kawasan Pelabuhan.



Gambar 3.2
Penampakan Crane Jeti di pesisir laut
Sumber: Dokumentasi lapangan 2024



Gambar 3.3
kondisi penggunaan akibat pertambangan
Sumber: Dokumentasi lapangan 2024

Keberadaan Pelabuhan jeti menjadi penanda aktivitas PLTU berbahan baku batubara masih berlangsung masif di dalam kawasan industri Harita. PLTU lengkap dengan rantai pasok batubara dan fasilitas pendukungnya digerakan oleh tiga perusahaan yaitu: PT. Megah Surya Pertiwi (MSP), PT. Halmahera Persada Legend (HPL) dan PT. Halmahera Jaya Feronikel (HJF). Ketiga perusahaan tersebut merupakan unit bisnis Harita yang bergerak untuk tujuan peleburan nikel atau pengembangan smelter di pulau obi. PT. MSP merupakan perusahaan pertama yang dibangun untuk peleburan nikel. Selanjutnya diikuti dengan PT. HPL dan PT. HJF. Setiap perusahaan memiliki fokus dan target berbeda dalam memproduksi bijih mentah nikel menjadi produk hilir sebagaimana terlihat dalam table yang kami buat dibawah ini:

Tabel 3.1**Perusahaan Penggerak PLTU Captive dan Pasokan Distribusi Batubara**

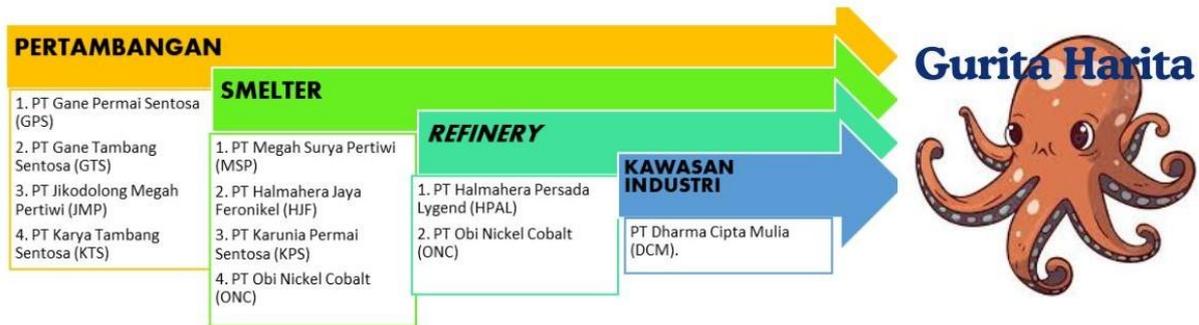
Nama Perusahaan	Tahun produksi	Jenis barang	Kapasitas per minggu	Kapasitas per bulan	Peruntukan	Total Perbulan
PT. MSP	2016	Batubara	-	2-3 kali kedatangan kapal tongkang	PLTU Captive dan pabrik Smelter	-
PT. HPL	2020	Batubara	-	2-3 kali kedatangan kapal tongkang	PLTU Captive dan Pabrik Smelter	-
PT. HJF	2022	Batubara	2 kapal tongkang-satu tongkang berkapasitas rata-rata 60.000-80.000 ton.	8 kapal tongkang	PLTU Captive dan Pabrik Smelter	Mencapai 1.120.000 ton

Sumber: Diolah dari data lapangan 2024

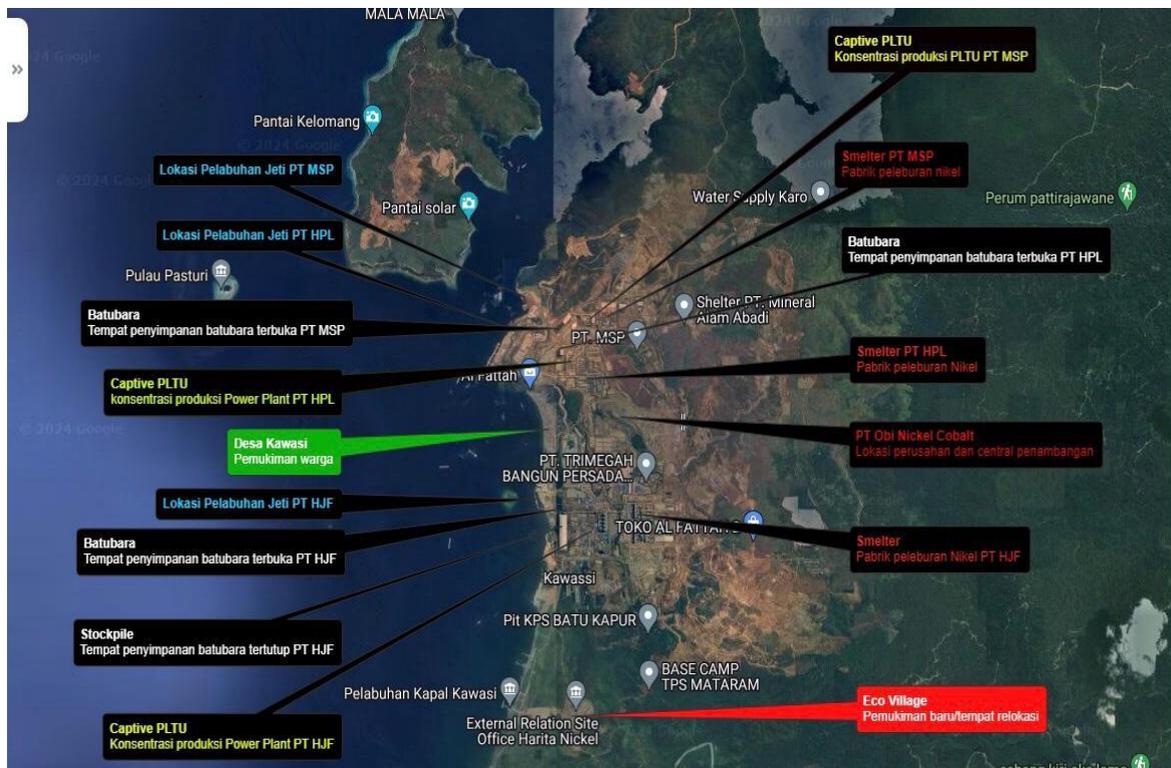
Industri nikel di Kawasi merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang digerakan oleh PT Trimegah Bangun Persada (TBP) di bawah bendera Harita Group. Luas izin tambang nikel di wilayah tersebut mencapai 9.050 ha (91 km²) atau setengah dari Desa kawasi yang memiliki luas 134 km².¹³ Dalam rantai produksinya Harita memiliki sejumlah anak perusahaan

¹³ <https://trendasia.org/wp-content/uploads/2023/11/bahasa-indonesia-ifc-in-obi-.pdf>

yang bekerja di bawahnya, masing-masing perusahaan tersebut terbagi dalam empat sektor diantaranya:¹⁴



Gambar 3.4 Rantai produksi Harita



Gambar 3.5 Sketsa Sebaran Eksploitasi Bisnis Nikel Harita Group

Sumber: diolah dari Scribble Maps

Selain Ketiga perusahaan tersebut ada juga PT. Obi Nickel Kobalt (ONC) dan PT. Kurnia Permai Sentosa (KPS), keduanya direncanakan juga akan turut membangun PLTU untuk menggerakkan smelter di kawasi. Informasi lapangan menyebutkan perusahaan-perusahaan tersebut ada yang bergerak memproduksi Feronikel (Feni), ada juga yang memfokuskan produksi pada mixed hydroxide precipitate (MHP). *“setahu beta MSP itu perusahaan pertama*

¹⁴ <https://tbpnickel.com/id/about-us/subsidiaries/mining>

yang memproduksi feronikel selama ini, dan sekarang feronikel juga diproduksi di HJF., sedangkan untuk produk MHP diproduksi oleh perusahaan HPL”.¹⁵



Gambar 3.6 PLTU Captive di Kawasan Industri

Sumber: Dokumentasi lapangan 2024

3. Perusahaan Peleburan Nikel dan Rantai Pasok PLTU Batubara Captive

a. PT. Megah Surya Pertiwi (MSP)

PT. Megah Surya Pertiwi (MSP) merupakan perusahaan pertama yang dibangun sejak tahun 2016 untuk fokus produksi peleburan nikel, dan berlokasi tepat bersebelahan dengan HPL dan ONC di sisi utara kawasan. Menurut tuturan lapangan PT. MSP memiliki PLTU yang dioperasikan sendiri untuk kebutuhan produksi smelter dan fasilitas di lingkungan produksinya.

Selain lokasi pabrik dan PLTU yang berdekatan, MSP juga memiliki pelabuhan jeti sebagai konsentrasi pembongkaran batubara yang berdekatan dengan HPL di pesisir utara, posisi utara menjadi arena terbuka bagi aktivitas kapal tongkang bongkar muat material kedua perusahaan. Dan karena berdekatan menjadikan keduanya memiliki satu jalur yang sama dalam mendistribusikan material batubara untuk kebutuhan PLTU maupun smelter. Batubara yang didistribusikan keduanya kemudian ditumpukan secara terbuka di sekitaran pabrik produksi (smelter).¹⁶

“Di pesisir ada jeti dengan 4 crane di bagian selatan itu milik PT Halmahera Jaya Feronikel (HJF), sementara dari ujung perkampungan bagian selatan adalah jeti

¹⁵ (Nh, minggu 11 Agustus 2024).

¹⁶ (Ni, minggu 10 Agustus 2024).

*pembongkaran batubara milik PT. Halmahera Persada Legend (HPAL) dengan 5 cranenya, dan persis di sebelahnya adalah jeti PT Megah Surya Pertiwi (MSP) yang memiliki 2 crane”.*¹⁷

Menurut tuturan dalam kurun waktu satu bulan bisa terdapat dua sampai tiga tongkang batubara yang melakukan pembokaran pada jeti milik HPL dan MSP, proses itu berlanjut dengan pengangkutan menggunakan conveyor belt yang sama ke lokasi masing-masing penampungan. Apabila terdapat 2-3 kali dalam satu bulan kedatangan kapal tongkang yang mendistribusikan batubara, artinya tidak sedikit bahan baku batubara yang dibutuhkan untuk mengamankan putaran produksi PLTU setiap saat.

Menurut data PT. MSP memiliki PLTU yang terpasang untuk memasok listrik dengan kapasitas sebesar 114 MW, kapasitas energi Captive tersebut didukung dengan permintaan batubara yang meningkat setiap tahunnya. Lihat saja, pada april 2021 permintaan pasokan batubara mencapai 600.000 MT, dan kemudian meningkat pada kontrak November 2022 menjadi 900.000 MT hingga maret 2023.¹⁸

PT. Megah Surya Pertiwi (MSP) sendiri berfokus pada pengolahan bijih nikel saprolit dan laterit yang disuplai dari penambangan PT Trimegah Bangun Persada TBK (TBP) dan PT Gani Permai Sentosa (GPS). Dalam proses peleburannya menggunakan teknologi *Rotary kiln-Electric Furnace* (RKEF) yang dilakukan dalam empat lini produksi, proses ini menghasilkan produk akhir yakni feronikel dengan total produksi setiap tahunnya mencapai 25.000 ton yang akan memenuhi pasar global.¹⁹

b. PT. Halmahera Persada Lygend (HPL)

PT. Halmahera Persyada Legend (HPL) adalah perusahaan yang bergerak untuk produk *Mixed Nickel-Cobalt Hydroxide precipitate* (MHP), bijih nikel berjenis limonit yang disuplai dari penambangan TBP dan GPS di produksi untuk menghasilkan bahan baku baterai-listrik menggunakan teknologi *High Pressure Acid Leaching* (HPAL). Bijih nikel limonit yang memiliki kadar rendah diolah untuk menghasilkan senyawa nikel-sulfat, untuk total produk akhir MHP (*nickel sulfate - cobalt sulfate*) ditargetkan mencapai 96.000 ton/tahun.²⁰

¹⁷ (Nh, minggu 11 Agustus 2024).

¹⁸ Trimegah Bangun Persada's Prospektus 2022

¹⁹ Trimegah Bangun Persada's Prospektus 2022

²⁰ <https://trendasia.org/bagaimana-dukungan-ifc-untuk-batubara-captive-di-kawasan-industri-nikel-menghancurkan-pulau-obi/>

Proyek HPAL terbagi dalam dua tahap dengan tahap pertama yang telah produksi penuh sejak desember 2021, sementara tahap II baru mulai berjalan pada akhir 2023. Proses peleburan di smelter HPL tahap I telah didukung dengan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU-batubara) berkapasitas 30 MW yang baru beroperasi november 2020, sedangkan tahap II direncanakan akan dilengkapi PLTU dengan kapasitas 60 MW untuk mendistribusikan listrik yang ditargetkan selesai pada tahun 2023 lalu. Namun masih ada total daya 360 MW yang nantinya akan dibangun sebab total kapasitas yang seharusnya terpasang untuk menopang pabrik pengolahan mencapai target 4.200 MW, dan proyek HPL tahap I dan II diharapkan menjadi pabrik sulfat pertama yang terintegrasi secara vertikal di indonesia.²¹

PT. Halmahera Persada Leygend (HPL) memiliki konsentrasi produksi dengan pendirian PLTU Captive tidak jauh dari rumah warga di sisi utara, di satu waktu ketika berada di kawasi muncul gumpalan asap yang mengepul ke udara dalam jumlah besar seperti adanya kebakaran. Dengan rasa penasaran akhirnya mulai berjalan mendekati dan ternyata adalah gumpalan asap pembakaran dari proses produksi smelter, tidak lebih dari 10 menit asap tersebut telah membentuk gumpalan raksasa dan bertebaran di atas perkampungan. Namun fenomena ini terkesan biasa saja bagi masyarakat yang berlalu lalang bahkan tidak ada yang menghiraukan seperti sudah terbiasa, padahal dari halaman mesjid saja tampak jelas bangunan pabrik, aktivitas kendaran proyek bahkan tulisan “HPAL” jelas di batang cerobong PLTU-nya.



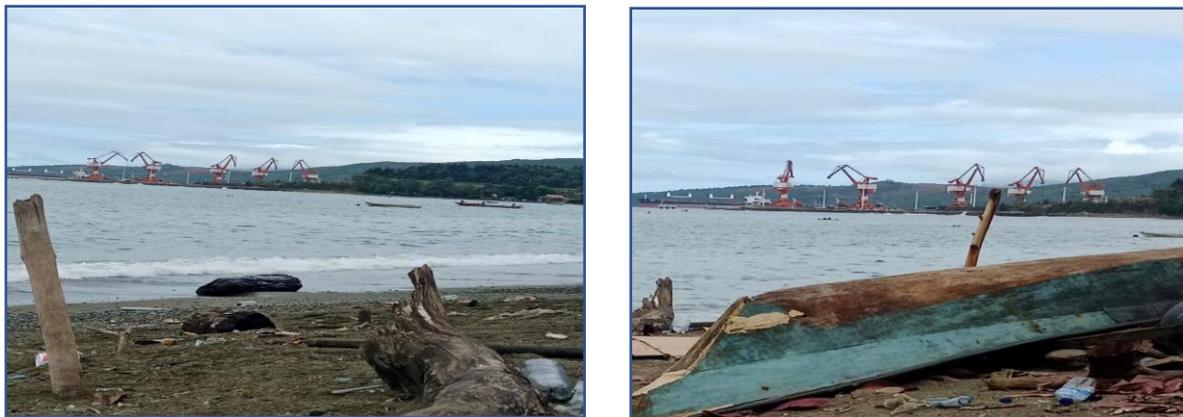
Gambar 3.7 Lokasi PLTU Captive HPL dan Konsentrasi pabrik HPL di atas perkampungan

Sumber: Dokumentasi lapangan 2024

²¹ Trimegah Bangun Persada's Prospektus 2022

Sedangkan kurang lebih 600 meter dari jarak pemukiman warga di bagian utara adalah jeti pembongkaran batubaranya HPL dengan fasilitas 5 crane yang berjejer, sedangkan di sisi kanannya berdiri 2 crane di atas jeti milik MSP.²² Pernyataan tersebut terkonfirmasi dalam temuan lapangan ketika berada di pesisir pantai kawasi, keberadaan pelabuhan jeti HPL dengan fasilitas crane jelas sekali terlihat, bahkan mungkin jaraknya tidak mencukupi 600 meter dari penampakan crane berwarna merah yang menjulang tinggi.

Seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa MSP dan HPL memiliki lokasi yang berdampingan di pesisir utara, sehingga keduanya mempunyai satu rute yang sama dalam mendistribusikan material batubara untuk kebutuhan PLTU. Dari cerita lapangan dalam kurun waktu satu bulan bisa terdapat 2-3 tongkang batubara yang melakukan pembokaran pada jeti milik HPL, dan dilakukan pengangkutan menggunakan conveyor belt yang juga digunakan MSP ke lokasi penampungan.



Gambar 3.8 Pelabuhan Jeti HPL di pesisir pantai selatan kawasi

Sumber: Dokumentasi lapangan 2024

Di sisi lain, berdekatan dengan pelabuhan jeti juga berlabuh kapal-kapal nelayan dengan aktivitas melautnya, perahu para nelayan saling berdampingan dengan kapal tongkang yang sedang berlabuh atau memarkirkan kapalnya ditengah lautan, sepertinya sejak kehadiran tambang nikel di Obi fenomena inilah yang harus ditanggung pelaut lokal kawasi dalam keseharian melautnya. Sedangkan untuk tempat penyimpanan batubara milik HPL sama sekali tidak memiliki ruang tertutup, semua material batubara hanya ditumpukan di ruang terbuka

²² (Nh, minggu 11 Agustus 2024)

dekat dengan lokasi pembakaran smelter yang artinya juga merupakan lingkungan dari aktivitas keseharian para pekerja.

Terdapat keterangan lapangan yang juga menyebutkan selain peruntukan PLTU batubara Captive untuk kebutuhan pembakaran di smelter milik HPL, sebagian daya juga didistribusikan kepada PT. Obi Nickel Kobalt (ONC). “ONC sendiri merupakan perusahaan yang terhitung baru untuk produksi *Nickel-Cobalt* dan memulai operasinya sejak satu tahun lalu, untuk kebutuhan listrik ONC belum memiliki PLTU sendiri sehingga masih menggantungkan energi listrik dari Power Plan milik PT. Halmahera Persada Leygend (HPL)”²³

Menurut sumber lain, PT. Obi Nickel Kobalt (ONC) sendiri merupakan entitas perseroan yang akan mengembangkan produksi dengan teknologi *High Pressure Acid Leaching* (HPAL) tahap III, artinya ini menjadi tahapan lanjutan dari PT HPL yang sedang menjalankan produksi tahap II dengan teknologi HPAL. ONC direncanakan akan memiliki tiga lini produksi senyawa *Nickel-Cobalt* dengan target produksi mencapai 65.000 ton per tahun termasuk 7.500ton kobalt, Pabrik peleburan bijih nikel juga akan turut difasilitasi dengan PLTU berkapasitas 4x380 MW yang sekarang statusnya masih dalam tahap pengajuan ijin.²⁴



Gambar 3.9 Hasil Produksi *Nickel-Cobalt* (MHP)

Sumber: Dokumentasi lapangan 2024

²³ (Nh, minggu 11 Agustus 2024).

²⁴ https://www.gem.wiki/PT_Halmahera_Persada_Lygend_Nickel_Smelter_power_station

c. PT. Halmahera Jaya Feronikel (HJF)

Sementara PT. Halmahera Jaya Feronikel (HJF), keberadaan PLTU Captive lengkap dengan pelabuhan jeti dan tempat penampungan batubara berlokasi di bagian selatan Desa kawasi. Apabila menuju pemukiman warga dari arah selatan, lokasi pelabuhan Jeti milik HJF terletak di tepi barat dengan kelengkapan crane pengangkut batu baranya. Bersebelahan dengan itu juga terdapat pelabuhan jeti dengan crane bertuliskan “OST” sepertinya milik PT. Obi Sinar Timur (OST).



Gambar 3.10 PLTU *Captive* PT HJF

Sumber: Dokumentasi lapangan 2024

Menurut penjelasan kedua jeti yaitu HJF dan OST direncanakan akan disambungkan menjadi satu pelabuhan Jeti, pernyataan akan disambungkan kedua jeti tersebut mungkin benar adanya, sewaktu menyebrangi kawasi menuju Desa Wayalowar menggunakan Longboat tampak kedua jembatan jeti lengkap dengan crane pengangkut bertuliskan “HJF” juga “OST” dalam proses pengerjaan dan kedua ujungnya saling berhadapan dari arah berlawanan seperti hendak di sambungkan.²⁵

PT. HJF sendiri selain difasilitasi dengan tempat penampungan batubara secara tertutup terdapat juga sebagian besar batubara yang ditumpuk secara bebas di ruang terbuka, selain itu terbentang mesin conveyer seperti jembatan gantung yang melintang di udara melintasi jalan

²⁵ Hasil Wawancara Lapangan Dengan MT, Agustus 2024

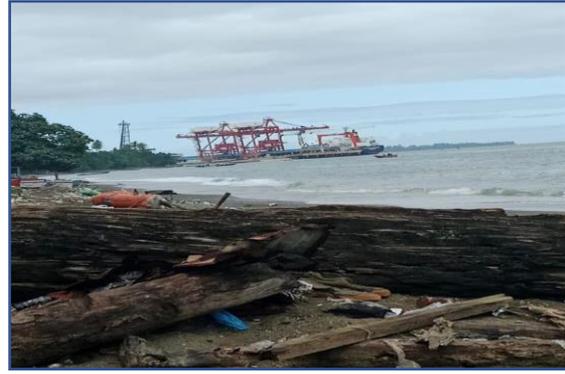
raya, perkebunan kelapa dan terhubung hingga ke pelabuhan jeti. Dari lokasi penyimpanan batubara sebelah kanannya merupakan pusat pembangkit listrik atau Power Plan miliknya, jarak dari tempat penampungan batubara ke PLTU berkisar mungkin hanya 600meter saja. Dan kesemuanya bersebelahan dengan pemukiman warga yang berjarak tidak lebih dari 700 meter di sisi utara.

Sama halnya PLTU Captive HPAL dan MSP. PT. Halmahera Jaya Feronikel (HJF), dalam produksi PLTU captive untuk pasokan batubara dilengkapi dengan Pelabuhan jeti beserta 2 crane pengangkutnya dan 2 lagi dalam tahap pengerjaan, dari pesisir pantai berjarak 300meter terlihat satu kapal tongkang yang menyandarkan badan kapalnya ke Pelabuhan jeti. Kemudian crane pengangkut melakukan tugas untuk pembongkaran, jepitan crane serupa cangkang kepiting berukuran raksasa. Cangkang tersebut mengayunkan cengkramannya pada tongkang kemudian memindahkan batubara ke daratan, selanjutnya batubara tersebut akan dipindahkan ke lokasi penampungan yang berjarak 500meter ke arah timur.

*“katong bongkar batubara dari kapal tongkang masih tengelam karena beban batubara sampai kapal timbul ulang, kapal tongkang itu punya 5 kotak bagian penyimpanan dan setiap minggu 2 sampai 3 tongkang batubara masuk ke pelabuhan jeti. Jadi katong karja capat biar selesai karena takut besoknya tongkang masuk lagi. Kalau ada tongkang baru masuk dan di jeti masih pembongkaran biasanya dia berlabuh di laut dulu, jadi biar capat selesai supaya tongkang satu keluar dan satu lagi masuk kadang katong karja lembur sampe tengah malam”.*²⁶

Keterangan di atas menunjukkan kedatangan batubara untuk kebutuhan PLTU milik PT HJF berlangsung hampir setiap harinya. Bayangkan jika dalam kurun waktu satu minggu terdapat dua sampai tiga kapal tongkang yang melakukan pembongkaran, belum lagi untuk satu kapal tongkang proses pembongkaran dan pengangkutan bisa berlangsung selama dua hari mulai dari pagi hingga malam. Maka jika terdapat 2-3 kapal tongkang untuk dapat menyelesaikan proses bongkar-muat batubara di butuhkan 6 hari waktu kerja, tentunya sangat beresiko bagi pekerja yang harus bertahan dari pagi hingga malam dalam rentan waktu satu minggu.

²⁶ Hasil Wawancara Lapangan Dengan MT. Agustus 2024



Gambar 3.11 Pembongkaran Batubara di Jeti HJF dan Pelabuhan jeti HJF di pantai utara kawasi

Sumber: Dokumentasi lapangan 2024

Diperkuat keterangan lain, memang untuk PT (HJF) dalam waktu satu bulan dapat mendatangkan 8 kapal tongkang batubara yang masuk di Pelabuhan jetinya. Kedatangan tongkang telah menjadi rutinitas setiap bulannya bahkan sebagian tongkang harus memilih berlabuh penuh lautan karena menunggu yang lainnya selesai dengan pembongkaran, untuk ukuran setiap tongkang kapasitasnya dapat mencapai hingga ribuan ton batubara. *“kalau satu kapal tongkang muatan tidak banyak atau tidak terisi penuh itu bisa 60.000 ton, sementara kalau banyak sampai kapal terisi penuh itu bisa mencapai 80.000 ton.”*²⁷

Jika merujuk pada laporan TBP Prospektus 2022, PLTU batubara milik HJF untuk tahap I dilengkapi dengan kapasitas 2x150 MW dengan penggunaan teknologi *Circulating Fluidized bed Power Plant*, kebutuhan batubara untuk pembangkit listrik captive tersebut sebanyak 1.065.500 MT sampai desember 2023. Namun pada tahap II masih ada perencanaan pendirian satu pembangkit listrik lainnya dengan penambahan kapasitas sebesar 4x150 MW, dengan begitu secara otomatis akan terjadi peningkatan kebutuhan bahan baku batubara di kemudian hari.²⁸

²⁷ (Nh dkk, Agustus 2024).

²⁸ Trimegah Bangun Persada's Prospektus 2022



Gambar 3.12 PLTU HJF dalam tahap konstruksi

Sumber: Dokumentasi lapangan 2024

Keseluruhan Batubara tersebut kemudian dimuat menggunakan konveyor dari pelabuhan jeti menuju tempat penyimpanan atau stockpile, yaitu tempat penyimpanan sementara batubara yang digunakan sebagai transit antara pengirim dan produksi batubara. Stockpile milik HJF berbentuk serupa kubah tertutup berwarna putih, panjangnya kurang lebih 5 kali ukuran lapangan sepakbola dan lebar 1 kali lapangan sepakbola serta dilingkari tali baja di setiap sudutnya.

Namun dengan kapasitas penyimpanan tersebut apakah cukup untuk menampung keseluruhan batubara yang didatangkan? sepertinya tidak demikian. Menurut keterangan di lapangan, selain stockpile sebagai tempat penyimpanan tertutup, tidak sedikit batubara yang ditumpukan di ruang terbuka sehingga membentuk gunung-gunung kecil setinggi ukuran tiang kabel listrik. Tempat tersebut hanya berjarak 50 meter saja dari pemukiman dan berhadapan langsung dengan rumah warga, warung makan, jalan desa, dan yang paling berdekatan ialah bangunan Sekolah Dasar.²⁹

²⁹ (Mm, Sabtu 10 Agustus 2024).



Gambar 3.13

Conveyor Belt atau jembatan pengangkut batubara tertutup



Gambar 3.14

Stockpile/tempat penampungan batubara

Sumber: Dokumentasi lapangan 2024

PT. Halmahera Jaya Feronikel (HJF) menduduki lahan di Desa Kawasi seluas 118 hektar, luas itu mencakup keberadaan PLTU maupun pabrik peleburan smelter. Total kapasitas energi captive telah disuplai untuk kebutuhan pengolahan nikel jenis saprolit dengan bijih mentah didapatkan dari penambangan TBP. Serupa dengan MSP, HJF juga menghasilkan produk hilir berupa Feronikel dengan teknologi *Rotary Kiln-Electric Furnace* (RKEF), untuk tahap pertama produksi feronikel ditargetkan mencapai 95.000 ton per-tahun melalui delapan lini produksi dan tahap II dengan 12 lini produksi target kapasitas produksi akan mencapai 185.000 ton per tahun pada pengoperasian penuh di tahun 2025.³⁰

Selain itu PT. Kurnia Permai Sentosa (KPS), yang dikatakan sebelumnya sebagai salah satu perusahaan yang hendak bergerak mengembangkan smelter juga memiliki lokasi yang berdekatan dengan HJF, namu KPS masih dalam tahapan pengerjaan berbagai pabrik juga instrumen pendukung lainnya dan belum secara penuh menggerakkan smelter. Keadaan itu juga menjadikan keberadaan PLTU dengan fasilitas jeti maupun tempat penyimpanan bahan baku batubara masih dalam tahap pengerjaan.³¹ Dalam profil company perusahaan juga menyebutkan KPS merupakan perusahaan pengembangan smelter yang masih dalam tahap konstruksi, dalam perencanaan KPS akan dilengkapi dengan 12 lini produksi dengan fasilitas teknologi *Rotary Kiln-Electric Furnace* (RKEF).³²

Ketiga PLTU Captive tersebut peruntukan distribusi listriknya difokuskan untuk kebutuhan produksi di tiap-tiap smelter peleburan, hanya saja selama 8 hari berada di kawasi

³⁰ Trimegah Bangun Persada's Prospektus 2022

³¹ (Nh, minggu 11 Agustus 2024).

³² <https://tbpnickel.com/id/about-us/subsidiaries/smelter>

ketiga cerobong PLTU sama sekali tidak mengeluarkan asap dari cerobongnya. Namun ada keterangan yang menyebutkan bahwa asap dari cerobong PLTU HJF bisa 3-4 kali mengeluarkan asap dalam satu bulan, sementara untuk MSP dan HPAL hanya 1-2 kali saja untuk hitungan satu bulan.

Fenomena tersebut mungkin berhubungan dengan teknologi yang digunakan atau semacamnya sehingga menyebabkan asap/uap yang dihasilkan sama sekali tidak terlihat atau dikeluarkan hanya pada waktu tertentu saja, tetapi yang pasti produksi PLTU terus berjalan untuk menyalurkan listriknya di tiap-tiap smelter MSP, HPL maupun HJF. Menurut penjelasan karyawan pernah terjadi kerusakan pada PLTU yang dioperasikan PT HJF menyebabkan terhentinya proses produksi pada smelter, namun tidak lebih dari satu jam semua teknisi sudah dikerahkan langsung oleh pihak manajemen untuk secepatnya melakukan perbaikan.

Namun yang patut menjadi perhatian berikutnya ialah keberadaan PLTU batubara Captive baik yang sedang beroperasi maupun dalam tahapan perencanaan, kesemuanya memberi sinyal kuat kedepan bagaimana masifnya penggunaan bahan baku batubara di masa akan datang. KPMG International menilai alasan kunci dibalik penggunaan PLTU Captive dan tiga faktor utama yang mempengaruhi badan usaha untuk terus menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Batu bara (CFPP) adalah;³³

- a. Persyaratan untuk pasokan listrik yang stabil
- b. Kesiapan koneksi jaringan PLN
- c. Kesesuaian pembangunan CFPP sebelum tahun 2018-2019

Alasan di atas sekan menemukan penguatnya dengan kenyataan cadangan batubara di Indonesia yang masih sangat melimpah dan memungkinkan penggunaannya memaksimalkan operasi PLTU batubara di tahun-tahun mendatang. Indonesia juga telah memberlakukan Rezim Domestic Market Obligation (DMO) di mana perusahaan pertambangan batubara harus menjual 25% dari hasil produksinya di dalam negeri sebagai langkah menjaga pasokan batubara, DMO dilakukan berdasarkan UU No 3/2020 yang mengamanatkan penggunaan batubara untuk kepentingan dalam negeri. Dan PP No. 79/2014 tentang kebijakan energi

³³ https://www.adb.org/sites/default/files/project-documents/55124/55124-001-tacr-en_1.pdf

nasional mengamanatkan pengutamakan batubara sebagai sumber energi dan jaminan pasokan batubara domestik.³⁴

Dalam peruntukannya sebagian besar produksi batubara tersebut digunakan untuk kebutuhan bahan bakar PLTU, seperti yang terjadi di tahun 2019 dimana 48% batubara dalam negeri dimanfaatkan untuk PLTU sebesar 67,01 juta ton.³⁵ Tentunya permintaan bahan baku batubara tersebut akan semakin meningkat setiap tahunnya, mengingat pesatnya pertumbuhan bisnis ekstraktif seperti proyek Hilirisasi Nikel yang menggantungkan proses produksinya terhadap pasokan listrik yang stabil.

Semua kapal tongkang yang digerakan untuk mendatangkan material batubara demi kebutuhan PLTU di kawasan Industri berasal dari kalimantan, pernyataan ini didapatkan dari cerita bersama warga maupun para pekerja. Kalimantan yang menjadi sumber pemasok batubara ke harita menjadi cerita lumrah atau yang sering dituturkan di lingkungan produksi apalagi sesama pekerja dari divisi Power Plant. Pernyataan ini tentu benar adanya, batubara yang berasal dari kalimantan dipasok melalui perusahaan afiliasi PT Pesona Khatulistiwa Nusantara (PKN), dan tidak adanya penurunan permintaan justru sebaliknya terjadi peningkatan kapasitas untuk setiap tahunnya.³⁶

PT Pesona Khatulistiwa Nusantara (PKN) merupakan perusahaan pertambangan batubara di Kalimantan Utara yang di kontrak untuk jadi pemasok batubara eksklusif ke kawasan Industri Harita Group. PKN sendiri adalah perusahaan yang terafiliasi dengan Hasta Panca Mandiri Utama yang terkoneksi bisnis dengan PT Harita Jaya Raya (induk TBP), dan Donald J Hemanus sebagai direktur di PKN sekaligus menjabat sebagai komisaris utama di PT Trimegah Bangun Persada TBK (TBP).³⁷

Secara luas terdapat dua jenis batubara yang sering digunakan dengan kualitas berbeda di Indonesia, yaitu kualitas menengah yang berada di Kalimantan Timur, dan batubara kualitas rendah di Sumatera bagian Tengah dan selatan. Cadangan batubara di Indonesia terdiri dari cadangan batu bara permukaan yang ada pada kedalaman 0-100 meter, dan cadangan batubara bawah permukaan berada pada kedalaman lebih dari 100 m yang keduanya terkonsentrasi di

³⁴ <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/semester-i-2022-realisisasi-batubara-untuk-kelistrikan-capai-7294-juta-ton>

³⁵ <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/semester-i-2022-realisisasi-batubara-untuk-kelistrikan-capai-7294-juta-ton>

³⁶ Trimegah Bangun Persada's Prospektus 2022

³⁷ <https://www.mongabay.co.id/2023/11/10/kala-kawasan-industri-nikel-pulau-obi-bertumpu-pada-energi-batubara-2/>

daerah Sumatera dan Kalimantan. Hingga tahun 2020 sumber daya batubara permukaan mencapai 143,43 miliar ton, dan total cadangannya sebesar 38,80 miliar ton. Sementara untuk cadangan batubara bawah permukaan umumnya belum di tambang, sumber dayanya sebesar 43,533 miliar ton dengan total cadangan sebesar 173,52 juta ton.³⁸

4. Jejaring Ekonomi Ekstraktif

a. Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan

Keberadaan tambang nikel yang dioperasikan oleh Harita Group di desa Kawasi membuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Halmahera Selatan meningkat drastis menurut klaim pemerintah. Hal tersebut mengokohkan Pemkab Halmahera Selatan sebagai salah satu kabupaten dengan PAD paling tinggi di Indonesia. Sebagaimana yang tercatat oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku Utara sejak tahun 2017, PAD Pemkab Halmahera Selatan sebesar 1,162 triliun meningkat pada tahun 2018 sebesar 1,333 triliun dan peningkatan drastis terjadi pada tahun 2023 sebesar 2,062 Triliun. Diperkirakan peningkatan akan lebih tinggi lagi pada tahun ini, mengingat ada pelbagai peningkatan teknologi pada sektor pertambangan dan pabrik produksi khusus nikel dan beberapa izin usaha pertambangan (IUP) yang baru saja dikeluarkan oleh pemerintah pusat untuk beberapa perusahaan yang akan eksplorasi dibidang yang lainnya seperti Emas, Marmer, Timah, Zeng, Migas dan lain sebagainya.³⁹

Penyerapan tenaga kerja pastinya akan terjadi besar-besaran untuk mengurangi tingkat pengangguran dan memperbaiki taraf ekonomi rumah tangga masyarakat Halmahera Selatan khususnya. Tentu saja grafik pemerintah dengan segala ukuran kesejahteraan melalui angka matematisnya mengindahkan hajat hidup masyarakat yang berhadapan langsung dengan ganasnya tambang yang merenggut secara paksa ruang penghidupan mereka. Yang paling terdampak dari ganasnya tambang ialah masyarakat desa Kawasi dan beberapa desa yang berdekatan seperti Desa Soligi dan Desa Wayaloar yang lebih ke selatan pulau Obi.

Masyarakat desa Kawasi adalah korban dari kebijakan pemerintah juga libido kesejahteraan serta kejar target sebagai kabupaten paling kaya se-Indonesia yang diukur dengan berbagai grafik matematis tersebut. Demi cit-cita kesejahteraan versi pemerintah tersebut segala kebijakan pemerintah daerah sepenuhnya mendukung proyek strategis negara

³⁸ <https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-buku-road-map-pengembangan-dan-pemanfaatan-batubara.pdf>

³⁹ BPS Maluku Utara

(PSN) serta melanggengkan rencana tata-ruang PT Harita Group yang menjadi mitra serta pemberi PAD paling besar terhadap daerah. Pemerintah Kabupaten serta DPRD Halmahera Selatan mengeluarkan Peraturan Daerah (PERDA) Tentang Relokasi yang melahirkan satu Petunjuk Teknis (JUKNIS) khusus untuk relokasi masyarakat desa Kawasi dari Kampung mereka ke pemukiman baru yang diberi nama “Eco Village”.

Meskipun telah disahkan JUKNIS oleh pemerintah kabupaten tentang relokasi namun beberapa warga masyarakat tetap pada pendirian mereka untuk tetap menolak dengan cara tidak pindah ke eco village dan mempertahankan hak mereka atas tanah dan tempat tinggal yang telah lama ditempati dan menjejaskan serta menjadi tumpuan dari akar budaya juga identitas mereka. Hal tersebut dilakukan karena JUKNIS tersebut belum disosialisasi secara terbuka kepada masyarakat dan disahkan tanpa melibatkan masyarakat yang merupakan objek utama lahirnya JUKNIS tersebut.

Sekitar 10 poin usulan masyarakat kawasi kepada pemerintah daerah sebagai tuntutan atas hak-hak mereka atas akses terhadap tanah serta jaminan sosial dan juga ekebutuhan ekonomi mereka agar kiranya dimuat dan di sah-kan dalam JUKNIS yang diterbitkan pada 2023 lalu. Namun dari 10 poin tersebut, hanya 5 poin yang diakomodir dalam JUKNIS, sementara 5 poin lainnya tidak dimuat. Padahal dari 10 poin tuntutan itu, 5 poin yang tidak diakomodir itulah yang sangat urgensi dan penting untuk masyarakat kawasi.

Lima poin yang tidak dimuat dalam JUKNIS antara lain:

- Setiap Kepala Keluarga harus diberikan jaminan akses terhadap tanah minimal dua hektar dan harus berdekatan dengan tempat tinggal yang baru
- Tunjangan minimal untuk setiap Kepala Keluarga delapan juta rupiah setiap bulannya sesuai upah karyawan
- Tunjangan kesehatan gratis untuk setiap jiwa dan juga kebutuhan listrik rumah tangga 24 jam.
- Tunjangan Pendidikan berupa beasiswa di tingkat perguruan tinggi dari S1-S3
- pemenuhan sarana dan prasarana berupa teknologi produksi jenis terbaru kepada setiap kepala keluarga sesuai jenis mata pencahariannya

Namun lima poin ini tidak dimuat dan diakomodir dalam isi JUKNIS tersebut, hal inilah menambah semangat penolakan terhadap kebijakan relokasi tersebut.

b. Peran Pemerintah Desa

Pemerintah Desa beserta jajarannya baik Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan juga lembaga kepemudaan semuanya merupakan mitra baik perusahaan. Hal tersebut dapat tergambarkan dengan jelas dari sikap pemerintahan desa Kawasi yang mendukung penuh segala bentuk kemaun perusahaan. Berawal pada keputusan pemerintah pusat dan daerah dengan pengeluaran izin operasi pertambangan (IUP) pada 2009 kepada PT Harita Group untuk beroperasi di wilayah Desa Kawasi mendapat sambutan hangat oleh pemerintah desa, bahkan pemerintah desa kawasi sangat antusias terlibat dalam proses-proses pembicaraan atau sosialisasi kepada masyarakat tentang kedatangan perusahaan yang akan membawa dampak baik bagi perkembangan ekonomi masyarakat Kawasi.

Bukan saja terlibat aktif dalam sosialisasi kedatangan perusahaan namun proses pembebasan lahan untuk infratraktur perusahaan atau ekspansi perluasan lahan operasi produksi semuanya diberikan tanggung jawab kepada pemerintah desa oleh pihak perusahaan. Pihak pemerintah desa kawasi bertanggungjawab atas penunjukan dan penetapan lokasi perkampungan baru serta negosiasi untuk pelepasan lahan dengan masyarakat.

Tentu saja keterlibatan pihak pemerintah desa bukan semata-mata tunduk terhadap keputusan negara atau melakukan perannya secara gratis, sebab setelah melakukan berbagai peran mereka, beberapa oknum pemerintah desa mendapatkan insentif dari perusahaan baik uang cash maupun berbagai macam fasilitas usaha yang izin serta pajaknya ditanggung oleh perusahaan.

beban pajak usahaPemilik lokalisasi dan fasilitas prostitusi paling banyak ialah pengusaha Cina, oknum pemerintah desa dan beberapa warga yang menyediakan usaha jasa PSK di rumah mereka. Pemerintah daerah serta DPRD kabupaten Halmahera Selatan mendukung penuh melalui kebijakan atau perda agar secepat mungkin masyarakat Desa Kawasi direlokasi.

c. TNI dan POLRI

Setiap proyek strategis nasional sudah tentu mendapat legitimasi serta dukungan keamanan untuk keberlangsungannya baik dari tahapan izin eksplorasi sampai produksinya. Demikian yang terjadi juga pada PT Harita Group yang beroperasi di Pulau Obi yang mendapatkan dari negara berupa pengawalan keamanan terhadap operasi produknya di pulau Obi, tepatnya di Desa Kawasi. Distribusi keamanan yang begitu besar hingga hampir sebanding

dengan penduduk masyarakat Desa Kawasi atau lebih banyak dari masyarakat Desa Kawasi yang masih menetap di Desa Kawasi. Sebagian sumber daya manusia yang ada di desa kawasi hari ini adalah personel TNI dan POLRI dari berbagai satuan baik Angkatan Darat, Angkatan Laut, Brimob dan juga Polisi Sabara yang disediakan tempat tinggal atau barak permanen dan juga beberapa pos penjagaan di pintu masuk perusahaan oleh pihak Perusahaan.

Terdapat 17 pos penjagaan dan 1 pos induk atau sering disebut *Pos Merah*. Komposisi Pos penjagaannya terdiri dari 12 pos TNI AD, 1 pos TNI AL, 3 pos Brimob dan 1 pos Polisi Sabara yang mengelilingi lokasi perusahaan diberbagai sudut, setiap pos penjagaan dijaga secara bergantian oleh personel TNI dan POLRI paling kurang 4-5 orang setiap harinya.

Selain bertugas sebagai keamanan, anggota TNI maupun POLRI juga banyak yang bekerja sebagai karyawan dalam perusahaan dan menempati beberapa posisi seperti Formen, Admin, CSR, Security bahkan Clining Service.

Tabel 3.2
Barak TNI dan POLRI di area Perusahaan

Institusi	Nama satuan	Jumlah barak yang telah di tempati	Jumlah kamar per barak	Kapasitas kamar
TNI	Angkatan Darat (AD)	3 buah	40 kamar	4 sampai 6 orang
	Angkatan Laut (AL)	1 buah	10 kamar	1 samai 3 orang
POLRI	Polisi Sabara	2 buah	30 kamar	4 sampai 6 orang
	Brimob	2 buah (<i>belum ditempati</i>)	40 kamar	6 orang

Sumber: Data Lapangan 2024

d. Bisnis Pejabat Daerah dan Jaringan Lingkaran Setan

“kitorang pelaku usaha kecil yang ada di kampung ini hanya baharap orang kampung deng pekerja yang tinggal di kosan saja yang datang balanja, soalnya kalo yang par perusahaan itu pejabat-pejabat daerah dong pe jatah, hampir masing-masing dinas di

*kabupaten me dorang pe kuota ada di perusahaan, ada yang urus baras, ikan, sayur, tomat, rica, garam, bawang, air minum me ada samua sudah. LENGKAP*⁴⁰

Kawasi menjadi pasar terbuka bagi para pebisnis lokal maupun nasional, jenis bisnis pun beragam dengan skala yang berbeda-beda. Terbukanya peluang bisnis yang besar membuat beberapa pejabat daerah ikut terlibat dalam menjalankan bisnis mereka. Berbagai macam izin mereka mempermudah dengan mengeluarkan berbagai macam regulasi agar unit bisnis mereka tetap berjalan mulus masuk ke Desa Kawasi. Sejak masifnya operasi produksi nikel di desa Kawasi banyak pejabat daerah terlibat dan mengambil kuota sebagai suplayer untuk penyuplai beragam kebutuhan yang diperuntukkan perusahaan baik bisnis sembako, jasa angkutan laut, tempat hiburan malam (Karaoke) maupun unit bisnis kotor lainnya.⁴¹

Bahkan ada yang bersifat suplayer eksklusif demi monopoli suplai di beberapa perusahaan kontraktor yang sedang beroperasi dalam pembangunan infrastruktur perusahaan maupun pemukiman. Sejak dirintisnya pembangunan pemukiman baru yang diperuntukan program relokasi masyarakat kawasi pada 2018, satu-satunya pemasok beras untuk kebutuhan sembako pekerja proyek adalah mantan Bupati Halmahera Selatan yang sejak itu masih menjabat Bupati aktif. Sebagai penyuplai eksklusif perusahaan sudah tentu memiliki jejaring kerjasama yang laus dengan sumber-sumber produksi bahan bakunya.

Mula-mula, beras yang menjadi komoditas bisnis utama yang dijalankan berasal dari beberapa wilayah transmigrasi yang ada di pulau Halmahera dengan pertimbangan jangkauan yang dekat serta harga yang lebih murah, namun permintaan yang tinggi serta komplain terhadap kualitas produksi lokal yang dianggap buruk, menyebabkan terputusnya mata rantai pasok dari petani transmigrasi di Halmahera.⁴²

Peningkatan permintaan kebutuhan beras dengan kualitas terbaik versi perusahaan yang cukup besar 100ton perbulannya menjadi pertimbangan bagi mantan Bupati (BK) membangun jejaring baru di luar Maluku Utara sebagai suplai bisnisnya. Melalui pertemenan dengan beberapa pejabat perusahaan kontraktor, jaringan suplai beras pun dibangun pada basis-basis produksi beras yang ada di Sulawesi dan Jawa yang tak lain adalah milik para pejabat perusahaan tersebut pula.⁴³

⁴⁰ Hasil Wawancara Lapangan Dengan TU, Agustus 2024

⁴¹ Hasil Wawancara Lapangan Dengan TU, Agustus 2024

⁴² Hasil Wawancara Lapangan Dengan TU, Agustus 2024

⁴³ Hasil Wawancara Lapangan Dengan OP, Agustus 2024

Bagi-bagi jatah serta kuota penyuplai di lingkaran elit pejabat daerah sudah tentu hal yang lumrah terjadi di berbagai daerah. Selain beras yang pada dasarnya bukan basis produksi masyarakat, beberapa kebutuhan dasar seperti air minum pun tak lepas dari libido bisnis monopoli para pejabat. Semenjak adanya himbauan Dinas Kesehatan Kabupaten atas kelayakan sumber air minum masyarakat Kawasi yang telah tercemar logam berat setelah pengambilan sampel serta tahapan penelitian laboratorium di publikasi pada 2020, privatisasi bisnis atas sumber air minum terjadi dan merubah lanskap kebutuhan air minum dari sumur menjadi air isi ulang.

Sejak adanya himbauan tersebut kebutuhan air minum baik untuk karyawan perusahaan maupun sebagian besar masyarakat Kawasi disuapi dari Labuha yang ada di pulau Bacan yang tak lain adalah kota kabupaten Halmahera Selatan. Penyuplai air tentu saja dikelola oleh pemerintah melalui unit bisnisnya yakni Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), meskipun ada upaya kamuflase yang dilakukan pemerintah atas suplai air ke masyarakat Kawasi melalui unit bisnis perorangan namun sumber air-nya tetap sama yaitu PDAM Labuha yang juga pemasok kebutuhan air minum kepada beberapa perusahaan kontraktor yang ada di Kawasi.⁴⁴

Tabel 3.3
suplai kebutuhan air minum

Nama perusahaan	Jenis barang	Jumlah yang disuplai/hari	sasaran	Harga/galonn
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	Air Galon	300-500 galon/hari	Perusahaan Kontraktor	25.000/galon
		300-400 galon/hari	masyarakat	20.000/galon

Sumber: Data Lapangan 2024

e. PT. Prama Murti

PT. PARAMA MURTI adalah perusahaan nasional yang berdiri pada tahun 1994, dan berdomisili di Manado Sulawesi Utara. Perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi dan kontraktor pertambangan kini dikenal sebagai salah satu kontraktor tambang dan rental alat-

⁴⁴ Hasil Wawancara Lapangan Dengan KL, Agustus 2024

alat berat untuk berbagai jenis pekerjaan, seperti penambangan nikel dan emas pengerukan di danau, konstruksi jalan raya, bendungan dan irigasi dan lain sebagainya.⁴⁵

Perusahaan ini punya sepak terjang yang panjang dan cukup familiar di wilayah kepulauan Maluku Utara karena terlibat cukup lama di beberapa daerah tambang yang ada di Maluku Utara. Sebelumnya pernah juga memenangi berbagai macam lelang proyek pada wilayah operasi perusahaan lain yang ada di pulau Halmahera seperti Tambang Nikel yang ada di Subaim dan Marnoppo Buli Halmahera Timur dan juga Tambang Emas milik PT. Nusa Halmahera Mining di Gosowong di Halmahera Utara. Sejak 2018 lalu juga sudah menancapkan kukunya di Desa Kawasi Pulau Obi setelah memenangi lelang proyek pembangunan Eco Village.

Selain memenangi lelang proyek pembangunan Eco Village, PT Parama Murti juga menjadi satu-satunya perusahaan yang mengendalikan proyek galian C, pembangunan tempat tinggal karyawan (Mess), penimbunan lahan, pembangunan jalan perusahaan, reklamasi dan pembangunan pelabuhan bahkan penebangan hutan untuk wilayah produk ore khusus untuk wilayah produksi PT Halmahera Persada Lygend (HPAL) dan juga PT Halmahera Jaya Feronikel (HJF).

PT. Parama Murti juga bertindak sebagai penyedia berbagai macam alat berat untuk operasional perusahaan dalam jumlah yang terbilang sangat banyak melalui unit usaha rental alat-alat beratnya. Belum terhitung dengan jumlah kendaraan berat yang telah rusak yang diperkirakan sekitar 36 unit untuk semua jenis kendaraan berat.⁴⁶

⁴⁵ Hasil Wawancara Lapangan Dengan MN, Agustus 2024

⁴⁶ Hasil Wawancara Lapangan Dengan MN, Agustus 2024

Tabel 3.4 Jenis alat berat

Jenis kendaraan berat	Jumlah
Bulldozer	50 unit
Eskavator	50 unit
Grader	32 unit
Scraper	17 unit
Roller	26 unit
Bored Pile	21 unit
Kren	14 unit

PT. Parama Murti menggunakan sewa guna usaha (SGU) untuk mengadakan alat-alat berat, namun bertentangan dengan peraturan pajak karena telah melakukan penyusutan terhadap aset Sewa Guna Usaha (SGU).

f. PT Pesona Khatulistiwa Nusantara (PKN)

Batubara merupakan kebutuhan penting dan utama bagi setiap industri ekstraktif yang menggunakan PLTU. Tidak terkecuali PT. Harita Group yang memiliki tiga Power Plan dan Juga pabrik peleburan nikel atau smelter yang masing-masing berada pada anak perusahaannya PT HPAL, PT HJF dan PT MSP. Sebabnya kebutuhan batubara yang diperlukan sangatlah besar untuk mengoperasikan tiga power plan serta tiga smelter yang ada.

Untuk pemenuhan kebutuhan batubara tersebut maka sistem pelelang pun dibuka pada tahun 2013 sebagai media untuk menawarkan jasa kerja sama atau mitra sebagai suplayer batubara. Pelelangan tersebut dilakukan untuk menghormati etika pasar saja sebab sedari awal pemenang lelang tersebut telah ditentukan yakni PT Pesona Khatulistiwa Nusantara yang pemiliknya juga salah satu komisaris utama PT. Trimega Bangun Persada (TBP).

Setelah memenagkan lelang tersebut, PT. Pesona Khatulistiwa Nusantara ditetapkan sebagai penyuplai eksklusif batubara baik untuk kebutuhan power plan maupun smelter yang ada di Pulau Obi.

g. PT. AXA Insurance Indonesia

AXA Insurance merupakan perusahaan asuransi umum dengan fokus bisnis asuransi umum dan asuransi kesehatan bagi perseorangan maupun korporasi yang lengkap melalui

omni-channel distribusi, dan menjadi salah satu penyedia asuransi kesehatan karyawan, asuransi perjalanan, dan pengangkutan terkemuka di pasar Indonesia, serta beragam produk asuransi lainnya.

Semenjak PT. Harita Group beroperasi di Pulau Obi pada 2010 silam, PT. AXA Insurance Indonesia yang merupakan bagian dari (AXA GROUP) telah menandatangani kontrak kerja sama antara dua perusahaan besar ini. Selain mengurus asuransi, ternyata PT. AXA Insurance Indonesia sedang mencoba melebarkan sayapnya sebagai penyedia jasa angkutan untuk wilayah pertambangan dan baru di uji coba dengan kontrak kerja sama dengan PT. Harita Group yang ada di Pulau Obi Maluku Utara.

Penyediaan jasa angkutan untuk wilayah pertambangan biasanya melalui perusahaan kontraktor yang memenangi lelang proyek tertentu, namun hal tersebut berbeda dengan PT. AXA Insurance Indonesia yang menyediaka jasa angkutan untuk distribusi sembako dari pelabuhan ke area perusahaan, atau jasa angkutan jenis Dump Truk untuk mengangkut material nikel dari penampungan ke smelter dan dari hulu ke tempat penampungan, juga jasa angkut karyawan dari mess ke tempat kerja mereka.

Tabel 3.5

Jenis Kendaraan	Jumlah Kendaraan	Fungsi Kendaraan
Dump Truk	200 Unit	Angkut Material Tambang
Pick UP	100 Unit	Angkutan Sembako Milik Perusahaan
Bus	25 Unit	Angkutan Pekerja

Sumber: Data Lapangan, Agustus 2024

h. PT. Bank Panin

Seluruh arus dan putaran keuangan PT Harita Group dikendalikan satu pintu yakni PT Bank Panin Tbk. Pada 2017, Bank Panin meneken kesepakatan strategis mengenai uang elektronik dengan PT Bank Mandiri dalam rangka monopoli pembayaran upah karyawan perusahaan mitra yang beroperasi pada pertambangan ekstraktif.

Selain itu, PT Bank Panin Tbk juga memfasilitasi ruang perkantoran bagi setiap perusahaan mitra pada kantor pusat mereka di Jakarta Pusat. Begitupun beberapa perusahaan

yang berada di bawah PT. Harita Group seperti PT. HPAL, HJF, MSP dan lainnya semua berkantor pusat pada gedung PT Bank Panin Tbk.

Fasilitas kantor bagi sebuah perusahaan besar merupakan hal yang wajib ada. Begitu pun dengan PT. Harita group yang mempunyai berbagai macam kantor baik yang tersebar di daerah penambangannya, maupun kota kabupaten yang ada di Maluku Utara. Namun semuanya harus berpusat pada satu kantor induk atau sering kali dikenal dengan kantor pusat, dan sudah barang tentu kantor pusatnya ada di Jakarta. Tetapi jika kantor pusat sebuah perusahaan sebesar PT. Harita Group yang berkantor pada gedung perusahaan lain seperti PT. Bank Panin Tbk, maka terdapat kerjasama yang sangat mengikat.

i. Suplayer Sembako Perusahaan

Foodmart dan Belmart merupakan suplayer logistik terbesar untuk kebutuhan karyawan di dalam area tambang PT. Harita Group Khususnya PT. Halmahera Persada Lygend (HPAL). Foodmart sendiri merupakan anak perusahaan dari PT. Matahari Putra Prima Tbk (MPPA) yang mengoperasikan jaringan supermarket dan Hypermarket yang menjual sembako hampir menjamur ke seluruh penjuru Indonesia. Didirikan pada Maret 1986, kemudian melakukan Initial Public Offering (IPO) pada Desember 1992. Toko-toko yang terkenal diantaranya Hypermaket, Foodmart, dan Boston Health & Beauty.⁴⁷

Sementara Belmart juga bukan merupakan perusahaan induk tetapi bagian dari PT. Sierad Produce Eko Putro Sandjojo yang bergerak dibidang logistik atau kebutuhan sehari-hari. Belmart lebih fokus sebagai penyedia kebutuhan daging segar, terutama ayam potong. Hal itu terlihat jelas hampir setiap gerainya menyediakan ayam segar sebagai komoditas utama yang ditawarkan kepada konsumen, walaupun ada juga menu lain yang disediakan oleh Belmart seperti ayam siap saji dengan berbagai macam jenis rasa dan namanya, tetapi menu komoditas utamanya juga ayam potong segar.

Pada tahun 2022, PT. Matahari Putra Prima Tbk (MPPA) menandatangani kerjasamanya dengan PT. Harita Group khususnya PT. Halmahera Persada Lygend (HPAL) sebagai penyuplai utama kebutuhan sembako perusahaan. Kebutuhan sembako semua disuplai dari pulau Jawa menggunakan jasa Cargo maupun perusahaan jasa ekspedisi lokal seperti Logistik Expres yang ada di Ternate.

⁴⁷ (*Desk study*)

Pada tahun yang sama pula Belmart menandatangani kontrak kerjasama dengan PT. HPAL sebagai penyedia kebutuhan daging terutama ayam potong segar untuk perusahaan. Sebagai penyuplai utama daging mentah segar, mereka juga menggunakan perusahaan jasa yang sama dengan foodmart sebagai jembatan penghubung antara Jawa dengan PT. HPAL yang ada di desa Kawasi, pulau Obi.⁴⁸

⁴⁸ Hasil Wawancara Lapangan Dengan TU, Agustus 2024

IV

RAGAM KERUSAKAN SOSIAL-EKOLOGI

1. Dampak Operasi PLTU Captive

a. Genangan disekitar pemukiman

“kalau torang dalam posisi kerja lalu tiba-tiba datang hujan deras selama 2 jam atau lebih, itu torang pasti sudah siap-siap buat pulang biar masih ada jam kerja. Perusahaan juga seperti sudah tahu kalau torang pulang pada saat hujan itu karena mau amankan kamar kos, itu terjadi suda beberapa kali selama kerja disini”.⁴⁹

Intensitas masuk-keluar tongkang setiap minggu dan ukuran kapasitas penampungan batubara, memberi kesan akan kebutuhan bahan baku batubara yang tidak sedikit untuk pemenuhan produksi di masing-masing PLTU Captive. Sudah tentu dalam dalam setiap proses pastinya menyisakan dampak yang sulit dihindari Masyarakat. Berbagai tahapan pasokan batubara untuk PLTU mulai dari pembongkaran di jeti hingga pengangkutan menuju tempat penampungan adalah deretan proses yang terhubung dengan aktivitas keseharian masyarakat. Tuturan salah satu informan kami diatas memberikan Gambaran yang sangat jelas bagaimana masyarakat mendapatkan dampak langsung dari aktifitas industry ini. Aktifitas PT. Halmahera Persada Leygend (HPAL) dan PT Megah Surya Pertiwi (MSP), dalam rangkaian produksi PLTU Captive menyebabkan setiap kali musim hujan terjadi genangan air setinggi mata kaki di lingkungan warga bagian utara. Para pekerja yang menyewa kamar kos di lokasi tersebut juga mengalami hal yang sama, karena pondasi bangunan yang hanya seukuran betis orang dewasa mereka sering kali di saat hujan harus bergegas pulang untuk mengantisipasi genangan air yang akan menjarah masuk. Hal itu disebabkan fokus bangunan smelter dan infrastruktur lain milik kedua perusahaan memotong jalur aliran sungai, akibatnya di saat hujan maka aliran sungai memaksa keluar mencari jalan dan mengendap di sekitaran rumah warga maupun bangunan yang disewakan.

Selain itu, masalah yang paling sering dialami masyarakat maupun pekerja ialah debu batubara yang bertebaran. Hal ini terjadi karena PT. Halmahera Persada Leygend (HPL) dan PT Megah Surya Pertiwi (MSP) hanya menumpukan pasokan batubara mereka pada ruang terbuka tanpa alas di bagian bawahnya maupun penutup diatasnya. Banyak pekerja mengalami

⁴⁹ (Ni, minggu 10 Agustus 2024).

kesulitan akan pernapasan di lingkungan produksi sepanjang aktivitas kerjanya karena debu yang bertebaran mengikuti arah angin. Dampak lainnya, sekitaran permukiman banyak jemuran pakaian yang dihinggapi debu dengan meninggalkan bercak hitam.

Kejadian tersebut pun dialami seorang karyawan, setiap mencuci pakaiannya dan kemudian dijemur di halaman rumah pasti menempel bercak-bercak hitam, apalagi kalau dijemur adalah baju berwarna putih yang ketika terkena debu maka menempel bercak hitam dan itu sulit dihilangkan. *“apabila torang selesai mencuci baju warna putih dan lupa mengangkatnya selama dua hari di gantungan jemuran, itu baju sudah tra bisa di pakai karena seluruh kainnya suda muncul bintik-bintik hitam dan kalau dicuci tidak hilang sama sekali”*.⁵⁰

Masalah yang terjadi disinyalir merupakan akibat dari aktivitas PLTU yang saling berdekatan dengan rumah warga, pabrik peleburan dan lokasi PLTU milik HPAL benar-benar menampakan wujudnya dan menjadi tontonan harian warga. Bahkan PLTU saja jelas terlihat tulisan “HPL” di batang cerobongnya, tentunya keberadaan ini menyebabkan debu hasil pembakaran secara otomatis menyatu dengan udara di perkampungan warga.

b. Serangan debu batubara

Ragam masalah juga terjadi pada penampungan batubara milik PT. Halmahera Jaya Feronikel (HJF), walaupun memiliki *stockpile* yakni tempat penampungan tertutup namun terdapat sebagian besar batubara yang masih berserakan di luar dan berpapasan dengan aktivitas warga sehari-harinya. Berdasarkan cerita di lapangan, jika saat tiba waktu pembongkaran batubara pada jeti maka yang terjadi adalah kesulitan pernapasan yang dialami setiap pekerja. Masker yang digunakan pekerja juga tidak berfungsi maksimal karena saat dibuka meninggalkan bercak hitam di sekitaran hidung.

Pada dasarnya pesisir pantai syarat akan keberadaan angin yang berhembus dari segala sisi dan berlangsung setiap saat, jika itu terjadi dan angin berhembus ke arah timur bersamaan dengan waktu pembongkaran batubara. Maka yang dialami oleh pekerja selain pernapasan adalah serangan debu batubara ke kelopak mata mereka, hal itu dialami setiap kali melakukan penyekopan batubara atau aktivitas serupa di jeti. Untuk meminimalisir resiko kacamata selalu dijadikan media pelindung mata, namun jika dilupakan maka yang terjadi adalah pekerja harus menyipitkan mata selama bekerja sebagai upaya mengecil resiko terhadap mata.⁵¹

⁵⁰ (Hasil Wawancara Lapangan dengan Ni dkk, Agustus 2024).

⁵¹ (Hasil Wawancara Lapangan Dengan MM, Agustus 2024).



Gambar 4.1 Potret Aktivitas di atas pelabuhan jeti HJF

Sumber: Dokumentasi lapangan 2024

Selain itu tempat penyimpanan batubara HJF baik yang dimuat didalam stockpile maupun yang disimpan secara terbuka menyisakan masalah berbeda yang mungkin lebih ironis. Peralnya bangunan stockpil untuk menyimpan batubara seluas 5 kali lapangan sepak bola semula merupakan perkebunan milik warga, bekas perkebunan itu masih terlihat dari sebagian besar pohon kelapa dan juga sugu bertebaran luas disekeliling stockpile. Namun di atas tanah tersebut telah berdiri patok bertuliskan “*tanah ini milik perusahaan, dilarang melakukan aktivitas tanpa sepengetahuan perusahaan*”, jika dilihat secara keseluruhan mulai dari bibir pantai hingga ke perkebunan warga di perbukitan terdapat 28 patok dengan tulisan yang sama.

c. *Pemindahan paksa bangunan sekolah*

Tumpukan batubara yang disimpan di ruang terbuka menyebabkan salah satu bangunan sekolah dasar dipaksa untuk direlokasikan ke *Eco Villlage* atau pemukiman baru yang dalam perencanaanya akan disiapkan untuk merelokasi seluruh warga desa Kawasi. Pada saat kami berkendara menuju Pelabuhan, terlihat dengan jelas tumpukan batubara milik PLTU HJF yang menjarah mulai dari halaman belakang sekolah hingga ke stockpile. Arena terbuka yang digunakan sebagai lokasi penampungan persis bersebelahan dengan Sekolah Dasar (SD) yang berjarak hanya 10meter saja.



Gambar 4.2 Penampungan batubara terbuka di lingkungan sekolah

Sumber: Dokumentasi lapangan 2024

Bangunan sekolah dan tumpukan batubara hanya dibatasi dengan kontainer yang tersusun horizontal. Jarak yang begitu dekat menyebabkan kaca jendela, lantai maupun keseluruhan bangunan sekolah meninggalkan bercak hitam dan terkesan seperti terbengkalai untuk hitungan waktu yang lama. Menurut tuturan warga, baru 5 tahun yang lalu sekolah tersebut sudah tidak lagi digunakan. Keberadaan batubara membuat bangunan sekolah untuk pendidikan masyarakat dipindah-paksakan ke Eco Village di tahun 2019.

*“perusahaan suru kasih pindah sekolah itu dari tahun 2019, dorang bilang kalau lokasi itu talalu dekat dengan lingkungan perusahaan dan membayakan para siswa. Padahal memang ini cara dorang untuk paksa agar sekolah pindah dari situ, batubara itu dorang simpan bagitu saja di belakang sekolah tara pake tutup apa-apa. Kalau dari pagar belakang sekolah itu torang lia batu bara jelas sekali, akang punya tinggi bisa lebih dari atap sekolah”.*⁵²

Demi Batubara, intimidasi pun dilakukan tanpa henti agar pihak sekolah dapat menyetujui untuk sekolahnya dipindahkan menuju Eco village. Salah satu pengajar berkisah, kejadian relokasi sekolah tersebut beliau yang paling keras dalam hal penolakan, karena itu pada satu waktu rumah beliau didatangi anggota *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan menggandeng sejumlah aparat kepolisian lengkap dengan senjata laras panjang. Sekitar 4 anggota polisi juga turut masuk ke dalam rumah bersama anggota CSR untuk membicarakan terkait relokasi tersebut. Tujuan mereka semata hanya untuk meminta agar beliau bersepakat agar sekolahnya dapat dipindahkan, mereka pun berdalih bahwasanya lingkungan sekolah telah

⁵² (Bt, minggu 11 Agustus 2024).

dipenuhi debu batubara yang bertebaran dan dapat membahayakan para siswa yang melakukan aktivitas sekolah.⁵³



Gambar 4.3 Kondisi Sekolah Dasar dengan tumpukan batubara dan PLTU di halaman belakang

Sumber: Dokumentasi lapangan 2024

Pernah ada cerita ketika di sekolah sedang melangsungkan aktivitas belajar-mengajar, para guru dan murid dikejutkan dengan debu hitam yang bertebaran karena tertiuip angin. Debu tersebut bersumber dari tumpukan batubara di halaman belakang sekolah, akibatnya lingkungan sekitar dihujani dengan debu batubara di setiap sudut sehingga menyebabkan jarak pandang menjadi terbatas. Kejadian itu berlangsung sekitar 20 menit lamanya dan Aktivitas sekolah pun dihentikan dengan para murid terpaksa dipulangkan, namun kepulangan para murid disertai dengan seragam sekolah yang sudah dipenuhi dengan tempelan debu hitam di setiap sisinya.⁵⁴

d. Hilangnya ruang produksi rakyat

Kebutuhan batubara untuk produksi setiap PLTU menyebabkan hilangnya ruang produksi masyarakat yang menggantungkan sebagian besar kebutuhannya di laut. Pembangunan pelabuhan jeti di pesisir laut diduga sebagai alasan utamanya sebab sebagian ruang pesisir yang dialihfungsikan sebagai pelabuhan jeti tersebut merupakan wilayah yang orang Kawasi sebut “*guguti*”. Guguti adalah ruang social yang digunakan oleh masyarakat

⁵³ (Hasil Wawancara Lapangan Dengan Bt, Agustus 2024).

⁵⁴ (Hasil Wawancara Lapangan Dengan KA, Agustus 2024)

sebagai tempat istirahat untuk selanjutnya kembali melakukan aktivitas melautnya. Bukan hanya itu, luas laut yang menjadi wilayah tangkap masyarakat juga hampir terkikis habis, padahal dari lepas bibir pantai hingga ke pertengahan laut telah dijadikan masyarakat sejak dahulu kala sebagai ruang produksi dengan fungsi ruang berbeda-beda.⁵⁵

Menurut cerita, wilayah sekitaran bibir pantai seringkali disebut sebagai “*bakekesi*”, ada juga “*batotango*” yang merujuk pada lokasi setelah bibir pantai, dan “*oru-oru*” sebagai wilayah tangkap setelah *batotango* hingga seterusnya ke pertengahan laut. Penamaan ruang sangat berkaitan dengan jarak serta alat tangkap dan pastinya berkaitan dengan jenis tangkapan yang nantinya di dapatkan, namun sekarang akibat lalu-lalang tongkang batubara dan aktivitas perusahaan di pesisir laut menyebabkan sebagian besar ruang produksi tersebut telah hilang dan hanya menyisakan cerita.⁵⁶



Gambar 4.4 Lalu-lalang tongkang batubara di pesisir pantai kawasi

Sumber: Dokumentasi lapangan 2024

2. Dampak Industrialisasi Nikel

a. Banjir dan Kehancuran Sungai

Di Desa Kawasi, kejadian banjir besar pernah terjadi dan menutupi seluruh rumah warga di sepanjang desa, kondisi air yang merendam desa setinggi paha orang dewasa terjadi sekitar tahun 2012 lalu. Air yang meluap dari sungai dari dalam perusahaan menenggelamkan perkampungan lebih dari 2 hari tanpa surut. Buntut dari kejadian banjir ini, Perusahaan Harita

⁵⁵ (Hasil Wawancara Lapangan Dengan KA, Agustus 2024)

⁵⁶ (KA, Kamis 17 Agustus 2024)

malalui PT. HJF menggali tanah sebagai sungai buatan untuk mengurangi debit air untuk dialirkan ke laut.⁵⁷

Dari keterangan warga, saat banjir terjadi, jaringan telfon dan internet hilang saat itu sehingga tidak ada satupun pemberitaan tentang kondisi banjir saat itu, hilangnya akses komunikasi ini bukan tanpa alasan, warga mengatakan bahwa setiap kali ada insiden buruk tentang alam atau masalah sosial lainnya, akses jaringan selalu di nonaktifkan oleh pihak perusahaan, kondisi ini berlangsung selama beberapa tahun terjadi, penyebab utamanya adalah karena segala kebutuhan masyarakat seperti jaringan komunikasi, listrik dan air berih saat ini telah di privatisasi dan dikelola oleh perusahaan. Selain itu, beberapa pekerja yang ditemui juga mengatakan bahwa ada ancaman PHK terhadap pekerja jika berani memberitakan atau mengaplod insiden-insiden tersebut ke media.



Gambar 4.5 Sungai Buatan Yang Dibangun Saat terjadi Banjir

Sumber: Dokumentasi lapangan 2024

Setelah banjir yang terjadi pada tahun 2012, banjir besar juga pernah terjadi pada tahun 2017. Saat banjir terjadi, debit air didalam perkampungan memang sudah tidak separah seperti sebelumnya, namun pada arah selatan perkampungan, debit air yang besar merendam seluruh perkebunan warga. Kondisi banjir yang melanda desa saat itu membuat warga dan perusahaan kembali melakukan penggalian sungai buatan kedua untuk mengalirkan aliran air menuju laut.⁵⁸

Sejak dilakukannya penggalian sungai buatan pada tahun 2012, sungai ini direncanakan akan di betonkan oleh pihak perusahaan, ironisnya hingga tahun 2024 ini kondisi dua sungai

⁵⁷ Hasil Wawancara Lapangan Dengan TU, Agustus 2024

⁵⁸ Hasil Wawancara Dengan PS dan TK, Agustus 2024

buatan ini tampak tidak tersentuh oleh pihak perusahaan, hal ini terlihat dari kondisi sungai yang telah ditutupi oleh rumput liar di sepanjang badang sungai, seperti rumput yang subur, sungai inipun menjadi rumah baru bagi sampah rumah tangga yang berserakan disepanjang sungai.

Eksplorasi hutan oleh beberapa perusahaan yang masuk dalam kelompok Harita Group, pembangunan *smelter* dan *power plane* untuk mendukung PLTU pada PT. MSP dan PT. HPAL juga sangat mempengaruhi pola konsumsi air bersih masyarakat. Sungai-sungai yang dahulu digunakan oleh masyarakat sebagai sumber utama kebutuhan air bersih telah dipenuhi dengan lumpur, misalnya pada Sungai Kaca, posisi sungai kaca yang berdekatan langsung dengan hutan yang digusur untuk pembangunan *smelter* dan *power plane* milik PT. MSP dan PT. HPL membuat sungai ini telah dipenuhi dengan lumpur dan warna air telah menjadi kuning kecoklatan padahal dalam keterangan warga, sebelumnya air pada sungai ini dapat di konsumsi secara langsung tanpa harus di rebus.

*“Air itu (Sungai Kaca) dulu paling jernih, bisa digunakan untuk bercermin. Bahkan saking jernihnya kalau Populaki (jarum) jatuh saja masih bisa kelihatan. Di air itu juga dulu kalau orang pulang mangael (memancing) biasa dorang/mereka singga untuk bakar ikan dan lain-lain disitu”.*⁵⁹

Tidak hanya sungai kaca, salah satu sungai yang telah rusak dan hilang adalah sungai loji. loji dulunya merupakan salah satu sumber air yang biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat saat melakukan aktifitas perkebunan, kini tidak lagi terlihat. Serupa dengan kondisi sungai kaca, eksploitasi hutan sekitar sungai untuk pembangunan pabrik pendukung PLTU membuat sungai ini tidak lagi dimanfaatkan oleh masyarakat karena telah di tumbun dengan material yang juga di keruk dari hutan sekitar desa.⁶⁰

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan TU, Agustus 2024

⁶⁰ Hasil Wawancara Dengan TK, Agustus 2024



Gambar 4.6 Tampak Sungai Loji

Sumber: Dokumentasi lapangan 2024

Kehancuran sungai yang terjadi disekitar desa juga terjadi pada lahan-lahan perkebunan masyarakat, sumber-sumber mata air yang disediakan oleh alam juga telah berubah menjadi genangan yang dipenuhi lumpur. Menurut keterangan warga, saat ini hanya sungai akelamo saja yang masih dapat di dimanfaatkan oleh masyarakat seperti mandi dan mencuci pakaian, sayangnya, letak sungai ini yang jauh dari perkampungan membuat sungai ini jarang diakses untuk kebutuhan tersebut.

Sungai akelamo yang diceritakan ini ternyata juga tengah dieksploitasi oleh perusahaan, pada sungai ini sedang dibangun bak penampung dengan ukuran besar untuk menampung kebutuhan air bersih, dari penampung ini air ini direncanakan akan ditarik menggunakan pipah besi berukuran besar untuk dialirkan pada kebutuhan masyarakat dan perusahaan. Saat ditemui, pada beberapa bibir sungai telah dipenuhi dengan lumpur akibat aktivitas penimbunan disekitar sungai.



Gambar 4.7 Sungai Akelamo
Sumber: Dokumentasi lapangan 2024

Selain kondisi sungai yang sudah tidak dapat dimanfaatkan oleh warga, kebutuhan air bersih yang berasal dari sumur galian masyarakat juga telah mengalami perubahan yang pesat, air sumur galian masyarakat yang biasa dikonsumsi belakangan sudah mulai tidak dijadikan sebagai sumber utama kebutuhan makan dan minum. Menurut beberapa warga yang ditemui, air pada sumur-sumur galian ini telah dipenuhi dengan zat kapur, selain itu, ketika diminum ada bau besi pada air tersebut. Hal ini juga dipertegas oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera selatan yang mengatakan bahwa dari total 24 sumur galian yang ada di Desa Kawasi hanya terdapat 2 sumur yang masih layak untuk dikonsumsi. Salah satu dari sumur yang masih layak diminum inilah yang kemudian dikelola oleh salah satu masyarakat untuk menjadikannya sebagai sumber pendapatan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara menjual membuka depot air isi ulang dengan harga Rp, 10.000/galon.

Selain air bersih yang dijual oleh masyarakat Kawasi, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, air bersih dengan harga Rp, 20.000/galon juga disuplay dari Labuha Bacan yang merupakan Kota Kabupaten dari Halmahera Selatan.⁶¹ Dalam pantauan dilapangan, setiap harinya terlihat beberapa mobil pikup L300 yang berlalu lalang untuk menjual air bersih. Dalam satu hari mobil yang berlalu lalang silih berganti, terdapat 3-4 mobil berbeda yang menjual air isi ulang ini. hal ini juga terkonfirmasi pada beberapa warung tempat makan kami

⁶¹ Hasil Wawancara Dengan TK, Agustus 2024

selama dilapangan, menurut mereka air yang disediakan untuk diminum oleh pelanggan mereka beli dari mobil-mobil yang menjualnya.⁶²

Ketersediaan air bersih untuk konsumsi masyarakat yang sebelumnya bersumber dari beberapa sungai tersebut kini telah diprivatisasi oleh perusahaan. Menurut keterangan warga, sumber-sumber mata air yang biasanya diakses oleh masyarakat kini sudah tidak dapat dimanfaatkan karena telah dibatasi oleh aktivitas perusahaan. Sebagai akibat, uang kini menjadi satu-satunya akses untuk memenuhi kebutuhan air bersih untuk konsumsi masyarakat.

b. Pencemaran Udara

Kondisi perkampungan yang diselimuti dengan debu ketika musim panas sangat dirasakan oleh warga Desa Kawasi. Misalnya pada saat warga menjemur pakaian, seluruh pakaian yang digantung akan dipenuhi debu. Tidak hanya itu, dalam keterangan warga, rutinitas yang dilakukan oleh warga ketika bangun pagi adalah membersihkan seluruh ruangan yang penuh dengan debu tambang.

Tidak hanya warga, hal yang serupa juga dirasakan oleh peneliti saat dilapangan. Beberapa warung makan yang di singgahi juga dipenuhi dengan debu tambang dan jalan. Untuk memastikan hal tersebut salah satu dari peneliti mengujinya dengan menggosakan tangan pada meja makan. Ramainya pengunjung yang berdatangan untuk makan dan setelahnya seluruh meja akan dibersihkan oleh penjaga warung seperti tidak mengurangi debu pada meja-meja tersebut. Hal tersebut dibuktikan dengan kondisi tangan salah satu peneliti yang masih saja dipenuhi dengan debu.⁶³

⁶² Data Lapangan, Agustus 2024

⁶³ Data Lapangan, Agustus 2024



Gambar 4.8 Kondisi Udara di Desa Kawasi

Sumber: Dokumentasi lapangan 2024

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang memiliki peran penting dalam hilirisasi nikel PT Harita Group yang menjadikan Wilayah Desa Kawasi sebagai pusat pembangunannya menjadikan Kawasi terhimpit dengan berbagai masalah. Kebutuhan batu bara untuk menjalankan PLTU menimbulkan dampak kondisi udara yang telah tercemar. Salah satu dampak PLTU bisa dilihat dari salah satu bangunan Sekolah Dasar yang kini telah di relokasi. Dalam keterangan warga, batu bara yang ditampung pada lahan perkebunan masyarakat menyebabkan kondisi fisik bangunan sekolah diselimuti oleh debu. Oleh karena itu, dengan berbagai pertimbangan yang dilakuka oleh masyarakat dan pihak sekolah memutuskan untuk direlokasi demi keselamatan anak-anak dari bahaya debu yang disebabkan oleh batu bara.

“Satu waktu (tahun 2019) itu pernah ada kejadian di SD yang sekarang sudah direlokasi itu, saat itu belum direlokasi, itu anak-anak tidak bisa keluar dari dalam kelas karena debu batu bara yang dorang (perusahaan) timbun didekat sekolah itu memenuhi seluruh halaman sekolah”⁶⁴

Selain dampak pencemaran udara yang terjadi pada kondisi fisik bangunan di Desa Kawasi, pada temuan lapangan, masyarakat mengatakan bahwa kondisi warga yang mengalami kesulitan pernafasan juga masif terjadi, bahkan ada anak-anak yang meninggal akibat mengalami kesulitan pernafasan.

“Kalau soal penyakit ISPA ini tidak perlu pakai data dari puskesmas, kami semua yang ada di sini adalah penderita ISPA. Di sini (Kawasi) banyak anak-anak yang sakit karena ISPA, ada yang muntah dara hingga meninggal akibat sesak nafas”⁶⁵

Udara yang telah dicemari dengan debu tambang yang terjadi di Kawasi sangat berbahaya bagi masyarakat. Salah satu keterangan yang berasal dari warga mengatakan bahwa pernah ada dokter dari Klinik di Perusahaan yang menyampaikan tentang kondisi perkampungan dengan tingkat debu yang intens terjadi ini bahwa “debu yang di hirup oleh masyarakat Kawasi itu perbulannya sama dengan satu sendok makan”. dengan berdasar pada keterangan tersebut, secara otomatis debu yang dikonsumsi masyarakat dalam satu tahun sama dengan 12 sendok makan.

c. Kerusakan Laut dan Hilangnya Sumber Penghidupan

Desa Kawasi Kecamatan Obi merupakan pusat aktivitas perusahaan Harita Group, operasi perusahaan di Desa Kawasi menjadikan desa ini sebagai sarang masalah baru akibat aktivitas pertambangan. Berbagai dampak negatif yang terjadi seperti udara yang tercemar, air berih yang tercemar dan krisis, jalan rusak, kejahatan sosial lainnya menjadi kesatuan lengkap yang tengah terjadi pada masyarakat Kawasi. salah satu kerusakan yang parah terjadi adalah kerusakan pada laut. tercemarnya laut di sekitar Desa Kawasi yang merupakan wilayah utama masyarakat dalam mencari ikan sangat memprihatinkan. menurut keterangan beberapa warga, laut di sepanjang Desa Kawasi yang dulunya menjadi pusat ikan kini hanya menjadi cerita lama orang-orang Kawasi.



Gambar 4.9 Kondisi Laut di Areal Pelabuhan

Sumber: Dokumentasi lapangan 2024

⁶⁵ Hasil Wawancara Lapangan dengan UK, Agustus 2024

Sejalan dengan sejarah Desa Kawasi tentang perpindahan pemukiman, alasan kuat orang tua mereka zaman dulu yang berpindah dari lokasi Kampung Tua menuju lokasi yang kini ditempati masyarakat sebagai perkampungan baru adalah karena kondisi laut yang dipenuhi dengan berbagai jenis ikan. Kini kondisi laut seperti saat itu hanya menjadi cerita sejarah lama orang Kawasi. menurut keterangan salah satu masyarakat yang ditemui, “sekarang ikan di depan Kawasi sudah tidak ada, walaupun ada harus berlayar jauh baru bisa dapat, itu pun sangat sedikit jika dibandingkan dengan kondisi kawasi beberapa tahun lalu”, padahal sekitar tahun 1990-an akhir saya masih sering mengantarkan ayah saya untuk mencari ikan di sekitar laut Kawasi. Ia juga menceritakan tentang adanya penelitian yang mengatakan bahwa kondisi laut di depan Kawasi ini sudah sangat tercemar, bahkan dalam radius 4 Mil jauhnya bibir pantai di Desa Kawasi masih ditemukan lumpur hitam kecoklatan di dasar laut. warga menduga kuat bahwa perubahan kondisi laut ini sangat dipengaruhi oleh masifnya aktifitas kapal tongkang pengangkut batu bara, selain itu lalu lalang kapal tongkang sejak tahun 1980-an hingga 2005 yang mengangkut hasil pertambangan dalam bentuk *ore* nikel juga memiliki pengaruh negatifnya terhadap laut kawasi saat ini.

Dampak kerusakan lautan akibat sungai dan daratan yang rusak terus menerus terjadi sangat merubah pola konsumsi ikan. Masyarakat Kawasi yang sejak dulu mengkonsumsi ikan dari hasil melaut sendiri, atau dibeli dari nelayan yang berasal dari orang-orang Kawasi kini telah berubah menjadi masyarakat yang hanya mengandalkan uang untuk mendapatkannya, setiap harinya masyarakat selalu menunggu ikan yang di jual dari luar desa, salah satunya dari Desa Soligi. Menurut salah satu perempuan penjual nasi kuning, ikan yang ia jajakan bersama nasi yang ia jualannya dibeli dari orang Soligi, selain itu, ikan-ikan yang dijual disini juga sebagian besarnya di suplay dari Bacan, bahkan dalam cerita salah satu warga, beberapa tahun lalu, atau sekitar tahun 2020-an mulai ada ikan yang disuplay dari luar Maluku Utara yang berlangsung hingga sekarang.

d. Penyerobotan Lahan dan Konflik Sosial

Berbagai kasus yang dicertitakan pada bagaian sebelumnya merupakan masalah yang berawal dari pembebasan lahan disekitar areal pertambangan Harita Group. Masuknya Harita Group yang mengakuisisi izin pertambangan milik PT. ANTAM menjadi penyumbang berbagai jenis masalah di Desa Kawasi. Korporasi yang diberikan izin pemanfaatan sumber daya alam diatas “tanah negara” seperti memiliki perspektif berbeda, pasalnya hak masyarakat sekitar yang terkena dampak langsung dari aktifitas pertambangan ini hampir tidak

diperhatikan. Berbagai kebutuhan pembangunan infrastruktur penunjang membutuhkan lahan yang besar, meskipun secara eksistins, terdapat lahan dan perkebunan masyarakat yang masuk dalam areal konsesi perusahaan. Sebagai akibat, tanah masyarakat yang telah dimiliki secara turun temurun dari puluhan tahun lalu sudah tidak menjadi hak milik pribadi, kemudian sistem ganti rugi menjadi solusi yang ditawarkan oleh perusahaan.

Istilah ganti rugi yang diterapkan oleh perusahaan dalam rangka mengambil alih lahan perkebunan milik warga menjadi sangat realistis dengan kondisi yang terjadi ditengah masyarakat, hal ini menurut warga karena dalam setiap proses pelepasan lahan, tidak sedikit kerugian yang ditanggung oleh masyarakat. Lahan yang dibeli oleh perusahaan bukan hanya lahan kosong, meski terdapat tanaman perkebunan garga yang dibayar oleh perusahaan masih sangat kurang jika dibandingkan dengan kondisi lahan tersebut jika tidak diserahkan kepada perusahaan.

“Dorang/perusahaan ini semena-mena saja, harga tanah yang dibayar oleh perusahaan ini seharusnya tidak boleh sama dengan harga yang ditetapkan oleh aturan PERDA saja, lahan di sini kan bukan hanya lahan kosong tapi ada lahan yang sudah ditanami oleh warga dan menjadi sumber kebutuhan dari situ”⁶⁶

Selain model ganti rugi, perusahaan juga menggunakan istilah tukar guling dalam mengambil lahan masyarakat. Meskipun terdapat penolakan, sebagian masyarakat terpaksa melepaskan lahan milik mereka, tukar guling yang dimaksudkan adalah misalnya ada masyarakat yang punya anak ingin menjadi anggota TNI, perusahaan berjanji akan membantu keluarga tersebut hingga lolos menjadi seorang TNI.

“waktu itu ada saya punya teman di Soligi, perusahaan janji akan bantu dia punya anak sampai lolos jadi anggota TNI, yang penting mau lepas dia punya lahan. Tapi sekarang ciba lihat, apa dia punya anak lolos k tarada? Itu kan bualan perusahaan saja untuk dapat lahan. Akhirnya lahan sudah tidak ada sementara anak juga tidak jadi anggota TNI.”⁶⁷

Istilah tukar guling yang digaungkan oleh perusahaan ini terjadi juga pada masyarakat nelayan yang memiliki lahan di sekitar desa. Untuk menjaga keberlangsungan hidup msyarakat yang bermata pencaharian dari hasil laut ini dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mendapatkan lahan-lahan tersebut. pemberdayaan masyarakat yang dilakukukan oleh perusahaan dengan

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan UK, Agustus 2024

⁶⁷ Hasil wawancara deangan UK, Agustus 2024

cara merekrut para nelayan untuk menjadi suplayer ikan di perusahaan namun dengan syarat harus melepaskan lahan mereka kepada perusahaan.⁶⁸

Setelah beberapa tahun menjadi suplayer ikan di perusahaan, masuknya Foodmart dan Belmart di tahun 2022 sebagai suplayer logistik di perusahaan memutuskan mata rantai pasok ikan yang sebelumnya dipasok oleh para nelayan di Desa Kawasi dan Desa Soligi. Masuknya dua suplayer yang menyediakan logistik di perusahaan ini secara langsung juga memutuskan pendapatan nelayan yang diperoleh perusahaan.

Dalam tuturan warga, tahun 2019 ketika ada penyorobatan lahan oleh perusahaan untuk pembuatan bandara memicu konflik antara masyarakat dengan aparat kepolisian. Lahan yang digusur oleh perusahaan merupakan lahan warga yang telah ditanami dengan cengkeh dan kelapa, juga sebagian adalah hutan sagu yang biasanya dikelola secara bersama oleh masyarakat. Ambisi perusahaan untuk pembuatan bandara mendorong lahan milik warga digusur paksa, meskipun terdapat penolakan yang dilayangkan oleh masyarakat perusahaan justru menggunakan cara licik dengan menggusur lahan tersebut pada dini hari.

*“Lahan yang dorang gusur untuk pembangunan bandara itu dulu kebun kelapa dan cengkeh semua disitu juga ada kebun sagu masyarakat, padahal kita sudah larang, tapi perusahaan memang sangat licik, dorang gusur lahan itu saat hari minggu, kemungkinan digusur sekitar jam 4-5 dini hari karena setelah kita selesai ibadah pagi di Gereja lalu ke lokasi itu semuanya sudah rata dengan tanah, alat-alat yang digunakan untuk gusur juga sudah tidak ada, sudah benar-benar bersih”.*⁶⁹

Setelah melihat lahan yang telah digusur, masyarakat melakukan aksi demonstrasi sebagai protes yang dilayangkan untuk meminta pertanggung jawaban perusahaan, aksi ini merupakan inisiatif berama oleh warga. Aksi protes yang dilakukan oleh masyarakat dengan penuh amarah memicu warga memukul salah satu security yang sedang bertugas. Imbas dari aksi pemukulan tersebut, terjadi konflik antar warga dengan anggota Polri yang bertugas di perusahaan. Setelah ditelusuri, security yang dipukul oleh warga tersebut merupakan salah satu anggota TNI berpangkat Letnan Kolonel yang sedang dalam penyamaran dengan bekerja sebagai kepala security pada salah satu pos penjagaan di perusahaan.

Setelah pemukulan salah satu security itu, warga diserang oleh puluhan anggota brimob. Masa aksi yang agamanya Islam itu masuk kedalam masjid sementara yang Kristen masuk di

⁶⁸ Hasi wawancara dengan PS Agustus 2024

⁶⁹ Hasi wawancara dengan PS Agustus 2024

tetap menjadikan hutan sebagai sumber penghidupan, lahan yang dipenuhi dengan perkebunan cengkeh dan beberapa jenis tanaman lainnya menjadi salah satu alasan kuat penolakan yang disampaikan kepada pihak perusahaan. Dalam keterangannya, segala cara perusahaan telah lakukan untuk membeli lahannya.



Gambar 4.11 Lahan Warga di Tengah Kepungan Tambang

Sumber: Dokumentasi lapangan 2024

Upaya perusahaan untuk membeli lahan tersebut tidak hanya melibatkan manajemen perusahaan, ada juga anggota masyarakat yang telah menjadi bagian dari perusahaan turut melakukan lobi untuk membeli lahan tersebut. Bahkan perusahaan juga melibatkan intelijen yang berasal dari TNI dan Kepolisian dalam proses lobi-lobi pelepasan lahan masyarakat.

Dalam proses mempertahankan lahan, MN mengungkapkan bahwa ia sempat menaruh harga yang harus dibayar oleh perusahaan apabila terus memaksa untuk membeli lahan tersebut.

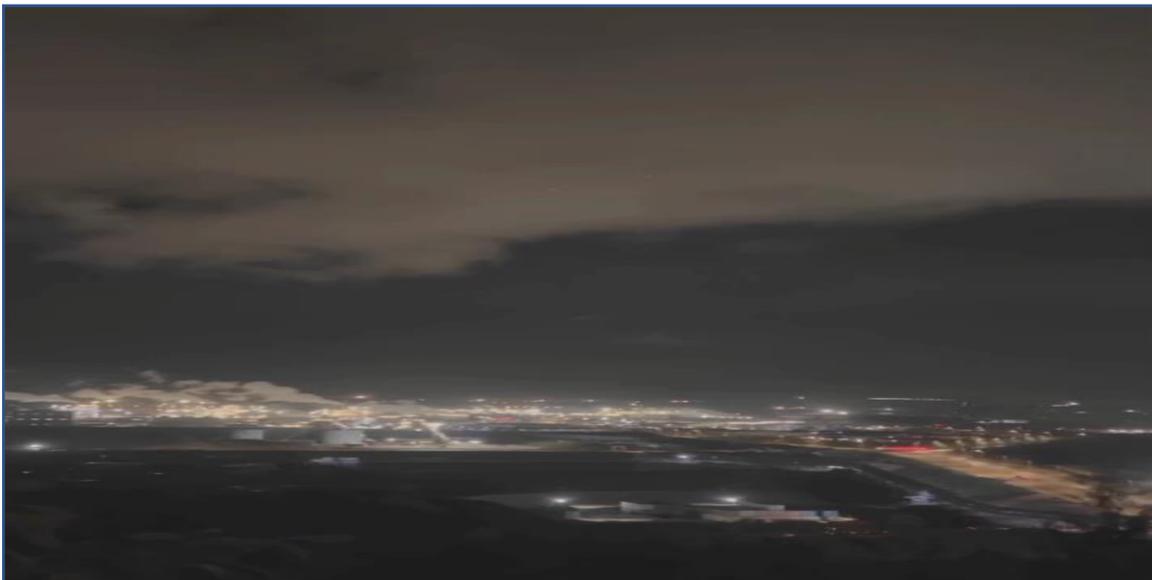
“kalau mau beli berarti bayar lahan itu harus hitung harga tanah permeter dan harga tanaman (cengkeh) harus bayar satu pohon 10 juta. Saya punya lahan ada di beberapa tempat, kalau memang mau bayar, 1 dusun itu bayar saya 1 miliar supaya saya jual. Jadi perusahaan tidak sanggup bayar, itu memang salah satu cara saya untuk tolak”.⁷¹

⁷¹ Hasil Wawancara Lapangan dengan LM, 2024

*“Saya bilang ke dorang (perusahaan), kalau sampai mobil-mobil perusahaan yang lewat di saya punya lahan lalu menyenggol saya punya tanaman itu harus bayar, jangankan sampai patah, sentuh cengkeh punya dahan sedikit saja itu harus bayar 10 juta. Harus pakai cara seperti itu supaya mereka juga jangan kerja asal suka saja”.*⁷²

e. Krisis Pasokan Listrik Warga di Tengah Raksasa Energi Listrik

Laju arus listrik yang dialiri tiga PLTU ke pabrik smelter sepanjang waktu telah menyulap perbukitan serupa ibu kota Jakarta di malam hari, lokasi konsentrasi produksi penuh dengan cahaya sepanjang malam tanpa henti. Ironisnya, ratusan rumah warga desa Kawasi tidak memiliki akses penuh atas listrik selama waktu 24 jam, setiap keluarga hanya dapat menikmati listrik pada malam hari saja mulai dari pukul 18:30 WIT sampai 06:00 WIT. Kondisi ini berbalik dari kenyataan kepemilikan daya listrik PLTU Captive Harita group, yang telah melingkari desa Kawasi dari ujung selatan hingga utara desa sejak lama.



Gambar 4.12 Kondisi penerangan malam hari di kawasan industri

Sumber: Dokumentasi lapangan 2024

Desa Kawasi sejak awal tidak sama sekali terjangkau listrik nasional milik Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN), dengan demikian tidak satupun juga berdiri tiang kabel listrik di setiap sudut jalanan desa. Kepemilikan sumber listrik bagi masyarakat Kawasi masih bergantung pada panel surya, mesin diesel, dan suplay listrik dari perusahaan yang dikhususkan warga asli kawasi. Padahal sebelum dikuasai Harita Group Kawasi telah ditimbun ijin oleh

⁷² Hasil Wawancara Lapangan dengan LM, 2024

berbagai perusahaan pertambangan seperti PT Antam (1995-2008), namun bahkan sampai PT. Tirmegah Bangun persyada (TBP) di akuisisi dan dijadikan unit bisnis Harita Group sampai sekarang wajah Kawasi masih tetap sama dengan keterbatasan listriknya.

Bahkan sampai hari ini untuk warga lokal kawasi kebutuhan listrik yang didapatkan dari perusahaan tidak tersedia atau tidak dialiri 1x24 jam, peruntukan listrik oleh perusahaan hanya dapat dinikmati 12 jam saja pada saat malam hari mulai dari pukul 19:00-07:00 WIT. Sementara untuk masyarakat luar kawasi yang datang untuk kebutuhan membangun usaha seperti rumah makan, pengkas rambut, salon perawa tan, dll. Kebutuhan listriknya bergantung pada panel surya maupun mesin genset yang dibeli sendiri, walaupun dapat dinyalakan setiap saat karena dimiliki sendiri namun pertimbangan bahan bakar untuk mesin diesel menyebabkan listrik hanya dinyalakan pada malam hari saja.⁷³

“Setiap malam menjelang waktu magrib bunyi suara mesin genset atau diesel di belakang-belakang rumah ketika dihidupkan. Itu jadi penanda kalau rumah yang hasilkan bunyi-bunyi mesin itu pasti rumah yang punya mesin genset, kecuali warga asli kawasi yang dapa listrik dari perusahaan”.

Keadaan ini tentunya menyulitkan warga kawasi dalam aktivitas kesehariannya yang bergantung dengan aliran listrik, sebab hampir semua kebutuhan hidup di kawasi sudah bergantung pada jaringan listrik. Dari beberapa rumah yang dikunjungi selama di kawasi tidak sedikit yang menggunakan *Rice Cooker* untuk memasak nasi maupun penggunaan mesin pencuci pakaian, belum lagi masifnya penggunaan elektronik juga bisnis wifi dan Bri-Link yang merupakan usaha yang bergantung pada listrik. Keterbatasan listrik tersebut juga otomatis menyebabkan kesulitan dalam mengakses sumber air, pasalnya kebanyakan rumah telah menggandalkannya mesin sanyo agar dengan mudah menarik air dari dalam sumur.

Kondisi itu kami rasakan sendiri sewaktu berada di kawasi, akibat keterbatasan arus listrik menyebabkan akses terhadap air untuk membasuh tubuh juga terbatas. Jika kebutuhan air mandi didapatkan dari sumur maka dibutuhkan listrik untuk menghidupkan mesin penariknya, maka dengan listrik yang hanya di malam hari menyebabkan terbatasnya air pada pagi hingga sore hari. Mungkin juga karena masalah listrik yang tidak memadai menjadikan kesulitan tersendiri akan akses jaringan internet. Hal itu dirasakan ketika mengirimkan sebuah

⁷³ (Hasil Wawancara Lapangan Dengan Ni, Agustus 2024).

pesan via wa yang baru masuk dan dibaca penerima setelah lima menit lamanya, dan itu bisa semakin bertambah lamanya jika menunggu pesan balasan.

Ketika berada di salah satu penginapan kawasi kita berlomba untuk memasuki kamar mandi pada pagi hari pada rentan waktu pukul 06:00-08:00 WIT, hal itu disebabkan tampungan air di bak mandi hanya terisi penuh di malam hari saja sesuai waktu dihidupkannya listrik oleh perusahaan. Akibatnya di pagi hari air tersisa di penampungan bak mandi mejadi rebutan oleh 11 orang yang menyewa kamar termasuk penjaga penginapan, memang sejak awal memutuskan untuk menyewa penginapan kami suda diingatkan oleh pria penjaga penginapan mengenai akses air karena keterbatasan listrik tersebut.

“Di penginapan Ardila atau samua penginapan di kawasi listrik menyala hanya dari malam sampai pagi saja, itu karna perusahaan kasi hidup listrik cuman dari jam 19:00-07:00 pagi lalu dimatikan sampe sore menjelang waktu magrib. Jadi karna listrik cuman ada di antara waktu itu jadi kalau mau aktivitas harus mandi pagi-pagi, karena kalau siang hari takutnya air sudah tidak ada di bak mandi dan mesin tidak bisa tarik air dari sumur karena tidak ada listri di waktu siang”.⁷⁴

Selain itu, bangunan yang diperuntukan untuk disewakan tiap-tiap kamarnya atau umum disebut “kos-kosan” memiliki kontrak pembayaran berbeda dari yang biasanya ditemui. Jika umumnya ketika satu kamar kos disewakan dengan harga 400 per-bulan, maka kita hanya membayar sesuai perjanjian pembayaran untuk setiap bulannya. Sedangkan di kawasi apabila menyewa satu kamar kos tidak hanya membayar harga sewa kamarnya, setiap bola lampu yang digunakan pengguna kos akan dimintai juga harga untuk setiap bulannya. Untuk satu bola lampu yang terpasang harus membayar Rp 150.000. dan dibayar bersamaan dengan waktu kontrak pembayaran kamarnya, maka satu kamar kos di kawasi dengan harga sewa mulai dari Rp 300.000. – 1.000.000 ketika pembayaran wajib di kalkulasikan dengan Rp150.000 biaya penggunaan satu mata lampu.

Setiap bulan itu saya bayar 450 ribu, itu kamar 300 ribu dengan lampu satu yang menyala 150 ribu. Ini samua karna listrik dorang dapat dari mesin genset yang harus pake pertalite, karna itu bayar kos bukan saja kamar yang torang tinggal tapi bayar lampu lai yang manyala di kamar.⁷⁵

⁷⁴ (Hasil Wawancara Lapangan Dengan PK, Agustus 2024).

⁷⁵ (Hasil Wawancara Lapangan Dengan Ni, Agustus 2024).

Fenomena tersebut terjadi pada sebagian besar usaha kos-kosan di Desa Kawasi terkhusus untuk pemilik kos yang sumbernya listriknya di dapatkan dari mesin genset, setiap bola lampu yang wajib di bayar disebabkan listrik yang tersedia dari mesin genset membutuhkan biaya produksi seperti bahan bakar pertalite yang digunakan setiap harinya. Bahan bakar inilah yang menjadikan pemilik atau pengusaha kos memberi beban tambahan kepada pengguna (penyewa) atas pembiayaan dalam sebulan untuk setiap pemakaian mata lampu, maka keterbatasan listrik di kawasi ini menyebabkan setiap orang baik masyarakat lokal maupun pendatang merasakan kesulitan yang sama setiap harinya.

Kawasan Eco Village yang dalam rencana perusahaan menjadi pemukiman baru bagi warga lokal kawasi ketika berhasil secara keseluruhan untuk direlokasi, memiliki sumber listrik dengan bergantung dari mesin diesel yang disediakan perusahaan. Mesin diesel tersebut dilengkapi dengan luas bangunan 12x8 meter persegi sebagai tempat penyimpanan, lokasinya berada di tengah-tengah pemukiman Eco Vilagge.



Gambar 4.13 Pemukiman *Eco Village* dan Gedung *Corporate Social Responsibility (CSR)*

Sumber: Dokumentasi lapangan 2024

Dari tuturan salah satu warga, mesin diesel direncanakan akan digunakan untuk pemenuhan pasokan listrik pada setiap bangunan di Eco Village. Dalam lingkungan tersebut berdiri bukan hanya bangunan rumah warga tetapi juga berbagai fasilitas untuk kebutuhan hidup masyarakat. seperti tempat ibadah yakni Gereja dan Mesjid, bangunan sekolah mulai dari Paud, SD, SMP, SMA, serta kantor pemerintahan desa dan bangunan Corporate Social

Responsibility (CSR) yang tembok betonya dipenuhi mesin pendingin udara atau Air Conditioner (AC).⁷⁶

f. Perubahan Lanskap Desa
Perubahan Basis Produksi

Jika ditelusuri tentang sejarah ruang masyarakat Kawasi dan pulau Obi, sejak dulu secara umum masyarakat telah membagi seluruh bentang alam sebagai ruang produksi mereka. Misalnya pada lautan, beberapa penanda ruang laut seperti "*Batotano, Oru-oru, Basasawi, Barangke, Yaunu, dan Ngoto*" adalah seluruh wilayah laut yang dimanfaatkan oleh masyarakat dalam mencari ikan. Hal ini merupakan cara untuk menandai jenis ikan apa saja yang bisa didapatkan pada titik produksi tersebut. Selain itu, fungsi lain dari penanda tersebut ialah sebagai upaya masyarakat untuk mengetahui titik atau lokasi mana yang harus dituju ketika melakukan pencarian nelayan yang hilang di laut.⁷⁷

Keberadaan perusahaan tambang di pulau Obi yang terpusat di Desa Kawasi menjadi pemicu rusaknya seluruh ruang produksi laut. Salah satu kerusakan laut bisa yang terjadi bisa dilihat dari kondisi bibir pantai di sekitar desa Kawasi yang mengalami perubahan pada warna air, keadaan ini menggambarkan kondisi laut yang telah tercemar. Perubahan jarak tangkapan ikan oleh masyarakat yang diceritakan bahwa sudah sangat jauh secara tidak langsung menegaskan tentang hilangnya salah satu area tangkapan ikan disekitar bibir pantai atau dalam tuturan masyarakat disebut sebagai wilayah "*Buang-buang (Batatano)*".

Berubahnya basis produksi di Desa Kawasi tidak hanya terjadi pada laut, melainkan terjadi juga pada hutan disekitar Desa Kawasi. Hutan yang ada di pulau Obi oleh masyarakat juga dibagi menjadi beberapa ruang produksi sendiri yakni "*Joro*" (kebun pangan jangka pendek) dan "*Raki*" (tanaman jangka Panjang, seperti Hasil hutan dll) yang sejak dulu telah hidup dan berlangsung hingga sekarang. Dalam temuan lapangan, baik Joro maupun Raki telah dijadikan sebagai pusat pembangunan infrastruktur perusahaan juga wilayah eksplorasi tambang.

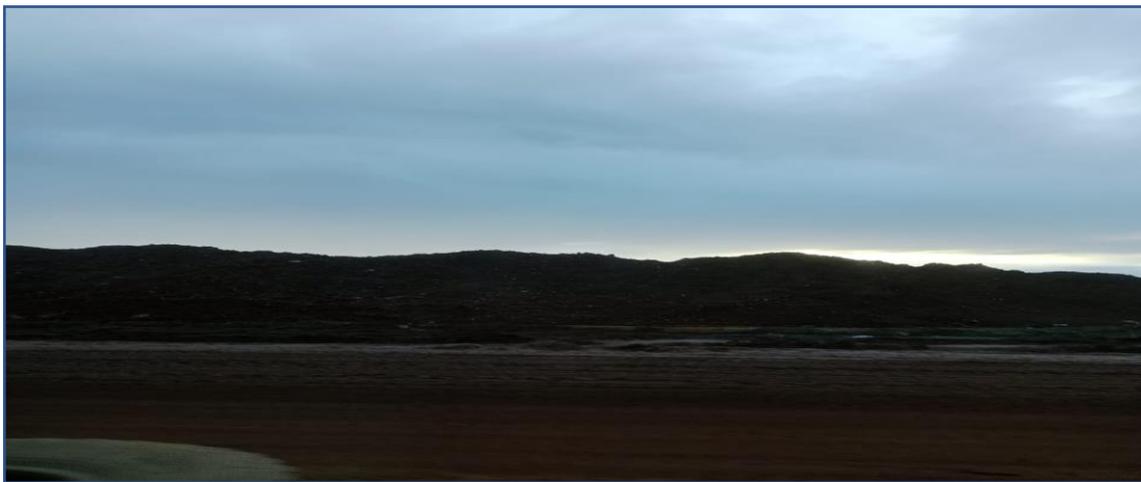
"Dulu kalau kita sedang melaut, sepanjang mata melihat itu terlihat ratusan pohon kelapa dan pohon sagu disepanjang pesisir pantai, kini pemandangan itu sudah sudah

⁷⁶ Hasil Wawancara Lapangan Dengan IE, Agustus 2024

⁷⁷ Hasil Wawancara Lapangan, Agustus TU 2024

*tidak ada, sekarang yang terlihat hanya tumpukan material tanah/Ore yang ditimbun oleh perusahaan*⁷⁸

Kondisi lahan perkebunan warga yang telah berubah menjadi tempat penumpukan *ore* mencapai beberapa hektar, begitu juga dengan dua tempat penampung batu bara yang masing-masing penampungnya memiliki panjang mencapai 5 kali lapangan sepak bola. Tempat penampung batu bara, *ore* dan bangunan infrastruk lain yang dibuat pada lahan produksi masyarakat menyebabkan berubahnya cara pandang masyarakat tentang cara mendapatkan uang tidak lagi dengan memanfaatkan lahan produksi melainkan dengan cara menjual.



Gambar 4.14 Lokasi Perkebunan Masyarakat yang telah tempat Penumpukan *Ore*

Sumber: Dokumentasi lapangan 2024

Kondisi Pemukiman

Perubahan lain yang terjadi pada Desa Kawasi adalah kepadatan penduduk yang terus meningkat sejak kedatangan Harita Group. Seiring dengan hadirnya industri, populasi masyarakat asli yang masih tergolong sedikit dimana hanya dihuni oleh ± 400 Kepala Keluarga dengan jumlah ± 900 jiwa. sedangkan yang berasal dari luar Kawasi lebih dari 12 ribu jiwa.

Ribuan orang-orang yang berdatangan ke Desa Kawasi sebagian besarnya merupakan karyawan dan karyawati yang menempati asrama/mess yang telah disediakan perusahaan, sementara yang tidak kebagian tempat pada mess-mess yang disediakan menempati rumah-rumah masyarakat asli Kawasi yang telah dikontrakan karena berpindah ke Lokasi *Eco Village*. Kini jumlah jiwa yang ada di dalam perkampungan sekitar ± 3 ribu jiwa. Kepadatan penduduk yang terjadi di Desa Kawasi juga mendorong Masyarakat untuk membangun rumah permanen

⁷⁸ Hasil Wawancara Lapangan dengan LM, 2024

dan semi permanen di sekitar desa untuk disewakan kepada pekerja dan masyarakat luar yang datang ke Kawasi. Rumah yang dibangun oleh masyarakat terkesan terburu-buru ini merupakan telah menjadi sumber utama masyarakat walaupun rumah-rumah tersebut tampak kumuh dan memprihatinkan⁷⁹



Gambar 4.15 Kondisi Pemukiman Desa
Sumber: Dokumentasi lapangan 2024

Selain berubahnya kondisi desa akibat kedatangan masyarakat luar lainnya, Perubahan yang drastis juga terjadi pada kondisi desa seiring dengan banyaknya pihak keamanan dari TNI dan Polri yang berdatangan. Dalam keterangan warga, masifnya aktivitas aparat didalam perkampungan juga membawa sampak buruk bagi masyarakat.

“Pernah ada anggota brimob yang tembak masyarakat disini, saat itu ada salah satu anggota yang mabuk karena minum dengan warga, lalu entah karena masalah apa sehingga terjadi baku pukul antara anggota tersebut dengan salah satu warga yang menjadi teman minumannya. Naasnya saat anggota itu tembak teman minumannya malah kanal dua orang warga ade kaka yang sementara berada disekitar situ.”⁸⁰

Relokasi

Perusahaan Harita Group yang beroperasi di Pulau Obi dengan pusat akitifitasnya di Desa Kawasi menyebabkan masyarakat harus terusir dari desa yang telah ditinggali selama beberapa generasi. Berbagai alasan disampaikan oleh pemerintah daerah dan perusahaan sebagai upaya perpindahan masyarakat menuju lokasi yang tekah disediakan untuk tempat tinggal masyarakat yang baru. Sejak tahun 2019, perusahaan telah menggusur lahan untuk membuat

⁷⁹ Hasil Wawancara Lapangan Dengan TU, Agustus 2024

⁸⁰ Hasil Wawancara Lapangan Dengan BK, Agustus 2024

perkampungan baru. Perumahan yang dibangun ini dinamakan sebagai *Eco Village* atau Kawasi Baru.

Proses pembangunan perumahan baru bagi masyarakat Kawasi tidak hanya membuat masyarakat terusir dari desa yang telah lama ditinggali, tetapi bagi sebagian masyarakat, dengan berpindah ke *Eco Village*, secara otomatis masyarakat akan dengan sendirinya memisahkan diri dari akar sejarah masyarakat.

Dalam keterangan warga, *Eco Village* yang dibangun untuk tempat tinggal masyarakat memiliki banyak masalah, mulai dari kondisi lahan, ukuran bangunan rumah, hingga hak masyarakat yang harus diselesaikan sebagai syarat yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Pada lokasi yang dibangun sebagai perkampungan baru itu sebelumnya adalah rawah, lokasi tersebut dulunya merupakan hutan sagu milik masyarakat.

“Lokasi Eco Village dulunya itu hutan sagu, jadi lahan disitu semuanya adalah rawa, sangat berbahaya untuk ditinggali dalam waktu yang lama karena lahan itu ditumbun dengan kayu dan pohon sagu yang ditebang, setelah itu baru ditimbun dengan batu dan tanah. tapi kan seharusnya tidak boleh langsung dibangun”⁸¹

“Di Eco Village kalau hujan deras selama 1 hari full saja kondisi Eco Village sudah banjir, karena memang sejauh ini di sana tidak semacam selokan atau drainase sebagai pengalihan aliran air dari kampung”⁸²

Sekitar 25 unit bangunan rumah yang mulai dibangun pada tahun 2019 oleh PT. HJF dengan luas 4x6 diprotes oleh warga hingga karena tidak sesuai dengan keinginan masyarakat kemudian dibongkar dan dibangun kembali dengan ukuran 7x9. Meski demikian rumah yang dibangun ini tidak semua berukuran sama karena terdapat bangunan yang berukuran 5x7.

Selain itu pada lokasi permukiman baru, salah satu poin yang tertuang dalam JUKNIS yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sebagai syarat untuk masyarakat dalam kepemilikan bangunan rumah adalah “masyarakat yang mau memiliki rumah di *Eco Village* adalah mereka yang memiliki rumah pada perkampungan lama”. Syarat lainnya adalah masyarakat yang berhak untuk mendapatkan bangunan rumah adalah mereka yang telah tinggal di Kawasi lebih dari 10 tahun lamanya.

Di perkampungan lama atau yang masih ditinggali, anggota keluarga yang baru menikah sudah tidak diperbolehkan untuk membangun rumah, sementara bangunan rumah yang

⁸¹ Hasil Wawancara Lapangan dengan LM, 2024

⁸² Hasil Wawancara Lapangan dengan LM, Agustus 2024

disediakan di *Eco Village* saat ini hanya tersedia 259 unit atau masih kurang dari total yang harusnya dibangun.

Jarak *Eco Village* yang dibangun sekitar 4,5 KM dari perkampungan lama masyarakat direncanakan akan menjadi perkampungan baru untuk warga desa yang di relokasi. Dalam keterangan warga, lokasi perkampungan yang saat ini ditinggali oleh warga akan digusur oleh perusahaan untuk pembangunan infrastruktur penunjang seperti mess untuk tempat tinggal pekerja, *Jetty* dan Kren untuk kebutuhan pengangkutan batu bara dan lain-lain.

Pembangunan tempat tinggal baru bagi warga membuat masyarakat menjadi terkotak-kotak, menurut warga, kondisi masyarakat saat ini telah terbelah menjadi tiga kelompok. Diantaranya, masyarakat yang telah tinggal di *Eco Village*, kedua masyarakat yang akan pindah namun dengan syarat perusahaan harus memenuhi hak masyarakat, dan yang ketiga adalah masyarakat yang menolak di relokasi.

Bagi warga yang menolak berpindah, lokasi yang dibangun untuk perkampungan baru ini bukanlah solusi yang baik bagi mereka, sebab tidak ada jaminan tentang kehidupan mereka ditempat tersebut. Alasan itu menurut warga karena lokasi tersebut telah masuk dalam areal perusahaan yang kapan saja akan diambil lagi oleh perusahaan seiring dengan kebutuhan perusahaan. Selain itu bagi mereka, berpindah ke *Eco Village* sebenarnya adalah pindah dari “neraka menuju neraka”.

Berbagai alasan yang digaungkan oleh pemerintah daerah tentang kondisi masyarakat Kawasi menimbulkan perspektif yang berbeda dikalangan masyarakat, alasan yang disampaikan diantaranya ialah “karena kondisi Desa kawasi yang sekarang sangat tidak layak untuk ditempati karena kondisi perkampungan yang sudah dipenuhi oleh debu. Alasan lainnya yakni karena terdapat patahan lempeng dilaut depan perkampungan yang sewaktu-waktu akan terjadi tsunami”.

“Pemerintah ini aneh, mereka mengatakan bahwa masyarakat harus pindah karena kampung sudah sangat berdebu, sementara di Eco Village saja bangunan-bangunan semua sudah penuh dengan debu dari tanah, dan lokasi Eco Village itu ada ditengah aktifitas pertambangan juga”⁸³

“Kalau kami harus pindah karena depan laut Kawasi ini ada patahan lempeng yang berpotensi tsunami, kenapa harus di Eco Village? sementara Kawasi dan Eco Village ini masih sama-sama satu lokasi”⁸⁴

⁸³ Hasil Wawancara Lapangan dengan UK, 2024

⁸⁴ Hasil Wawancara Lapangan dengan UK, 2024

Keterangan warga yang menjelaskan tentang alasan perpindahan yang disampaikan oleh pemerintah ini diduga kuat merupakan alasan asal-asal semata. Pasalanya, baik di Desa Kawasi maupun *Eco Village* telah diselimuti oleh debu tambang Harita Group.

Kondisi Jalan Desa

Operasi pertambangan Harita Group sejak tahun 2010 tidak hanya merusak laut dan hutan di Desa Kawasi, masifnya lalu lintas yang beroperasi dilingkungan desa menyebabkan kondisi jalan desa mengalami kerusakan yang parah. Jalan utama yang biasa dilalui oleh masyarakat untuk berkebun yang berlokasi diatas rawa-rawa sagu tidak sedikitpun mencerminkan layaknya sebuah jalan untuk masyarakat. Upaya penimbunan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendukung aktifitas pertambangan justru tampak semakin parah, kondisi jalan yang timbun telah dipenuhi dengan lumpur meskipun tidak terjadi hujan yang intens hingga memaksa masyarakat harus melewati jalan yang lain. Kondisi ini diperparah saat musim penghujan melanda.

Disamping masifnya lalu lalang mobil perusahaan, kondisi lahan yang sejak dulu adalah rawah dan kini telah ditimbun oleh perusahaan menjadi salah satu penyebab utama rusaknya lahan tersebut. Sementara itu, rusaknya jalan warga tidak hanya terjadi diluar atau sekitar desa, kondisi jalan yang berada ditengah-tengah desa juga telah mengalami kerusakan yang parah.

Warga Desa Kawasi yang masih menikmati jalan dengan berlapis tanah tanpa adanya sentuhan aspal sangat sulit untuk dilalui, pasalnya saat musim panas, masyarakat akan sangat menderita dengan debu yang berterbangan seiring hembusan angin dan lalu lalang mobil perusahaan, sementara ketika hujan sepanjang jalan akan dipenuhi dengan genangan air akibat hujan tersebut. Dalam hitungan peneliti, hanya dalam jarak 300 meter saja sudah terdapat 78 lubang yang dipenuhi dengan genangan air. Selama berada di desa peneliti menyaksikan lubang-lubang yang tergenang air disepanjang jalan tersebut selalu terjadi meskipun hujan yang turun tidak deras.



Gambar 4.16 Kondisi Jalan Desa
Sumber: Dokumentasi lapangan 2024

Perubahan Akses Masyarakat Ke Desa

Masuknya aktifitas pertambangan Harita Group di Desa Kawasi sejak tahun 2010 lalu menyebabkan terjadinya perubahan pada akses masyarakat menuju desa. Kebutuhan pembangunan *Jetty* dan *Crane* sebagai tempat bongkar muat batu bara dan material lainnya yang dibangun pada bibir pantai desa mendorong perusahaan mereklamasi pantai di sekitar desa. Lokasi awal pelabuhan yang sebelumnya berjarak sekitar ± 1 Km dari perkampungan kini telah dipindahkan ke lokasi lain yang lebih jauh. Penyebab utama dipindahkannya pelabuhan tersebut ialah karena sepanjang bibir pantai sekitar desa telah dan akan dibangun *Jetty* dan *Crane*.

Lahan yang kini telah dialih fungsikan sebagai pelabuhan untuk masyarakat merupakan lahan yang awalnya dipenuhi dengan perkebunan kelapa warga. Berbeda dengan lokasi awal, pelabuhan kapal baru yang dibangun sekarang berjarak sekitar 4,5 Km dari perkampungan. Selain jarak yang menyebabkan kesulitan masyarakat dalam mengakses pelabuhan, kesulitan lainnya ialah perubahan pada besaran biaya atau ongkos yang harus dikeluarkan oleh masyarakat. Besaran biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat dari pelabuhan baru adalah Rp, 100.000,- sedangkan sebelumnya adalah Rp, 50.000,- dari pelabuhan awal menuju perkampungan.

g. Tempat Hiburan Malam dan Hilangnya Etika Kehidupan Kampung

Di Kawasi, salah satu informan kami menyampaikan:

“dolo kita orang kampung me tara tau apa itu Ladies (wanita penghibur), apalagi yang tara sekolah kaluar (kuliah), karna orang macam itu me cuma ada di kota-kota saja kong, tapi semenjak ada perusahaan ini, jangankan orang basar (dewasa), anak-anak usia 8 tahun saja sudah mengerti ladies itu apa, bahkan dorang me sudah bisa kenal deng bedakan mana ladies deng bukan ladies.”⁸⁵

Cerita ini terkonfirmasi oleh tuturan informan lain yang kami temui di tempat berbeda. Ia menceritakan bagaimana anaknya yang masih kecil sudah mengetahui istilah ‘*ladies*’ bahkan katanya, dia juga mengetahui Perempuan yang di sebut *ladies* itu yang mana dan Dimana mereka tinggal.⁸⁶ Fenomena ini tentu merupakan efek domino dari keberadaan industrialisasi “energi terbarukan” di desa Kawasi. Kondisi desa yang dipenuhi dengan ribuan masyarakat tentu saja menjadikan Kawasi sebagai salah satu desa di Indonesia dengan tingkat putaran uang yang tinggi. Industri Harita Group yang berada sekitar 500meter dari pemukiman telah merubah pola hidup masyarakat. Peralnya bersamaan dengan masifnya kedatangan orang-orang yang memadati perkampungan, berbagai jenis usaha kecil menengah mulai hidup. Dengan harapan meningkatkan ekonomi masyarakat, temuan di lapangan menggambarkan puluhan pelaku usaha yang ada di perkampungan bukanlah masyarakat asli Kawasi melainkan ada yang datang dari Labuha, Ternate, Kota Ambon bahkan ada juga yang datang dari Pulau Jawa.

Sama halnya dengan kepadatan penduduk yang terjadi, putaran uang yang ada di desa dalam jumlah besar bisa di lihat dari jumlah unit agen BRI Link yang ada. Dalam hitungan kami, hanya dalam jarak \pm 600meter atau seperdua dari panjangnya perkampungan sudah terdapat 74 unit. Puncak putaran/peredaran uang di Desa Kawasi dapat dilihat pada setiap tanggal 15 yang merupakan tanggal pembayaran gaji karyawan.

Selama berada dilapangan, tanggal 15 merupakan waktu yang sangat penting untuk menyaksikan secara langsung bagaimana kondisi hiburan malam yang ada ditengah perkampungan. Informasi tentang dunia malam di Kawasi memang sebelumnya telah diceritakan oleh beberapa masyarakat yang ditemui. Pada saat tanggal 15, seluruh cerita tentang kondisi di desa disaksikan langsung oleh peneliti. Pada hari pengambilan gaji ini, sepanjang jalan di perkampungan dihimpit oleh Ribuan pekerja yang berdatangan dari mess

⁸⁵ Hasil Wawancara Lapangan Dengan TU, Agustus 2024

⁸⁶ Hasil Wawancara Lapangan Dengan OP, Agustus 2024

perusahaan, ditambah dengan pekerja yang tinggal di desa. Kedatangan pekerja selain untuk mengambil gaji pada BRI-Link hingga membentuk antrian yang sangat panjang. Kedatangan ribuan pekerja yang berhamburan adalah untuk membeli beberapa kebutuhan lainnya juga untuk menghabiskan gaji mereka pada perempuan-perempuan yang menyediakan jasa seks komersial di penginapan-penginapan yang ada di desa.

Salah satu penginapan yang dijadikan sebagai tempat prostitusi adalah Penginapan Ardila. Penginapan yang juga ditinggali oleh peneliti selama dilaoangan ini adalah milik Kepala Desa Kawasi. Setiap malamnya penginapan ini selalu didatangi oleh beberapa karyawan perusahaan, ada yang datang dengan menggunakan pakaian kerja, ada juga yang tidak memakai pakian kerja. Puncaknya adalah pada malam tanggal 15 tersebut. Dalam hitungan peneliti, sore menjelang malam gajian, ada 11 orang perempuan yang di mobilisasi menggunakan motor untuk menempati beberapa kamar penginapan ini. Malamnya dari pukul 20.00 hingga pukul 23.00 terdapat 38 laki-laki yang berdatangan silih berganti. Sementara jika ditotalkan dari sore atau sekitar pukul 17.00 hingga pukul 02 dini hari, terhitung sekitar 93 orang laki-laki yang datang silih berganti.⁸⁷



Gambar 4.17 Tampak Depan Penginapan Ardila

Sumber: Dokumentasi lapangan 2024

Bisnis jasa ini mula-mulanya sangat tertutup dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi oleh oknum tertentu saja namun kebutuhan pasarnya yang meningkat membuat bisnis tersebut dilakukan secara terbuka dan terpusat. Maraknya bisnis kehidupan malam yang cukup bebas dan terbuka di desa kawasi sangat mempengaruhi moralitas serta etika orang kampung. Tanpa

⁸⁷ Hasil Observasi Lapangan, Agustus 2024

pertimbangan kebudayaan serta etika kehidupan kampung, pemerintah (Dinas Perizinan) menerbitkan izin tempat-tempat hiburan malam berupa tempat karaoke serta jasa pekerja seks komersial (PSK) yang terpusat. Bahkan tak sedikit dari pejabat daerah yang terlibat berinvestasi sebagai penyuplai PSK atau membangun infrastrukturnya bisnis tersebut.

Masyarakat yang menyaksikan putaran bisnis ini tiap harinya lambat laun terbuai dengan keuntungan yang cukup besar dari usaha tersebut dan melakukan bisnis serupa. Ada yang terlibat langsung sebagai pelaku usahanya ada pula sebagai penyedia jasa tempat usaha dengan cara mengontrakkan rumah mereka kepada pelaku usaha. Kemudahan dalam mengakses izin usaha dunia malam tentu saja harus melalui jaringan tertentu pada pihak pemerintah daerah. Konsep bagi untung biasanya selalu menjadi jembatan dalam penerbitan izin usahanya. Adapun konsep tukar guling juga sering berlaku, untuk masyarakat yang ingin mendapatkan izin usaha tersebut harus ditukar dengan kintal atau sebidang tanah yang dimiliki masyarakat.⁸⁸

Seluruh rangkaian cerita tentang kerusakan lingkungan hidup dari aktivitas pertambangan di Desa Kawasi merupakan keseluruhan fakta dari dampak operasinya pertambangan yang ada di Indonesia saat ini. Meskipun klasifikasi sebuah pulau dikatakan kecil seperti dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil adalah kurang dari 2000 kilometer, tetap saja secara sadar kita dapat melihat Obi sebagai sebuah pulau yang terbilang kecil. Hal ini bisa dilihat dari ketersediaan sarana dan prasarana ekologis yang ada di pulau ini seperti: peka dan rentan terhadap pengaruh eksternal, baik alami maupun akibat aktivitas manusia, juga sumber air tawar yang terbatas baik air permukaan maupun air tanah yang oleh Bergen secara umum disebut merupakan karakteristik biogeofisik yang menonjol pada pulau-pulau kecil⁸⁹.

⁸⁸ Hasil Deskstudy

⁸⁹ Bengen D. G. (2004) sinopsis ekosistem dan sumber daya alam pesisir dan laut, serta prinsip pengelolaannya. Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir Dan Lautan Institut Pertanian Bogor (PKSPL) IPB. diakses Januari 2025

V

PEMETAAN POTENSI RUANG BELAJAR

Fenomena kavitasi ruang social-ekologi pulau Obi dan desa Kawasi secara khusus, sebagaimana diuraikan diatas mungkin akan memberikan sebuah pesimisme. Seperti tidak ada lagi yang bisa dilakukan untuk Upaya pemulihan krisis social-ekologi yang telah, sedang, dan akan terjadi. Namun, seperti hukum alam, di Tengah kegelapan selalu ada bercak Cahaya yang selalu ada dan dapat dimasuki dalam proses-proses belajar Bersama. Naluri melawan tidak akan hilang, bahkan kita seseorang ter-captivasi sebagaimana terlihat pada Lembaga keagamaan dan daur hidup metabolik yang masih dipegang oleh beberapa masyakat di sekitar desa Kawasi.

1. Lembaga Agama

"Kantor Klasis dan orang-orang yang ada didalamnya kalo hanya pandai khotbah di mimbar deng hanya urus moral saja tapi hati seng tergerak melihat ketimpangan yang ada, berarti bubar saja."⁹⁰

Klasis Obi yang berkantor di Desa Wayaloar sekaligus pusat Kecamatan Obi Selatan menjadi sentrum gagasan dan ide bagi basis-basis masyarakat yang masih tetap mempertahankan hak-hak tenurial mereka atau lebih jauh lagi mereka yang masih tetap bertahan hidup dengan mengandalkan hutan dan kebun.

Gagasan penolakan terhadap kebijakan relokasi yang terjadi di Desa Kawasi pada 2019 lalu pun lahir dari Klasis dan Gereja yang tentu saja memfasilitasi keresahan masyarakat berupa aksi penolakan terhadap kebijakan tersebut.

Selain itu juga Klasis dan beberapa Tokoh Gerakan yang ada di Desa Kawasi berupaya mediasi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten berupa PERDA yang melahirkan JUKNIS tentang relokasi masyarakat desa Kawasi agar dapat disosialisasi secara terbuka di hadapan masyarakat Kawasi. Meskipun menemui kebuntuan dalam upaya tersebut namun Klasis dan para Tokoh tidak menyerah. Mereka terus mencari alternatif yang memungkinkan mereka bisa merealisasikan maksud perjuangan tersebut.

⁹⁰ Keterangan Warga Gereja, Agustus 2024

*“Torang tara punya tamang par babantu torang. Selama ini torang sandiri saja yang lawan kebijakan relokasi ini. Bukan saja persoalan relokasi, berbagai model masalah, mau itu dorang bage orang pe lahan secara paksa atau ganti rugi yang tara selesai atau juga ada masyarakat yang dapa paksa pindah ka Eco Villlage. Torang lawan sandiri saja, tara ada torang pe tamang di luar kampong selain jaringan Gereja deng Klasis saja”.*⁹¹

Berbagai cerita perlawanan yang digagas serta dikawal oleh Klasis dan juga Gereja banyak yang mencuat ke permukaan dan bahkan menjadi konotasi buruk di beberapa pekerja yang menganggap pihak gereja dan juga Klasis mendapatkan konotasi yang buruk jika mereka melakukan perlawanan karena tidak mendapatkan jatah bulanan dari pihak perusahaan. Padahal jika telusuri lebih jauh kebelakang, pada 2019 pihak gereja dan juga Klasis telah menyatakan sikap secara terbuka jika tidak akan menerima bantuan dalam bentuk apapun dari pihak perusahaan setelah pihak perusahaan makin masif merampas basis-basis produksi masyarakat secara paksa.

Sikap tegas dari gereja tersebut terkonfirmasi dengan tidak menggunakan fasilitas ibadah seperti gereja yang dibangun oleh pihak perusahaan baik di Desa Kawasi maupun di pemukiman baru Eco Villlage. Mereka masih tetap memakai gereja lama untuk proses peribadatan jemaat kawasi, sedangkan untuk warga kristen GPM yang telah pindah ke Eco Villlage, mereka memakai tenda beratapkan terpal untuk pelayanan keagamaan.

Tentu saja masih banyak yang dilakukan oleh pihak Klasis dan juga Gereja baik itu advokasi serta membangun jejaring untuk memperkuat basis perlawanan terhadap kebijakan pemerintah dan tindakan perusahaan yang semena-mena kepada warga Kawasi dan beberapa desa yang lainnya. Beberapa hasil advokasi berupa tulisan pun sempat tidak mau dimuat oleh media lokal, atau juga akun media sosial yang diblokir karena mempublikasi tulisan tentang keburukan perusahaan, semuanya terjadi dan dialami oleh beberapa tokoh pergerakan yang ada di Kawasi maupun di Wayaloar.

2. Masyarakat Wayalobar

Wayaloar seperti dunia lain di sisi selatan pulau Obi. Meskipun 90 persen pemuda-nya telah pindah ke Desa Kawasi untuk bekerja di tambang nikel milik PT Harita Group, tetapi masyarakat Wayaloar tidak menggantungkan kehidupan mereka pada perusahaan. Meski

⁹¹ Hasil Wawancara Lapangan dengan UN, Agustus 2024

secara geografi Desa Wayaloar telah dilingkari oleh area pertambangan disisi utara dan selatan, mereka tetap menggarap hutan dan kebun mereka sendiri dari pada menjual tanah serta hutan mereka kepada perusahaan.

Masyarakat Wayaloar pada umumnya menggantungkan penghidupan mereka pada kebun kelapa yang diolah menjadi kopra dan juga kebun cengkeh. Bukan berarti mereka bebas dari rayuan perusahaan sebab hampir setiap saat pihak perusahaan datang, baik CSR bahkan Direktur perusahaan melakukan sosialisasi tentang perusahaan yang ramah lingkungan juga membawa dampak baik bagi perekonomian mereka. Bahkan mereka digoda dengan nilai ganti rugi dua kali lipat jika dibandingkan dengan masyarakat yang ada di desa lain. Namun mereka tetap saja menolak dengan berbagai macam alasan, sebab menurut mereka hutan dan perkebunan mereka adalah investasi jangka panjang untuk generasi selanjutnya.

Meskipun ada juga keraguan di setiap orang apakah yang mereka lakukan sekarang benar atau keliru pun apakah masih tetap terjaga untuk beberapa tahun kedepan ada kekhawatiran semacam itu yang hidup dan tumbuh di benak setiap orang. Sikap keras mempertahankan tanah dan hutan bukan berarti babas respon intimidasi dari pihak perusahaan.

Wayaloar adalah Desa dengan tingkat kuota penerimaan paling sedikit dan yang paling banyak berada di daftar tunggu penerimaan karyawan. Banyak pemuda Wayaloar yang sudah ke Kawasi untuk menjadi buru harian lepas sambil menunggu nama mereka dipanggil oleh perusahaan. Beberapa diantara mereka bahkan telah mendaftar lebih dari setahun namun belum mendapatkan panggilan.

Padahal kuota pekeja prioritas anak daerah untuk setiap desa yang ada di Pulau Obi telah ditentukan, namun banyak yang belum mendapat panggilan meskipun namanya didaftarkan langsung pada pemerintah desa. Inilah bentuk-bentuk intimidasi perusahaan kepada mereka yang keras mempertahankan tanah dan juga dianggap menghalangi aktivitas operasional perusahaan.

3. Desa Wui

Desa Wui, jika secara administrasi tidak termasuk dalam kecamatan yang sama dengan Kawasi dan juga Wayaloar. Secara geografis desa Wui berada pada sisi paling selatan pulau Obi dan cukup jauh sebab hanya dapat dijangkau menggunakan transportasi laut selama satu 6 jam jika titik berangkatnya dari desa Kawasi dan 4 jam dari Wayaloar.

Desa Wui seperti situs romantisme untuk masyarakat Pulau Obi bernostalgia dengan cara hidup lama sebelum diekspansi berbagai macam perusahaan tambang. Kekayaan tuturan pengetahuan lokal yang dipraktekkan terbilang masih lengkap. Pola serta tahapan pengetahuan produksi ruang dan ruang produksi masih melekat pada perilaku harian masyarakat Wui.

Basis produksi mereka pun masih terbilang terjaga dan tetap bertahan meskipun teknologi yang dipakai telah berubah mengikuti perkembangan teknologi hari ini tetapi penggunaan ruang produksi masih semata-mata untuk kebutuhan harian bukan untuk akumulasi keuntungan atau menuruti kehendak pasar yang sangat tidak ramah dan memaksa.

Semisal pada kebutuhan harian, sebagian besar masyarakat Wui masih menenam padi ladang untuk pemenuhan karbohidrat harian mereka meskipun disampingnya mereka juga mengkonsumsi beras namun beras tidak serta merta menjadi kebutuhan pangan menggantikan padi ladang yang diproduksi sendiri.

4. Moda Produksi Ruang dan Ruang Produksi Orang Wui

*“Kitorang orang Wui percaya kalau sungai, gunung dan hutan semuanya punya jiwa yang hidup, kitorang pe nenek moyang datang kesini, barang (hutan, gunung, sungai, dll) samua sudah ada ratusan bahkan ribuan tahun, jadi tara boleh berlebihan, harus saling hormat antara orang-orang di kampung deng alam, caranya ya kitorang jaga(Lindungi) alam, pasti alam juga jaga kitorang”.*⁹²

Ruang yang pada dasarnya adalah sebuah wilayah tak terbatas yang menjadi tersekat dan terpilah. Konsep ruang sendiri menurut Elisabet Stroker sebagaimana dikutip Piliang (2004) dalam Dunia yang Dilipat, mengatakan ketidakterpisahannya dari konsep dunia, dengan dunia yang selalu meruang, dan ruangnya yang mendefinisikan dunia. Oleh sebab itu, memahami keberadaan ruang, sesungguhnya sama dengan memahami dunia. Hal ini berkaitan pula dengan eksistensi manusia dan dunia yang saling mempengaruhi. Satu hal hadir untuk melengkapi hal yang lain. satu pihak hadir untuk melengkapi hal yang lain. Manusia hadir untuk melengkapi dunia di sekitarnya. Jika demikian, pembahasan tentang kehidupan, alam, manusia, dan spiritualitas merupakan hal-hal yang membentuk kesatuan (dunia). (Baca: Jurnal Sosioteknologi Edisi 24 Tahun 10, Desember 2011)

Menurut *Heidegger*, ruang mengenai pembersihan dari rimba keliaran untuk dijadikan sebagai tempat (tinggal) dan aktivitas manusia. Misalnya, membuka lahan hutan dan

⁹² Keterangan Orang Wui, Agustus 2024

dialihfungsikan untuk menjadi tempat tinggal manusia, demikianlah menciptakan ruang, yaitu membuka suatu kemungkinan pemaknaan baru bagi manusia dari rimba misteri yang liar. Dunia pada awalnya mungkin menampakkan realitas yang satu atau tunggal, tetapi semakin lama-lama dan seiring dengan kemampuan manusia berpikir dan menafsir, realitas ini menjadi pecah berkeping-keping dan menjadi terbagi-bagi menjadi sesuatu yang sangat spesifik. Hal ini seperti rangkaian puzzle yang membelah-belah satu gambar menjadi banyak bagian. Hanya jika disusun dalam sebuah aturan yang benar, kepingan-kepingan tersebut tersusun menjadi sebuah satu gambar utuh.

Hal yang sama terjadi pula pada realitas dunia, realitas dipilah-pilah untuk dikaji, semakin lama semakin tebal jaraknya, dan terlalu rumit untuk disatukan karena pola pikir manusia yang sudah terbiasa untuk memisahkan dan membagi-bagi. Hal ini termasuk pula dalam cara manusia memandang dirinya dengan hal-hal disekitarnya dan pilihan-pilihan yang diambilnya. Manusia yang cenderung membedakan dirinya dengan individu yang lain, termasuk pula dengan keberadaan makhluk lain (binatang, tanaman). Kesadaran ini sering membuat manusia merasa berkuasa atas yang lain. oleh sebab itu, manusia secara membabi buta dapat merusak lingkungan alam di sekitarnya. Seharusnya hal ini tidak terjadi. Seharusnya manusia memiliki kesadaran bahwa dirinya dan alam merupakan satu kesatuan yang saling menyeimbangkan dan melengkapi. Whitehead berpendapat bahwa semua individu memiliki nilai intrinsik (nilai yang dimiliki sesuatu di dalam dan bagi dirinya sendiri), semua benda terhubung dengan lingkungannya, dan diri merupakan bagian dari diri ekologis. Tidak ada yang lebih tinggi dibanding keberadaan yang lain. Keberadaan semua hal yang ada di dunia saling melengkapi dan bersinergi. (*Baca: Alam, Manusia dan Spritualitas*)

Sebuah pandangan spritualitas yang sangat terbuka yang memperhatikan dinamika dan keunikan pengalaman manusia dalam berinteraksi dengan alam. Pengalaman manusia dalam berinteraksi dengan alam berbeda-beda dari satu kebudayaan ke kebudayaan lainnya, atau bahkan dari satu masa sejarah dengan masa sejarah lainnya. Namun meski berbeda, spritualitas tersebut, merupakan salah satu karakteristik yang tidak hanya bersifat fundamental, tetapi kondisi yang yang membuat manusia menjadi lebih manusiawi terhadap alam sekitarnya.

Untuk menyeimbangkan sistem alam, perekonomian baru yang berkelanjutan dan menghormati batasan sumber daya alam dan fungsi ekosistem adalah hal yang mendasar. Hal ini memerlukan perubahan dalam cara pandang kita dalam menggunakan sumber daya, menciptakan sirkular, seperti yang terjadi pada alam. Pengetahuan membaca dan menetapkan

batas-batas moda produksi ruang yang dikemas sedemikian rupa dalam perilaku harian merupakan hal paling penting bagi satu kelompok masyarakat.

Selain itu relasi manusia dan alam memiliki nilai spritual yang dijunjung tinggi dan dihormati karena keduanya merupakan entitas yang saling membutuhkan satu sama lain. Oleh karenanya perspektif serta cara pandang yang dihidupi masyarakat Wui dalam melihat alam bukanlah media produksi semata melainkan satu kesatuan yang utuh dalam siklus spritual serta kepercayaan mereka.

Cara pandang masyarakat Wui bahwasanya alam memiliki jiwa spritualnya sendiri dan patut dihormati karena darinya pengetahuan dan kebudayaan mereka berasal dan darinya pula kehidupan mereka masih tetap bertahan hingga sekarang. Mode penetapan batas-batas ruang produksi mencerminkan penghormatan mereka terhadap alam sangatlah tinggi.

Refleksi terhadap peran alam yang begitu signifikan dalam pembentukan karakteristik serta kebudayaan orang-orang Wui tergambarkan melalui tempo penguasaan alam baik daratan maupun laut yang tidak eksploitatif. Pola pembagian ruang produksi yang lahir dari produksi ruang sebagai basis pengetahuan memberikan kesadaran mendalam atas pentingnya menjaga alam sebagai dapur besar bersama.

Metode serta klasifikasi pemetaan ruang di tandai dengan penamaan tertentu memiliki fungsinya masing-masing dalam mendukung sistem produksi yang berbasis sepenuhnya ada pada alam. Pemetaan yang menaruh kampung beserta orangnya bukan sebagai objek utama menegaskan superioritas alam sebagai entitas yang setara dengan manusia.

Selain itu juga, konstruksi ruang menyimpan sejarah kedatangan orang-orang Tobelo dan Galela dari pesisir pulau Halmahera ke pulau Obi yang dikemudian hari membentuk satu kelompok untuk hidup bersama dengan perkampungan yang ada sekarang.

5. Pemetaan Ruang Produksi Darat dan Laut

Ruang Produksi Darat

- **Bubarane/Pantai**

Hal tersebut berlaku pada masyarakat Wui yang sangat menghormati proses-proses spritualitas antara manusia dengan alam. Pesisir pantai yang berada tepat di depan pemukiman atau lebih di kenal dengan istilah Bubarane merupakan tempat awal atau jembatan penghubung antara sumber kehidupan yang ada di darat dan laut dan dianggap sebagai pusat

dari lahirnya peradaban. Bubarane atau tempat persinggahan migrasinya orang Tobelo dan Galela dari Halmahera di Pulau Obi. Bubarane sendiri sangat sakral bagi orang Wui khususnya dikarenakan merupakan lokasi awal tempat singgah dari perjalanan panjang, juga merupakan tempat awal memulai penghidupan yang baru.

keberadaan bubarane bukan saja ada di depan pemukiman kampung, namun juga berlaku pada setiap rumah yang berada tepat di pesisir yang berhadapan langsung dengan pantai baik itu rumah tempat tinggal tetap atau sementara bahkan rumah kebun, maka pesisir pantainya tetap disebut sebagai bubarane atau tempat singgah dari satu perjalanan.

- ***Kampung***

Setelah Bubarane barulah kampung yang menjadi ruang berkumpul beberapa marga. Wui sendiri memiliki lima *soa/marga* yang pada mulanya semua berasal atau datang dari berbagai tempat yang ada di pulau Halmahera dan mayoritasnya dari suku Tubelo dan Galela. Datang sekitar 100 tahun lalu secara bertahap ke pulau Obi sebagai pelaut yang kemudian dikenal dengan istilah *Canga/Bajaklaut* pada masa kolonialme Belanda dan juga Jepang.

- ***Dudumo/Dumo (Tempat Sampah)***

Tepat di belakang kampung ditetapkan satu lokasi khusus sebagai tempat pembuangan sampah masyarakat. Pengelolaan serta pemetaan ruang sangat tegas dengan ciri khas masyarakat yang mengakui diri mereka sebagai pelaut. Hal tersebut terkonfirmasi dengan bagaimana cara mereka menghormati pantai dan laut sebagai suatu ruang yang istimewa dengan tidak membuang sampah ke pantai atau laut.

- ***Joro (Kebun Pangan)***

Joro merupakan jenis kebun yang ditanami tanaman pangan harian dengan berbagai macam jenis tanaman baik umur pendek maupun tahunan. Setiap pembukaan lahan produksi baru pasti akan dimulai dengan kebun/joro untuk penanaman pangan harian selama beberapa tahun, setelah itu barulah akan ditanami tanaman komoditas apabila joro/kebun tersebut dianggap sudah tidak lagi produktif memberikan penghasilan bahan pangan yang cukup untuk kebutuhan harian.

- ***Raki (Kebun Tanaman Komoditas)***

Antara *Joro* dan *Raki* tidak mempunyai batasan ruang yang tegas, yang membedakannya ialah jenis tanaman. *Raki* merupakan kebun yang khusus untuk tanaman komoditas, namun

sebutan terhadap *Joro* akan berubah menjadi *Raki* jika sudah di dominasi atau sudah beralih fungsi menjadi kebun tanaman Komoditas seperti pala, Cengkeh, Kelapa, Kakao dan lain sebagainya.

Setiap *Raki* berasal dari *Joro* namun tidak sebaliknya. Sebab lagi-lagi berawal pada metode pembukaan lahan produksi yang ditanami tanaman pangan, sebab itulah, kebun pangan atau *Raki* akan ditanami tanaman komoditas dan masyarakat akan mencari lahan baru untuk membuat tanaman pangan atau *Joro* yang baru.

Secara geografis, *Joro* dan *Raki* mempunyai jangkun akses yang fleksibel. Lokasi *Joro* berada lebih dekat dengan pemukiman agar mudah dijangkau dan dikontrol dari serangan hama dan sebagainya. Selain pengawasan terhadap hama, alasan kenapa *Joro* harus berlokasi dekat dengan pemukiman ialah agar setiap kebutuhan pangan harian mudah diakses. Sedangkan *Raki* cenderung berlokasi lebih jauh dan jenis tanamannya dianggap oleh masyarakat dapat tumbuh dan berkembang mengikuti situasi alam yang ada. Namun ada juga keberadaan *Joro* yang sama jauhnya dengan *Raki* dan dibuat pada lokasi yang sama sebagai pendukung pemenuhan pangan pada saat pembukaan lahan untuk *Raki*.

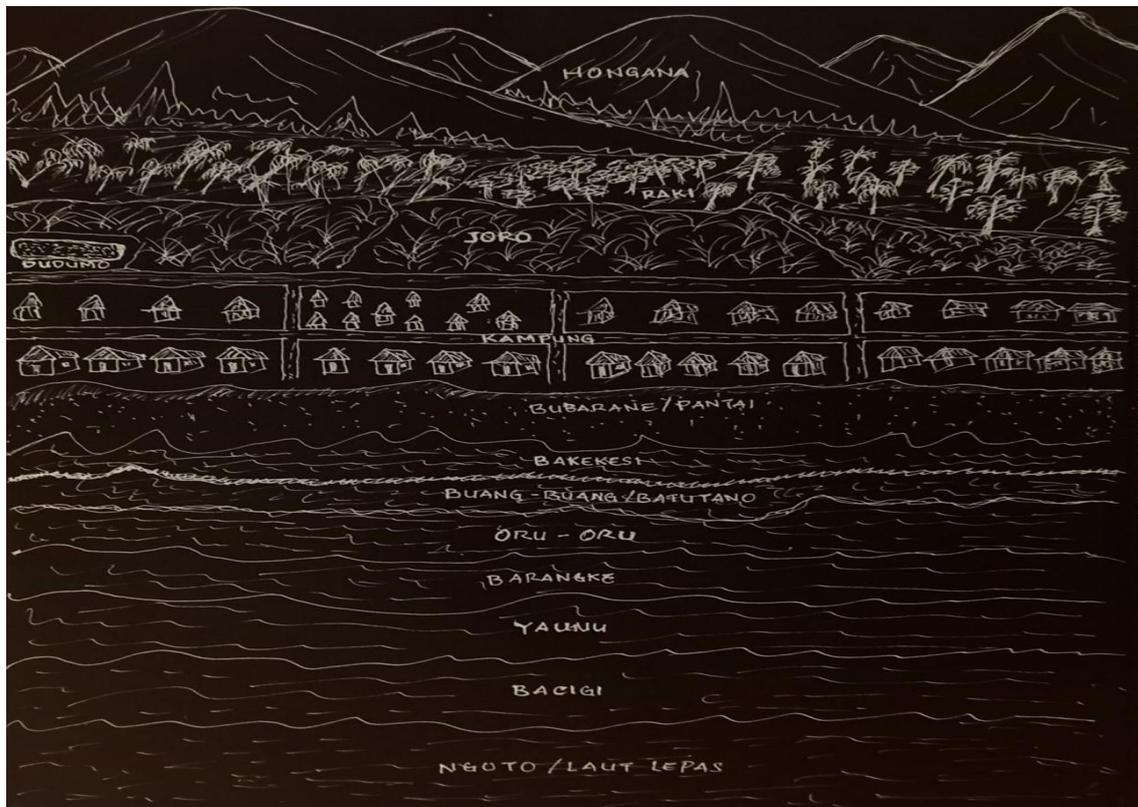
Pemaknaan *Raki* berbeda pada kebun sagu yang tumbuh secara alami. Kebanyakan kebun sagu memang tumbuh dan beranak-pinak secara alami baik di pesisir maupun di gunung. Kebun sagu lebih dikenal sebagai *Raki* atau lebih dianggap sebagai harta, meskipun secara fisik sagu adalah tanaman pangan namun tidak disebut sebagai *Joro* atau kebun pangan.

- ***Hongana (Hutan)***

Hutan belantara atau hutan yang belum tersentuh dengan aktivitas manusia disebut *Hongana*. Menurut kepercayaan masyarakat Wui, Hutan yang belum tersentuh oleh aktivitas manusia memiliki karomah dan spritualitas yang sama dengan manusia. Dalam konsepsi ruang masyarakat Wui, Hutan harus ada sebagai bagian dari siklus penting dalam kehidupan manusia sebab dari sana-lah sumber penghidupan itu berasal.

Orang-orang Wui mempercayai jika hutan mempunyai tubuh dan pikirannya sendiri. Hutan harus diperlakukan sama seperti apa yang di butuhkan manusia. Perlakuan penuh hormat atau cara menyapa hutan pun harus dengan salam apabila mendatanginya layaknya manusia mengunjungi rumah tetangga atau kerabatnya. Masyarakat Wui percaya jika hutan diperlakukan dengan tidak hormat maka akan ada akibat yang ditanggung oleh mereka baik

berupa hasil panen yang tidak baik maupun wabah penyakit yang menyerang tanaman pun orang kampung.



Gambar 5. 1 Sketsa Ruang Produksi dan Produksi Ruang Orang Wui

- ***Ruang Produksi Laut***

Pesisir menuju laut memiliki pemetaan ruang yang cukup padat sebagai ruang produksi masyarakat. Setiap tahap menuju laut memiliki nama dan fungsinya masing-masing sebagai pemenuhan kebutuhan harian masyarakat. Tidak hanya nama dan fungsi tetapi juga jenis kebutuhan yang diproduksi pada masing-masing ruang pun berbeda.

- ***Bakekesi***

Bakekesi adalah salah satu ruang produksi yang paling dekat dengan *Bubarane* dan *Kampung*. Tempat pecahnya ombak dari laut disebut *bakekesi* merupakan tempat masyarakat mencari *bia* (Keong jenis kecil) untuk pemenuhan protein harian mereka. Meskipun ruang produksi ini merupakan bagian dari laut namun sering kali dianggap sebagai bagian dari ruang produksi darat.

- ***Batutano/Buang-buang***

Ruang produksi selanjutnya adalah *Batutano/Buang-buang* yang merupakan tempat pertama dari ruang produksi yang dianggap sebagai bagian dari laut oleh orang Wui atau orang Pulau Obi dalam aktivitas memproduksi ikan untuk kebutuhan protein harian mereka. *Batutano/buang-buang* menjadi tempat awal bagi orang Wui membedakan antara ruang produksi yang ada di laut dan yang ada di darat. Jangkauannya pun masih sangat mudah tanpa harus menggunakan alat produksi layaknya nelayan pada umumnya seperti perahu maupun kail dan sebagainya.

- ***Oru-Oru***

Setelah *batutano* adalah *Oru-oru* yang merupakan tahapan atau tingkatan ruang produksi selanjutnya yang berada ditengah dan membutuhkan alat produksi yang lebih memadai. Untuk sampai ke *Oru-oru* sudah harus memakai perahu dan alat pancing layaknya nelayan kampung agar dapat beraktivitas pada ruang produksi tersebut. Tentu saja jenis ikan yang ditangkapakan berbeda dengan yang ada padaruang produksi sebelum atau sesudahnya.

- ***Barangke***

Sama halnya dengan ruang lainnya, *barangke* dalam keseharian orang-orang Wui merupakan tempat produksi ikan yang dianggap sudah memiliki nilai ekonomis atau dianggap sebagai ruang produksi jenis ikan tertentu yang dapat di makan dan di jual. Meskipun hasil tangkapan pada *Batutano* dan *Oru-oru* juga dapat dijual namun sebagian besar orang Wui menggunakan ruang tersebut sebagai ruang produksi pemenuhan kebutuhan harian mereka.

- ***Yaunu***

Lokasi khusus untuk memproduksi jenis ikan dasar yang tentu saja penggunaan teknologinya semakin canggih. Untuk mencapai *Yaunu* orang Wui sudah memakai perahu fiber dengan mesin walaupun masih ada yang menggunakan perahu dayung, namun sebagian besarnya sudah memakai fiber.

- ***Bacigi***

Ruang ini merupakan ruang terkakhir bagi aktivitas produksi orang Wui di laut. *Bacigi* adalah satu ruang jauh yang hanya dapat diakses oleh orang-orang yang mempunyai keahlian memancing atau nelayan tulen. Jenis ikan pada ruang ini seperti *Tuna* dan *Cekalang* atau jenis ikan pelagis lainnya. Ruang ini juga sering disebut sebagai *tampa mancari* atau tempatnya orang yang berprofesi nelayan mencari kebutuhan mereka.

- ***Ngoto/Laut bebas***

Laut lepas atau *Ngoto* sama halnya dengan *Hongana* yang ada di darat. Dianggap sebagai tempat sakral yang memiliki jiwa dan kehendak yang kuat dan mandiri. *Ngoto* dipercayai memiliki karomah dan sebagai induk dari kehidupan yang ada di laut. Tentu saja ada penghormatan khusus jika mendatangnya.

Setiap bagian ruang produksi menandai apa dan bagaimana orang Wui menghormati alam serta menentukan batas-batas perlakuan terhadapnya. Baik darat dan laut sama-sama pentingnya sebagai pendukung hajat hidupharian mereka. Selain itu pula pemetaan ruang produksi yang hidup dalam pengetahuan orang Wui membedakan jenis dan penggunaan fasilitas alat produksi. Kesemuanya dalam rangka menekan kemauan produksiyang eksploitatif.

DAFTAR PUSATAKA

- Haraway, D., Ishikawa, N., Gilbert, S. F., Olwig, K., Tsing, A. L., & Bubandt, N. (2016). Anthropologists Are Talking – About the Anthropocene. *Ethnos*, 81(3), 535–564. <https://doi.org/10.1080/00141844.2015.1105838>
- Tsing, A. L. (2015). *The Mushromm at the End of the World: On The Possibility of Life in Capitalist Ruins*. Princeton University Press.
- Tsing, A. L., Mathews, A. S., & Bubandt, N. (2019). Patchy Anthropocene: Landscape structure, multispecies history, and the retooling of anthropology. *Current Anthropology*, 60(S20), S186–S197. <https://doi.org/10.1086/703391>

Keseluruhan cerita dalam laporan ini menunjukkan satu hal: beroperasinya PLTU Captive di Desa Kawasi, Pulau Obi, memunculkan proses kavitasi kondisi sosial-ekologi pada skala pulau. Kavitasi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan terbentuknya gelembung-gelembung gas pada cairan karena perubahan tekanan di dalam pipa. Istilah ini memiliki konotasi negatif sebab keberadaannya dapat menurunkan daya tahan suatu benda. Kami menggunakan istilah ini untuk merepresentasikan fenomena penurunan kualitas kondisi sosial dan ekologi di Kawasi secara khusus dan pulau Obi secara umum ketika PLTU Captive beroperasi. Sejak kehadiran PLTU Captive sebagai pendukung utama kebutuhan energi untuk hilirisasi serta pemrosesan nikel pada smelter, sejak itu pula pengerukan dan penghancuran pulau Obi makin cepat dan massif. Situasi ini menunjukkan bahwa ruang sosial-ekologis pulau Obi dilihat hanya sebagai ruang produksi kapital, bukan ruang kehidupan bersama manusia dan entitas lainnya yang telah menyejarah. Fenomena ini bisa juga kita sebut, meminjam istilah Hendro Sangkoyo, pengeroposan kesatuan sosial-ekologis menyejarah oleh perluasan ruang akumulasi kapital baru yang akan melahirkan krisis baru. PLTU Captive berperan sebagai medium percepatan akumulasi kapital, sekaligus percepatan pengrusakan ruang sosial-ekologis.